

2023

LAPORAN KINERJA

BBPPTP SURABAYA



KEMANTAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERKEBUNAN



“Pertanian Maju,
Mandiri, Modern

balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id



(0321) 496430



Jl. Raya Gambiran No.52 Mojoagung



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
<i>Executive Summary</i> (Ikhtisar Eksekutif)	1
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Organisasi	6
C. Aspek Strategis Organisasi.....	8
1. Potensi Pembangunan Perkebunan	9
2. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Global	14
3. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Nasional	15
4. Aspek Sumber Daya Manusia.....	16
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Perencanaan Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024.....	18
1. Visi dan Misi BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024.....	19
2. Program dan Sasaran Program BBPPTP Surabaya	20
3. Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024	22
4. Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024.....	24
B. Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.....	26
C. Perjanjian Kinerja	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2023	33
1. Sasaran Kegiatan terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan	34
2. Sasaran Kegiatan tersedianya benih tanaman perkebunan	47
3. Sasaran kegiatan terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisiensi	89

B. Capaian Kinerja Lainnya.....	94
1. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	94
2. Kawasan Organik Partisipatif Komoditas Perkebunan (KOPI PASTI Perkebunan).....	98
3. Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	103
4. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun.....	108
C. Capaian Kinerja Tema Prioritas Nasional (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Pertanian)	112
a. Nurseri	113
b. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	117
D. Nilai Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2023, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.....	123
1. Sasaran terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	125
2. Sasaran tersedianya benih tanaman perkebunan	132
3. Sasaran terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien.....	138
E. Realisasi Anggaran.....	148
BAB IV. PENUTUP	154
LAMPIRAN.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPPTP Surabaya Tahun 2023	2
Tabel 2.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Pendidikan	16
Tabel 3.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan	17
Tabel 4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPPTP Surabaya 2020-2024	22
Tabel 5.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2023	26
Tabel 6.	Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2023	26
Tabel 7.	Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun 2023.....	27
Tabel 8.	Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2023	28
Tabel 9.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Tahun 2023	28
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan	30
Tabel 11.	Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja	34
Tabel 12.	Pengguna Jasa Layanan Informasi POPT/Konsultasi Tahun 2023	41
Tabel 13.	Data Penyaluran Benih Dinas Pertanian Kabupaten Pati	58
Tabel 14.	Data Penyaluran Benih CV. Lang Buana di Blitar	59
Tabel 15.	Data Penyaluran Benih CV. Budi Jaya Sejati di Jember	59
Tabel 16.	Data Penyaluran Benih CV Indonesia Hijau	60
Tabel 17.	Data Penyaluran Benih CV. Aulia Indoraya di Makassar	61
Tabel 18.	Data Penyaluran Benih CV. Wahana Multi Cipta di Kolaka	61
Tabel 19.	Data Penyaluran Benih Asosiasi Petani Pribumi di Luwu Timur	62
Tabel 20.	Data Penyaluran Benih Penangkar Benih Hijau Lestari di Enrekang	62
Tabel 21.	Data Penyaluran Benih PT. Benih Bumi Batara di Luwu Timur	63
Tabel 22.	Data Penyaluran Benih Penangkar Bibit Buntu Pasele di Tana Toraja ..	63

Tabel 23.	Data Peredaran Benih yang Masuk di Wilayah Provinsi Jawa Barat	64
Tabel 24.	Data Peredaran Benih yang Masuk di Wilayah Provinsi Bali	67
Tabel 25.	Data Peredaran Benih yang Masuk di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	69
Tabel 26.	Data Peredaran Benih yang Masuk di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	70
Tabel 27.	Hasil Produksi Benih Tebu di Nurseri Kabupaten Malang	82
Tabel 28.	Data Produksi Benih Kelapa di Pusat Nurseri Kelapa Kabupaten Batang	84
Tabel 29.	Sertifikasi Benih Tebu G1	85
Tabel 30.	Produksi Benih Tebu Varietas PS 862	86
Tabel 31.	Produksi Benih Tebu Varietas AMS Agribun	86
Tabel 32.	Produksi benih tebu varietas CMG Agribun	87
Tabel 33.	Proses Produksi Benih Kopi di Nurseri Gekbrong	88
Tabel 34.	Nilai Unsur Persepsi Pelayanan Tahun 2023	93
Tabel 35.	Realisasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Tahunan dan Penyegar	95
Tabel 36.	Realisasi HOK Tahun 2023 Kegiatan Nurseri	114
Tabel 37.	Target dan Capaian Sasaran Terkendalnya OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	125
Tabel 38.	Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Rekomendasi Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan	126
Tabel 39.	Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	130
Tabel 40.	Target dan Capaian Sasaran Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	132
Tabel 41.	Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Rekomendasi Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan	133
Tabel 42.	Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	137
Tabel 43.	Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Yang Efektif dan Efisien	139
Tabel 44.	Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2023	140

Tabel 45.	Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	142
Tabel 46.	Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	146
Tabel 47.	Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja	148
Tabel 48.	Serapan Dan Capaian Fisik Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja	149
Tabel 49.	CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Bombana	166
Tabel 50.	CPCL Benih Jambu Mete Grafting di Kabupaten Bombana	166
Tabel 51.	CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Buton Selatan	166
Tabel 52.	CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur	168
Tabel 53.	CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur	169
Tabel 54.	CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPPTP Surabaya	6
Gambar 2. Pengguna Jasa Layanan Informasi POPT/Konsultasi Tahun 2023	42
Gambar 3. Bimbingan lapang petani Kabupaten Berau	42
Gambar 4. Layanan Dokter Tanaman pada petugas lapang Dinas Pertanian Gresik	42
Gambar 5. Pelayanan Teknis Poktan Tani Lestari Desa Sumberagung Plosoklaten Kab Kediri	44
Gambar 6. Layanan Dokter Tanaman Pada Poktan Subur Makmur Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	45
Gambar 7. Pelayanan Teknis Poktan Tani Makmjur Pranggang Plosoklaten Kabupaten Kediri dan Pelayanan Teknis Pengendalian OPT Kopi di Pasrujambe Kabupaten Lumajang	45
Gambar 8. Kegiatan Sertifikasi Kelapa Dalam siap salur (Polybag) dan Sertifikasi Cengkeh asal biji siap salur (Polybag)	48
Gambar 9. Komoditas Sertifikasi Benih Tahun 2023	49
Gambar 10. Kegiatan Monev Sumber Benih Entres Mikro Kopi	54
Gambar 11. Kegiatan Monev Sumber Benih Entres Mikro Kopi dan Monev Benih Sumber Kopi (Arabika)	54
Gambar 12. Kegiatan Monev Sumber Benih Entres Mikro Kakao dan Monev Sumber Benih Kakao	54
Gambar 13. Kegiatan Monev Benih Sumber Kakao	54
Gambar 14. Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Monev BPT/PIT Kelapa dan Monev Benih BPT/PIT Kelapa Genjah Entog Kebumen	55
Gambar 15. Komoditas pada Kegiatan Uji Mutu Benih Tahun 2023	73
Gambar 16. Pengambilan contoh benih oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember	76
Gambar 17. Pengambilan contoh benih oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di BPSI TAS, Malang	76

Gambar 18. Pengambilan contoh benih oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di CV. Lang Buana, Blitar	77
Gambar 19. Dokumentasi kegiatan pengujian mutu benih kakao di Laboratorium Fisika Benih BBPPTP Surabaya	77
Gambar 20. Status Akreditasi ISO 17043:2010 BBPPTP Surabaya	79
Gambar 21. Komoditas Uji Profisiensi Tahun 2023	79
Gambar 22. Peta Sebaran Peserta Uji Profisiensi Tahun 2023	80
Gambar 23. Penyerahan Bantuan Saprodi dan Penandatanganan Gambar Naskah Deklarasi Dukungan KOPI PASTI Perkebunan	102
Gambar 24. Bimtek Tanaman Kopi di Kabupaten Kediri	102
Gambar 25. Sosialisasi Desa Pertanian Organik di Kelompok Tani Ampelsari Makmur 1	104
Gambar 26. Pelatihan Pembuatan Pakan Silase dan Pengendalian OPT Tanaman Kopi	106
Gambar 27. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kopi dan Penyerahan Bantuan Alat Pasca Panen di kelompok Tani Ampel Sari Makmur I	107
Gambar 28. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kopi dan Penyerahan Bantuan Alat Pasca Panen di kelompok Tani Ampel Sari Makmur I	110
Gambar 29. Bantuan kandang dan ternak kambing	110
Gambar 30. Bantuan rumah kompos dan dekomposer	110
Gambar 31. Bantuan pencacah dan pengayak kompos	110
Gambar 32. Bantuan mesin lubang biopori dan pembuatan lubang biopori	111
Gambar 33. Bantuan kereta sorong, pembuatan rorak dan pemangkasan	111
Gambar 34. Bantuan Mesin Pemotong Rumput dan terpal	111
Gambar 35. Bantuan obat-obatan ternak	112
Gambar 36. Pemberdayaan HOK pada Kegiatan Pemupukan Tebu di Nurseri Polbangtan Malang	114
Gambar 37. Pengendalian OPT Tanaman Tebu di Kabupaten Kediri	119
Gambar 38. Aplikasi pestisida nabati pada tanaman kakao	120
Gambar 39. Penyerahan Bantuan Pestisida Nabati	120

Gambar 40. Penyerahan Bantuan Pestisida Nabati untuk Tanaman Tebu 121
Gambar 41. Pengamatan intensitas serangan OPT Tebu 122

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Akses Data pada Aplikasi SIM OPT Perkebunan periode Januari - Desember 2023	47
Grafik 2. Data Sertifikasi Tahun 2022 dan 2023.....	50
Grafik 3. Grafik Potensi Produksi Kopi dan Kakao Puslitkoka dan Grafik Potensi Produksi Benih Kakao PT. Hasfarm Sukokulun	53
Grafik 4. Grafik Potensi Benih Kopi dan Kakao Bali dan Grafik Potensi Produksi Benih Kelapa Provinsi Jawa Tengah	53
Grafik 5. Data Penyaluran Benih Puslitkoka	57
Grafik 6. Data Penyaluran Benih Pusat Nurseri Kelapa Data Penyaluran Benih Pusat Nurseri Kelapa	58
Grafik 7. Data Peredaran Benih di Jawa Barat Pada Tahun 2023	64
Grafik 8. Data Peredaran Benih di Jawa Barat	65
Grafik 9. Data Peredaran Benih di Yogyakarta	65
Grafik 10. Data Peredaran Benih di Jawa Timur	66
Grafik 11. Data Peredaran Benih di Bali	67
Grafik 12. Data Peredaran Benih di Nusa Tenggara Barat	67
Grafik 13. Data Peredaran Benih di Nusa Tenggara Timur	68
Grafik 14. Data Peredaran Benih di Sulawesi Barat	69
Grafik 15. Data Peredaran Benih di Sulawesi Tenggara	70
Grafik 16. Jumlah Total Pengujian Mutu Benih Laboratorium tahun 2023	74
Grafik 17. Grafik Perbandingan Pengujian Mutu Benih Laboratorium Tahun 2022 dengan Tahun 2023	74
Grafik 18. Statistik Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan di BBPPTP Surabaya Tahun 2023	75
Grafik 20. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	92
Grafik 21. Tingkat Pendidikan Responden Pelayanan	93
Grafik 22. Rata-rata persentase serangan PBKo pada sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	109

Grafik 23. Rata-rata persentase serangan karat daun kopi (<i>Hemileia</i> sp.) pada sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	109
Grafik 24. Perkembangan intensitas serangan penggerek buah kakao sebelum dan sesudah pengendalian menggunakan pestisida nabati di setiap lokasi kegiatan	120
Grafik 25. Grafik 3. Fluktuasi serangan hama penggerek pucuk	121
Grafik 26. Perkembangan intensitas serangan PBKo sebelum dan sesudah pengendalian menggunakan pestisida nabati di setiap lokasi kegiatan	122
Grafik 27. Nilai Kinerja BBPPTP Surabaya pada Aplikasi SMART 2023	123
Grafik 28. Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2023	140

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Anggaran BBPPTP Surabaya Tahun 2023	156
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan	160
Lampiran 3. Rincian Kegiatan Nurseri Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Pertanian Tahun 2023	162
Lampiran 4. Distribusi Benih Jambu Mete Produksi Nurseri Bombana	166
Lampiran 5. Surat Tugas Penyusunan Laporan Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2023	170

KATA PENGANTAR



Serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2020-2024 diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) oleh masing-masing unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan, termasuk Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.

Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.

Capaian kinerja BBPPTP Surabaya berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BBPPTP Surabaya Tahun 2023 yaitu (1) terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya sebanyak 6 (enam) layanan tercapai 100%, (2) tersedianya benih tanaman perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi Perbenihan BBPPTP Surabaya sebanyak 6 (enam) layanan tercapai 100%, dan (3) terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja 3 Skala Likert (1-4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya tercapai sebesar 3,55 atau 118% dan kinerja unit pelayanan sangat baik.

Realisasi anggaran BBPPTP Surabaya pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 82.065.029.767.000,- dari total pagu Rp 86.263.204.000,- atau mencapai 95,61% dengan capaian fisik sebesar 103,70%. Pelaksanaan Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala, namun dengan upaya percepatan dan penanganan serta langkah-langkah strategis permasalahan tersebut dapat diminimalisir dampaknya bagi pembangunan perkebunan. Hal ini bertujuan agar kegiatan pembangunan perkebunan dapat dilaksanakan secara

efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Laporan Kinerja (LAKIN) BBPPTP Surabaya Tahun 2023 ini tersusun berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja BBPPTP Surabaya yang memadai.

Jombang, 30 Januari 2023

Kepala Balai Besar,



Dr. Fausiah T. Ladja., S.P., M.Si.

NIP. 197906202002122001

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. BBPPTP Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugasnya BBPPTP Surabaya, menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan penyiapan kebun sumber benih dan perbanyak benih;
3. pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih;
4. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih;
5. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
6. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon tanaman perkebunan;
7. pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
8. pelaksanaan pengembangan kawasan organik;
9. pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
10. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
11. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
12. pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan dan dampak anomali iklim;
13. pelaksanaan eksplorasi, perbanyak, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
14. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
15. pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
16. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

17. penguatan jejaring kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
18. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

Laporan Kinerja ini selain memuat tujuan dan sasaran, juga memuat analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana kerja tahun 2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan.

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPPTP Surabaya Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPPTP Surabaya Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
1.	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan	1-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6	Layanan
2.	Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	2-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	6	Layanan
3.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	3-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	3	Skala likert (1-4)

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023 secara keseluruhan capaian kinerja BBPPTP Surabaya adalah **Sangat Berhasil** dengan persentase capaian rata-rata 106,11%. Capaian ini didukung dengan terselenggaranya target pelayanan BBPPTP Surabaya dan perolehan Nilai Kinerja Pelayanan Publik BBPPTP Surabaya pada tahun 2023 yang termasuk dalam kategori A atau "Sangat Baik" dengan nilai IKM 88,85. Capaian kinerja BBPPTP Surabaya apabila dibandingkan dengan capaian tiga tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada sasaran kegiatan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien yaitu sebesar 1,56%.

Pada sisi pengelolaan anggaran, realisasi penyerapan anggaran BBPPTP Surabaya sebagaimana yang tercatat pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp 82.480.253.121,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 86.263.204.000,- atau mencapai 95,61% dengan capaian fisik sebesar 103,70%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPPTP Surabaya pada tahun anggaran 2023 terlaksana dengan BAIK dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 68,329.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

BBPPTP juga telah menghasilkan berbagai capaian kinerja lainnya selama tahun 2023, antara lain berhasil melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Kawasan Organik Partisipatif Komoditas (KOPI PASTI) Perkebunan, Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia pada Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BBPPTP Surabaya melibatkan tenaga kerja harian dalam kegiatannya. Anggaran HOK yang terealisasi pada tahun 2023 adalah Rp 1.205.030.000,- dari total anggaran untuk HOK yaitu Rp 1.365.970.000,-. Realisasi tersebut adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan operasional nurseri, produksi benih dan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. BBPPTP Surabaya mempunyai peranan strategis dalam memberikan kontribusi atas produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, juga menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan. Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan.

Implikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.

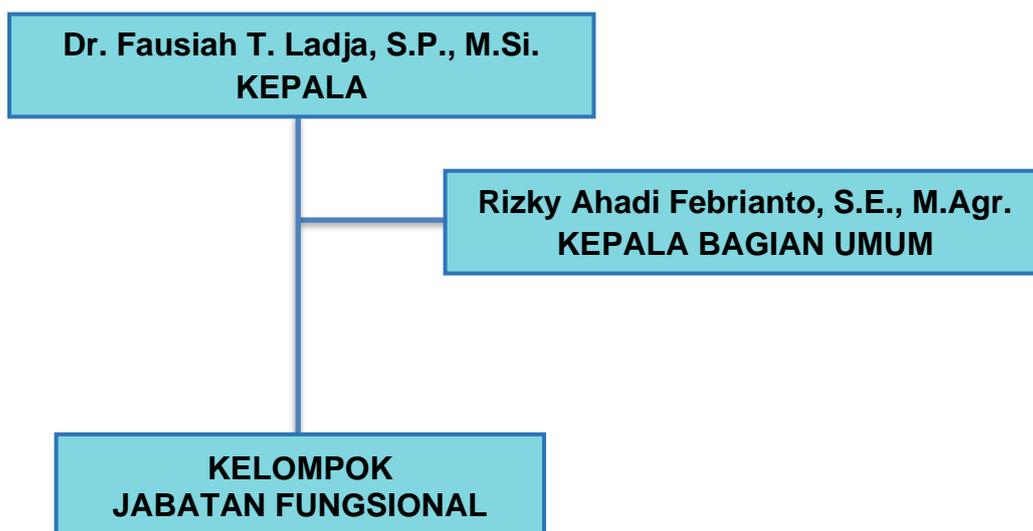
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP yang memadai harus mengandung unsur Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu unsur Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu unsur penting dalam SAKIP yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN disusun dengan format yang terdiri dari 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan Kinerja; 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja yang meliputi: (a) Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja; (b) Realisasi Anggaran

yang digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 4) Bab IV Penutup dan Lampiran. Di dalam Bab III juga membahas 1) capaian terhadap target tahun berjalan; 2) capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu/beberapa tahun sebelumnya; 3) capaian kinerja terhadap Renstra dan PK; 4) membandingkan capaian kinerja dengan standar nasional; 5) analisis keberhasilan dan penyebab kegagalan; analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya; serta 7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

B. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, struktur organisasi BBPPTP Surabaya adalah sebagai Berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPPTP Surabaya

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Kepala BBPPTP Surabaya dibantu oleh Kepala Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi BBPPTP Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yang selanjutnya disebut BBPPTP Surabaya merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

b. Tugas

BBPPTP Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas di atas BBPPTP Surabaya, menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan penyiapan kebun sumber benih dan perbanyak benih;
3. pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih;
4. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih;
5. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
6. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon tanaman perkebunan;
7. pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
8. pelaksanaan pengembangan kawasan organik;
9. pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
10. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
11. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
12. pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan dan dampak anomali iklim;
13. pelaksanaan eksplorasi, perbanyak, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
14. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
15. pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

16. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
17. penguatan jejaring kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
18. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

C. Aspek Strategis Organisasi

Secara umum isu strategis sub sektor yang saat ini masih berlangsung, usaha perkebunan strategis nasional dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat yang mencapai lebih dari 90%. Namun demikian, secara umum produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah, misalnya produktivitas kopi yang hanya 0,78 ton/ha, kakao 0,80 ton/ha, karet 1,2 ton/ha, kelapa sawit 3,1 ton/ha. Hal ini terjadi karena beberapa sebab antara lain kondisi tanaman yang sudah tua, penggunaan benih asalan, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang belum optimal.

Bersamaan dengan itu, luas area kebun rakyat yang perlu diremajakan/direhabilitasi karena tanamannya sudah tua dan/atau rusak sangat luas, yaitu mencapai 1,742 Juta ha atau 11,2% dari luas perkebunan rakyat strategis nasional (Renstra Ditjenbun, 2020-2024). Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun.

Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan prioritas pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain, modal finansial, serta peningkatan SDM petani (jumlah dan kapabilitas).

Mencermati isu-isu strategis tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan di daerah melalui BBPPTP Surabaya sebagai representasi Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Pemerintah selalu berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi melalui program-program pembangunan perkebunan yang berorientasi pada peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan secara berkelanjutan.

Aspek strategis organisasi ini didukung oleh adanya potensi pembangunan perkebunan yang ada, ditengah tantangan yang dihadapi. Eksistensi organisasi BBPPTP Surabaya Direktorat Jenderal Perkebunan sangat strategis dalam mengoptimalkan dan memberdayakan potensi perkebunan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tantangan yang dihadapi melalui implementasi kebijakan dan program pembangunan perkebunan.

1. Potensi Pembangunan Perkebunan

Pembangunan perkebunan ke depan akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu pilar ekonomi, perkebunan ditopang oleh beberapa potensi antara lain:

- a. **Keanekaragaman hayati melimpah sebagai negara tropis.** Sebagai negara tropis maka Indonesia secara alami merupakan Kawasan dengan efektivitas dan produktivitas yang tinggi dalam pemanenan dan transformasi energi matahari menjadi *bio-massa* dan *feedstock bio-industry*. Kondisi ini juga dapat menjadi basis keunggulan kompetitif dalam *bioeconomic*;
- b. **Pengembangan *bio-economic*.** Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dalam bentuk komoditas pangan dan perkebunan sebagai sumber pemanfaatan *bio-economic*. *Bio-economic* mengacu pada semua aktivitas ekonomi menggunakan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan *bio-*

economic dipacu oleh semakin tingginya tuntutan atas produk pangan berkualitas termasuk *functional food*;

- c. **Peningkatan permintaan dunia terhadap 4F Crops (Food, Feed, Fiber and Fuel).** Komoditas perkebunan di Indonesia memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia (*food*), sumber pakan ternak (*feed*), kebutuhan serat pangan (*fiber*) untuk pupuk organik dan bahan bakar biomassa dan kebutuhan minyak nabati (*fuel*) untuk kebutuhan bahan bakar nabati (BBN). Peluang ini perlu dimanfaatkan karena semakin tingginya permintaan dunia akan produk 4F Crops yang ramah lingkungan sebagai implikasi dari menipisnya cadangan fosil di dunia.
- d. **Kecenderungan baru penghargaan atas jasa lingkungan dan jasa amenity.** Lahan perkebunan tidak hanya penghasil bahan makanan, serat dan energi tetapi juga mempunyai multifungsi yang menghasilkan jasa lingkungan dan jasa amenity. Jasa lingkungan dan jasa amenity lahan perkebunan antara lain penyedia sumber air tanah dan oksigen, pengendali banjir, pencegah erosi/longsor dan sedimentasi, mempertahankan suhu udara, mendaur ulang limbah, menjaga kualitas udara/ purifikasi, pengatur tata air dan menjaga keberadaan sumber daya air, memitigasi perubahan iklim, sumber keindahan dan kenyamanan, pelestari keanekaragaman hayati, pelestari budaya pedesaan, dan sebagainya.
- e. **Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/perkebunan.** Perkembangan diseminasi teknologi kepada petani/pekebun lebih mudah dilakukan karena umumnya petani/pekebun tertarik kepada hal-hal yang bersifat inovatif, namun tingkat adopsi masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan dengan mengadopsi teknologi baru tidak mendapatkan insentif atau nilai tambah artinya harga yang diterima tidak berbeda jauh dengan harga produk tanpa teknologi baru.
- f. **Ketersediaan sumber daya lahan dan kesesuaian agroekosistem.** Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan

belum dimanfaatkan secara optimal. Total luas daratan Indonesia sebesar 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar (64,6%) kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya (35,4%) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya di daratan yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektar, meliputi lahan basah 25,6 juta hektar; lahan kering tanaman semusim 25,3 juta hektar dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Sampai saat ini dari areal yang berpotensi untuk pertanian, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta hektar sehingga masih tersisa 54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan area pertanian.

g. Distribusi dan aksesibilitas pemanfaatan sumber daya air.

Ketersediaan sumber daya air nasional (*annual water resources/AWR*) masih sangat besar, terutama di wilayah barat, akan tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sebaliknya di sebagian besar wilayah timur yang radiasinya melimpah dan curah hujan rendah (<1.500 mm per tahun) hanya terdistribusi selama 3-4 bulan. Total pasokan atau ketersediaan air wilayah (air permukaan dan air bumi) di seluruh Indonesia adalah 2.110 mm per tahun setara dengan 127.775 m³ per detik. Indonesia dikategorikan sebagai negara kelompok 3 berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya airnya yang membutuhkan pengembangan sumberdaya 25-100% dibanding kondisi saat ini.

h. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI). SDI ini dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif perkebunan Indonesia yang merupakan pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai. Pengembangan SDI perkebunan harus memperhatikan beberapa hal agar mampu meningkatkan daya saing di tataran internasional diantaranya: 1) pendidikan dan kemampuan/*skills*; 2) keberadaan usia SDI yang produktif; 3) adopsi inovasi dan teknologi; 4) kreativitas; 5) peluang pelatihan, penelitian, pemberdayaan dan pendidikan; 6) migrasi tenaga kerja ke sektor lain; 7) ketimpangan pendapatan dan sosial ekonomi lainnya; 8) sosial budaya dan karakteristik SDI perkebunan; 9) ketersediaan sarana prasarana kerja dan lingkungan kerja; dan 10) aksesibilitas, konektivitas dan minat.

- i. **Bonus Demografi.** Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi” yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja di Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.
- j. **Perkembangan struktur, perilaku dan kinerja pasar.** Perdagangan komoditas perkebunan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, terutama didorong oleh peningkatan rasio pendapatan masyarakat, peningkatan jumlah penduduk, adanya dukungan regulasi dan akses pasar yang semakin terbuka. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian/perkebunan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian/ perkebunan Indonesia.
- k. **Momentum gerakan desentralisasi pemerintahan.** Pemanfaatan momentum gerakan desentralisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan perkebunan apabila diarahkan untuk pengembangan sistem politik perkebunan yang digerakkan oleh/dan berorientasi pada pekebun/petani kecil. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2000, peran pemerintah saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan pertanian/ perkebunan. Pembangunan pertanian/ perkebunan pada era otonomi daerah lebih mengandalkan kreativitas rakyat/ masyarakat pekebun di setiap daerah.
- l. **Partisipasi masyarakat pekebun.** Paradigma pembangunan pada era otonomi daerah memosisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara dinamik dan kreatif didorong untuk terlibat

dalam proses pembangunan sehingga terjadi perimbangan kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mengendalikan hak pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang cenderung berpihak kepada pengusaha dengan anggapan bahwa kelompok pengusaha memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan nasional.

m. Dinamika tata kelola dan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi secara nasional telah tercantum dalam Undang- Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menyebutkan “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”. Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah (1) modernisasi manajemen kepegawaian, (2) restrukturisasi, *downsizing dan rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi, (3) rekayasa proses administrasi pemerintahan, (4) anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, serta (5) hubungan baru yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Potensi pembangunan perkebunan merupakan modal penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya mengoptimalkan pembangunan perkebunan, maka pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kawasan.

Pengembangan kawasan perkebunan sesuai dengan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi, kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis maupun lokasi baru yang sesuai tipologi agroekosistem dan persyaratan budidaya

bagi masing-masing jenis komoditas perkebunan. Kriteria khusus kawasan perkebunan mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas, baik untuk tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah. Kriteria khusus kawasan perkebunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengusaha perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha. Perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi.
- b. Pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti plasma, kerjasama kemitraan perkebunan rakyat perusahaan mitra, kerja sama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerja sama lainnya.
- c. Arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya kelapa sawit, dengan penerapan sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

2. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Global

Tantangan pembangunan perkebunan dalam ruang lingkup global yang akan dihadapi terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar global dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerja sama bilateral/multilateral/regional lainnya)
- b. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015)
- c. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas)
- d. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT)

- e. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan)
- f. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku)

Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar)

3. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Nasional

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup sektor pertanian terutama berkaitan dengan kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan yaitu:

- a. Penurunan minat generasi muda terhadap budidaya pertanian/perkebunan (implikasi terbatasnya sumber daya insani (SDI) pertanian/perkebunan)
- b. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lain atau dari satu komoditi menjadi komoditi lain
- c. Pembangunan pertanian difokuskan pada pengembangan Kawasan dengan korporasi petani. Dalam pengembangan Kawasan dan korporasi akan dihadapkan pada pengoptimalan berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik
- d. Adanya anomali iklim yang patut diantisipasi dalam upaya pelaksanaan pembangunan perkebunan
- e. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan) yang belum optimal
- f. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan pemanfaatan, degradasi dan konversi/alih fungsi lahan (implikasi permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan)
- g. Peningkatan kemampuan pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan
- h. Kondisi tanaman tua dan tanaman dengan produktivitas rendah

- i. Tuntutan penerapan konsep pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- j. Tuntutan pengaturan perizinan usaha perkebunan
- k. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan, kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi).

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Pegawai BBPPTP Surabaya sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah sebanyak 114 orang. Data pegawai berdasarkan pada Golongan Kepangkatan dan Pendidikan serta jabatan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Pendidikan

No.	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	0	0	2	0	0	2	4
3	III	1	23	51	0	6	0	0	6	87
4	IV	1	13	7	0	0	0	0	0	21
5	VII	0	0	0	0	2	0	0	0	2
6	IX	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	2	36	58	0	10	0	0	8	114

Tabel 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala UPT	1
2.	Kepala Bagian Umum	1
3.	POPT Madya	4
4.	POPT Muda	21
5.	POPT Pertama	8
6.	POPT Penyelia	1
7.	PBT Madya	8
8.	PBT Ahli Muda	16
9.	PBT Ahli Pertama	4
10.	PMHP Muda	2
11.	Statistisi Ahli Muda	1
12.	POPT Mahir	2
13.	POPT Terampil	4
14.	PBT Mahir	2
15.	Arsiparis Pertama	1
16.	Calon POPT Terampil	1
17.	Fungsional Umum:	37
	a. Pengevaluasi Rencana	1
	b. Pengumpul Data	21
	c. Pengadministrasi Keuangan	3
	d. Bendahara Pengeluaran	1
	e. Bendahara Penerimaan	1
	f. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
	g. Verifikator Keuangan	
	h. Analisis Data dan Informasi	1
	i. Petugas SAK	1
	j. Pengadministrasi dan Penyaji Data	1
	k. Caraka	3
	l. Pengadministrasi Umum	1
		1
	Total	114

Keterangan:

POPT : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

PBT : Pengawas Benih Tanaman

PMHP : Pengawas Mutu Hasil Pertanian

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024

Pembangunan sektor perkebunan merupakan salah satu dari lima Prioritas Kerja Presiden tahun 2019-2024. Lima Prioritas Kerja Presiden tahun 2019-2024 yaitu:

1. **Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur**

Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.

2. **Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**

- a. Menjamin kesehatan Ibu hamil dan anak usia sekolah;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.

3. **Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja**

Memangkas hambatan investasi.

4. **Reformasi Birokrasi**

- a. Kecepatan melayani dan memberi izin;
- b. Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
- c. Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

5. **APBN yang fokus dan tepat sasaran**

APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prioritas Kerja Presiden diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang mengusung tema pembangunan “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Tema pembangunan tersebut sekaligus menjadi Visi Presiden dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024.

Tema pembangunan ini dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang

Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Pertanian berkontribusi pada Program Nasional (PN) 1, yaitu “Penguatan Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”, dengan 2 (dua) Program Prioritas, yaitu: PP 3 (Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan) dan PP 6 (Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi). Untuk mewujudkannya, Direktorat Jenderal Perkebunan dan BBPPTP Surabaya sebagai UPT di daerah secara konkrit memberikan kontribusi pada Program Prioritas, “Nilai tambah dan daya saing industri:” Program Prioritas (PP) 3, “Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan” dan Program Prioritas (PP) 6, “Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi”.

Sasaran Program Peningkatan nilai tambah dan daya saing industri antara lain meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan dan terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan. Peningkatan kegiatan untuk padat karya dilakukan dengan fasilitasi kegiatan berupa pemberian upah (HOK) pada nurseri di kegiatan penguatan perbenihan perkebunan.

1. Visi dan Misi BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024

a. Visi

Dalam rangka mendukung visi Direktorat Perkebunan yaitu “Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”, maka BBPPTP Surabaya menetapkan visi tahun 2020- 2024 yaitu “Menjadi Balai yang Profesional dalam Melaksanakan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih

serta Pengembangan dan Penyiapan Teknologi Proteksi dalam Mewujudkan Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing”.

b. Misi

Misi BBPPTP Surabaya tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Mewujudkan Pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan benih secara cepat, tepat dan akurat;
- 2) Mewujudkan dukungan penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan melalui pengembangan dan tata kelola nurseri tanaman perkebunan yang profesional;
- 3) Mewujudkan dukungan perlindungan perkebunan melalui inovasi teknologi proteksi yang ramah lingkungan dalam mengatasi gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan serta pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
- 4) Mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas sebagai implementasi reformasi birokrasi kepada masyarakat melalui pelayanan data dan informasi serta dukungan teknis lainnya dalam bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan
- 5) Mewujudkan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.

2. Program dan Sasaran Program BBPPTP Surabaya

BBPPTP Surabaya merupakan unit Eselon II Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan atas Program dan Sasaran Program unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dijelaskan pada di bawah ini:

Tabel 5. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat pemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80.50	81.00	81.50	82
		Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	80	45	45	45	45
		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1.8	1.82	1.85	2.00	2.10
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32.58	32.62	32.72	32.75	32.91
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85

Berdasarkan tabel di atas Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki Kerangka Kinerja 2020-2024 yaitu program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Dukungan Manajemen. BBPPTP Surabaya sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perkebunan di daerah, melaksanakan program dan sasaran program tersebut dalam bentuk kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu program sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPPTP Surabaya 2020-2024

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK-1	Penguatan Perlindungan Perkebunan						
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPPTP Surabaya	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah akreditasi lab proteksi tanaman perkebunan	Akreditasi	1	1	1	1	1
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	27	27	26	25	24
	Penguatan Perbenihan Perkebunan						
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPPTP Surabaya	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah akreditasi lab perbenihan sesuai standar internasional	Kreditasi	2	3	3	3	3
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	18	17	17	16	15
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan						
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP Surabaya) yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	Tingkat kepuasan layanan ASN BBPPTP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3

Tabel di atas menunjukkan target kinerja BBPPTP Surabaya untuk periode 2020-2024. Setiap capaian indikator merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi dan misi BBPPTP Surabaya.

BBPPTP Surabaya memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan yang capaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capaian kinerja BBPPTP Surabaya pada tiap tahun pengukuran.

3. Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BBPPTP Surabaya menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b) pelaksanaan penyiapan kebun sumber benih dan perbanyak benih;
- c) pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih;
- d) pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih;
- e) pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
- f) pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon tanaman perkebunan;
- g) pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- h) pelaksanaan pengembangan kawasan organik;
- i) pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
- j) pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- k) pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
- l) pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan dan dampak anomali iklim;
- m) pelaksanaan eksplorasi, perbanyak, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
- n) pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
- o) pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- p) pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- q) penguatan jejaring kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- r) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

4. Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024

Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan tercantum dalam Renstra Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

BBPPTP Surabaya melaksanakan kegiatan Program Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar oleh Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar. Program ini lebih diprioritaskan untuk peningkatan produksi melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelayanan yang berkualitas.

Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/pengawasan/pendampingan, regulasi dan pendanaan di daerah perlu didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayah masing-masing.

BBPPTP Surabaya melaksanakan program Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar terhadap pengembangan 4 (empat) komoditas unggulan melalui peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan berorientasi ekspor yaitu kopi, kakao, kelapa, dan jambu mete.

b) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan. Arah kebijakan umum Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
- 2) Fasilitas Teknis dalam rangka Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan

Bentuk kegiatan penguatan perbenihan tanaman perkebunan oleh BBPPTP Surabaya yaitu kegiatan pengembangan jaringan laboratorium perbenihan tanaman Perkebunan, pengembangan pelayanan teknis dan informasi perbenihan.

c) Penguatan Perlindungan Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan yaitu terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan melalui kegiatan pengembangan teknologi terapan perlindungan tanaman perkebunan, pengembangan teknologi Agens Pengendali Hayati, pengembangan jaringan laboratorium proteksi tanaman Perkebunan, Pengembangan Pelayanan Teknis dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan.

d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam rangka mewujudkan 1) pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan dan 2) Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan BBPPTP Surabaya yang efektif, efisien dan akuntabel.

Penetapan indikator kinerja kegiatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi BBPPTP Surabaya dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan serta adanya restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan output/outcome yang lebih terukur dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK).

B. Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Sasaran kegiatan utama BBPPTP Surabaya tahun 2023 adalah terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan, tersedianya benih tanaman perkebunan, dan terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien, sedangkan alokasi anggaran per kegiatan dijelaskan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	14.582.965.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	14.582.965.000
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	62.176.390.000
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	44.172.680.000
1779	Penguatan Perlindungan Tanaman Perkebunan	9.503.849.000
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	18.003.710.000

Kegiatan utama BBPPTP Surabaya dan dukungan anggaran tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44.172.680.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	44.172.680.000
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	44.172.680.000
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	16.106.070.000
1777.RAI.001.051	Perluasan Tanaman Kopi	9.290.340.000
1777.RAI.001.052	Peremajaan Tanaman Kopi	3.200.080.000

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
1777.RAI.001.054	Intensifikasi Tanaman Kopi	2.545.600.000
1777.RAI.001.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	1.070.050.000
1777.RAI.002	Kawasan Kakao	7.154.060.000
1777.RAI.002.052	Peremajaan Tanaman kako	1.240.000.000
1777.RAI.002.054	Intensifikasi Tanaman Kakao	5.574.060.000
1777.RAI.002.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	3.400.000.000
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	18.680.230.000
1777.RAI.005.051	Perluasan Tanaman Kelapa	10.452.900.000
1777.RAI.005.052	Peremajaan Tanaman Kelapa	6.613.100.000
1777.RAI.005.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	1.614.230.000
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete	2.232.320.000
1777.RAI.007.051	Perluasan Tanaman Jambu Mete	739.400.000
1777.RAI.007.052	Peremajaan Tanaman Jambu Mete	831.825.000
1777.RAI.007.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	661.095.000

2. Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.503.849.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	9.503.849.000
1779.ABR.001.051	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	977.575.000
1779.CAG.001.054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	44.700.000
1779.CAG.002.051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	950.780.000
1779.PDC.001.051	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	290.900.000
1779.PDC.001.052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	29.500.000
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	7.210.394.000
1779.RAI.001.051	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	378.475.000
1779.RAI.001.052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	57.500.000

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
1779.RAI.002.051	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	5.176.100.000
1779.RAI.002.052	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah	984.225.000
1779.RAI.002.053	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	614.094.000

3. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.003.710.0000,- dengan rincian sebagaimana di bawah ini:.

Tabel 8. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	18.003.710.0000
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	2.051.468.000
5890.BJA.001.051	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	1.123.468.000
5890.BJA.002.051	Pengujian Mutu Benih	928.000.000
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.952.242.0000
5890.RBK.001	Nursery	15.952.242.0000
5890.RBK.001.051	Pembangunan Nursery	1.713.900.000
5890.RBK.001.052	Operasional Nursery	13.758.542.000
5890.RBK.001.053	Produksi Benih	479.800.000

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.582.965.000,- dengan output sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 9. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	14.582.965.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	14.582.965.000

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.189.225.000
1780.EBA.956	Layanan BMN	273.300.000
1780.EBA.956.052	Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat	273.300.000
1780.EBA.962	Layanan Umum	1.513.512.000
1780.EBA.962.052	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat	1.513.512.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.402.413.000
1780.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	8.560.159.000
1780.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.842.254.000
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM	408.200.000
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	408.200.000
1780.EBC.954.052	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat	408.200.000
1780.EBC.954.052.A	Administrasi Kepegawaian	85.600.000
1780.EBC.954.052.B	Peningkatan Kapabilitas Pegawai	322.600.000
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	584.140.000
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	584.140.000
1780.EBD.952.053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran UPT Pusat	584.140.000
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	221.400.000
1780.EBD.953.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat	221.400.000
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	180.000.000
1780.EBD.955.053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat	180.000.00

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target sasaran kinerja serta indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output).

Perjanjian Kinerja (PK) sebagai penjabaran dari Rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan setiap tahunnya dan telah mengikuti Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014. Sebagai dukungan terhadap Upaya pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja, pada Tahun 2023 BBPPTP Surabaya mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp 86.263.204.000,-.

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan

No.	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
1.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	1-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6	Layanan
2.	Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	2-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	6	Layanan
3.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	3-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	3	Skala likert (1-4)

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa Perjanjian Kinerja Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan adalah:

- a. Target terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya adalah 6 (enam) layanan.

Layanan rekomendasi data dan informasi proteksi yang diselenggarakan oleh BBPPTP Surabaya adalah sebagai berikut:

- a) Pengujian Mutu Agens Pengendali Hayati (APH)
- b) Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat
- c) Layanan Penyediaan Isolat Agens Pengendali Hayati (APH)
- d) Layanan Penyediaan Formulasi APH dan Pupuk Hayati
- e) Layanan Identifikasi OPT dan Rekomendasi Pengelolaan OPT
- f) Layanan Penyediaan Data dan Informasi OPT.

- b. Target tersedianya benih tanaman perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi BBPPTP Surabaya adalah 6 (enam) layanan.

Layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan yang diselenggarakan oleh BBPPTP Surabaya adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitasi sertifikasi benih tanaman perkebunan di wilayah kerja
 - b) Pengujian mutu benih laboratorium
 - c) Pengawasan sumber benih
 - d) Pelaksana uji profisiensi laboratorium perbenihan
 - e) Pengawasan peredaran benih
 - f) Penyiapan sumber benih dan perbanyak benih tanaman perkebunan
- c. Target terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya adalah 3 (tiga) skala likert (1-4).

Selain melaksanakan PK yang telah menjadi kontrak kerja Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan, BBPPTP Surabaya turut serta sebagai pelaksana kegiatan **Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem** sebagai bentuk dukungan pada Program Kerja unit Eselon I Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian.

Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di daerah yang menjadi wilayah kerja BBPPTP Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan berorientasi ekspor berupa kopi, kakao, kelapa, dan jambu mete. Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui kegiatan nurseri dan penangan OPT Perkebunan dengan pestisida nabati.

Perjanjian Kinerja BBPPTP Surabaya tahun 2023 mengalami beberapa kali perubahan pada anggaran, sedangkan Sasaran dan Indikator Kinerja tidak mengalami perubahan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2023

Capaian kinerja organisasi disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pimpinan atas nama organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Dasar penyusunan laporan kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Untuk mengukur capaian kinerja BBPPTP Surabaya tahun 2023, digunakan metode skoring berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 10003/SE/RC.030/A/04/2023 terhadap sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian >100%),
2. Berhasil (capaian 80-100%),
3. Cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan
4. Kurang berhasil (capaian <60%).

Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja BBPPTP Surabaya tahun 2023 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian

Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2023.

Capaian Kinerja BBPPTP Surabaya tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja antara Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 11. Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
1.	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan	1-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6 Layanan	6 Layanan	100 %	Berhasil
2.	Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	2-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi Perbenihan BBPPTP Surabaya	6 Layanan	6 Layanan	100 %	Berhasil
3.	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	3-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	3 Skala likert (1-4)	3,55 Skala likert (1-4)	118 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja BBPPTP Surabaya tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan

Sasaran Kegiatan terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya tercapai 100%. Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengujian mutu Agens Pengendali Hayati (APH)

Pengujian Mutu APH merupakan layanan pengujian mutu untuk Agens Pengendali Hayati dari golongan jamur maupun bakteri. Layanan ini telah terakreditasi pada ISO 17025:2017 sebagai laboratorium penguji APH. Dengan ruang lingkup kerapatan dan viabilitas spora *Beauveria bassiana*, *Metarhizium* sp. dan *Trichoderma* sp. serta antagonisme *Trichoderma* sp.

Pada tahun 2023 laboratorium BBPPTP Surabaya telah menerima dan menyelesaikan pengujian sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) contoh dengan rincian sebanyak 25 (dua puluh lima) contoh *Beauveria bassiana*, 21 (dua puluh satu) contoh *Metarhizium* sp., 29 (dua puluh sembilan) contoh *Trichoderma* sp. dan 3 (tiga) contoh Mikoriza.

PNBP yang diperoleh dari uji mutu APH pada tahun 2023 adalah Rp 4.000.000,-. Layanan uji mutu APH tahun 2023 meningkat 25,80% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 laboratorium BBPPTP Surabaya telah menerima dan menyelesaikan pengujian sebanyak 62 (enam puluh dua) contoh dengan rincian sebanyak 15 (lima belas) contoh *Beauveria bassiana*, 9 (sembilan) contoh *Metarhizium* sp., 19 (sembilan belas) contoh *Trichoderma* sp. 18 (delapan belas) contoh Mikoriza, dan 1 (satu) contoh PGPR. PNBP yang diperoleh dari uji mutu APH pada tahun 2022 adalah Rp. 3.812.500,-.

b. Pengujian formulasi pestisida, residu pestisida dan logam berat

Kegiatan Uji Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat bertujuan untuk menguji kadar bahan aktif pada formulasi pestisida yang beredar, ada tidaknya residu pestisida, cemaran logam berat pada produk perkebunan serta mengawal hasil perkebunan agar memenuhi Batas Minimum pada logam berat dan residu pestisida.

Contoh mutu formulasi pestisida yang diuji diantaranya adalah formulasi pestisida berbahan aktif permetrin, deltametrin, sipermetrin, klorpirifos, diazinon, lamda sihalotrin, dimetoat, karbaril, karbofuran,

imidakloprid, profenofos, klorfenapir, betasiflutrin, abamektin dan alfa sipermetrin. Sedangkan contoh uji residu pestisida dan logam berat disesuaikan dengan komoditas perkebunan yang berada pada kabupaten di wilayah kerja BBPPTP Surabaya.

Kegiatan dilaksanakan dengan pengambilan contoh produk pestisida dan produk perkebunan di wilayah kerja BBPPTP Surabaya yaitu di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Semarang. Seluruh contoh yang diambil dari beberapa Kabupaten di wilayah kerja BBPPTP Surabaya tersebut juga sudah dilaksanakan pengujian dengan menggunakan UPLC/MS/MS atau GC/MS untuk screening dan analisa kuantitatif residu pestisida.

Untuk pengujian formulasi pestisida berbahan aktif deltametrin, sipermetrin, β -siflutrin, permetrin, profenofos, diazinon, λ -sihalotrin, klorfenapir, alfametrin, dimetoat dan klorpirifos menggunakan GC sementara untuk contoh berbahan aktif karbofuran, karbaril, abamektin, dan imidakloprid menggunakan HPLC/UV-Vis. Jumlah keseluruhan contoh monitoring residu pestisida dan logam berat adalah 40 contoh sedangkan jumlah keseluruhan contoh mutu pestisida adalah 31 contoh. Contoh mutu formulasi pestisida yang sesuai batas toleransi sebanyak 19 contoh. Untuk contoh residu pestisida terdapat beberapa contoh yang terdeteksi mengandung residu pestisida yaitu pestisida difenilamin ditemukan pada 2 contoh, glifosat 1 contoh, dan ametrin 4 contoh.

Sedangkan contoh logam berat yang mengandung logam berat kadmium (Cd) ditemukan pada 5 contoh. seluruh hasil uji residu pestisida ini sudah dikirimkan kepada masing-masing Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten tempat monitoring dan pengambilan contoh untuk dapat dijadikan acuan dalam pembinaan kepada petani di wilayahnya.

Selain itu Laboratorium Analisis Pestisida sebagai laboratorium yang sudah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan kode LP-599-IDN dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan sudah ditunjuk sebagai laboratorium pengujian mutu formulasi pestisida dan residu pestisida berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282 Tahun 2023 tentang Lembaga Uji Mutu, Uji Toksisitas, Uji Efikasi dan Uji Residu Pestisida juga memfasilitasi permohonan pengujian mutu formulasi pestisida dan residu pestisida.

Hal ini sejalan dengan pemberian layanan pengujian mutu formulasi pestisida dan residu pestisida yang juga merupakan salah satu tugas dan fungsi BBPPTP Surabaya, serta sebagai sumber pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun jumlah pengguna jasa layanan yang mengajukan permohonan pengujian di Laboratorium Analisis Pestisida selama kurun waktu tahun 2023 adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) permohonan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 62 (enam puluh dua) permohonan. Pengguna jasa layanan ini terdiri dari perorangan, pihak swasta, Perguruan Tinggi maupun dari instansi pemerintah.

Adapun untuk jumlah contoh yang diterima pada tahun 2023 ini sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) contoh, lebih banyak dari jumlah contoh yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) contoh. Semua layanan ini merupakan layanan yang menghasilkan pemasukan untuk PNBP dimana pada tahun 2023 ini total PNBP yang diterima dari layanan pengujian mutu formulasi pestisida dan residu pestisida sebesar Rp 387.750.000,- (meningkat sekitar 4% dari penerimaan PNBP pada tahun 2022 sebesar Rp 325.500.000,-).

c. Layanan penyediaan isolat Agens Pengendali Hayati (APH)

Kegiatan Layanan penyediaan isolat APH dalam pelaksanaannya mencakup dua kegiatan, yaitu Eksplorasi APH dan Pengembangan

isolat unggul agens hayati perkebunan (SIBULAT). Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan eksplorasi APH bertujuan untuk mendapatkan APH yang potensial mengendalikan hama dan penyakit tanaman perkebunan, sedangkan kegiatan pengembangan isolat unggul agens pengendali hayati perkebunan (SIBULAT) bertujuan untuk menjaga kualitas APH melalui uji antagonisme ataupun uji patogenesitas terhadap OPT sasaran.

Penerima layanan pada umumnya adalah mahasiswa, petani, pihak swasta dan instansi pemerintah. APH yang dikembangkan pada layanan ini adalah, *Trichoderma* sp., *Beauveria bassiana*, *Metarhizium* sp, *Pseudomoas fluorescens*, *Bacillus* sp., *Serratia* sp., *Paenibacillus polymixa*, *Gliocladium* sp., *Sclerotium* sp., Adapun jumlah pengguna jasa layanan Sibulat selama kurun waktu tahun 2023 adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pengguna jasa layanan dengan jumlah isolat yang dikeluarkan sebanyak 1.101 (seribu seratus satu) isolat. Total PNBP yang diterima layanan penyediaan isolat APH sebesar Rp 38.535.000,-. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah pengguna jasa layanan sebanyak 46 (empat puluh enam) pengguna jasa layanan dengan jumlah isolat yang dikeluarkan sebanyak 211 (dua ratus sebelas) isolat. Total PNBP yang diterima dari layanan penyediaan isolat APH sebesar Rp 7.385.000,-. Ada peningkatan sebanyak 890 isolat dari tahun 2022 ke tahun 2023, sehingga terjadi peningkatan juga pada PNBP yang diterima yaitu sebesar Rp 31.150.000,-.

Peningkatan pada tahun 2023 disebabkan pengguna layanan penyediaan isolat APH dari pihak swasta dan instansi pemerintah yang membutuhkan isolat dalam jumlah yang banyak, jika dibandingkan pengguna layanan penyediaan APH dari pihak mahasiswa atau dari petani, baik petani perkebunan maupun petani pangan.

d. Layanan penyediaan formulasi APH dan pupuk hayati

Layanan Produk Formulasi (LADUFOR) terdiri dari layanan Produk *Nematoda Entomopatogen*, Virus SINPV, *Pias Trichogramma* sp. dan pupuk hayati mikoriza.

Tujuan dari layanan ini adalah untuk menyediakan produk APH siap aplikasi yang langsung dapat digunakan oleh pengguna jasa. Pada tahun 2023, layanan LADUFOR baru tercatat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada kementerian Pertanian yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2023.

Total *Nematoda Entomopatogen* yang telah diproduksi Laboratorium BBPPTP Surabaya pada tahun 2023 sebanyak 240 spon. Sebelum diatur dalam Peraturan tersebut produksi NEP digunakan sebagai bahan kegiatan rutin BBPPTP Surabaya antara lain untuk bahan aplikasi Kegiatan Demplot dan mendukung layanan SINANDA.

Setelah Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBPN diberlakukan, layanan Ladufor NEP melayani 2 pelanggan pada bulan November 2023 yaitu Bapak Sukri dari Puncu Kediri sebanyak 20 spon dan Bapak Sutrisno dari Plosoklaten Kediri sebanyak 10 spon. NEP dimanfaatkan petani untuk pengendalian uret tebu *Lepidiotia stigma*. Karena *L. stigma* merupakan salah satu OPT pada tanaman tebu yang sangat merugikan. PNBPN yang diperoleh dari layanan NEP pada tahun 2023 ini sebesar Rp 600.000,-.

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Parasitoid *Trichogramma* sp. adalah mengembangkan/menyediakan pias APH *Trichogramma* sp. untuk mengendalikan penggerek pucuk dan batang tebu serta membantu petani dalam penyediaan APH *Trichogramma* sp.

Konsumen yang membutuhkan pias *Trichogramma* sp. selama kurun waktu tahun 2023 berasal dari petani, Intansi Pemerintah dan

Perguruan Tinggi. APH *Trichogramma* sp. pada tahun 2023 ini belum memberikan PNBP ke negara karena pada tahun ini semua produk diberikan secara gratis kepada pengguna layanan.

Pada tahun 2023 total Virus SINPV yang telah diproduksi Laboratorium BBPPTP Surabaya pada sebanyak 30 (tiga puluh) pcs. Sebelum diatur dalam peraturan terkait dengan penerimaan PNBP, produksi SINPV digunakan sebagai bahan kegiatan rutin BBPPTP Surabaya antara lain untuk bahan magang mahasiswa dan diberikan ke petani pada saat melakukan kunjungan ke BBPPTP Surabaya atau pada saat pertemuan dengan petani di lapang.

Setelah Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBP diberlakukan, layanan Ladufor SINPV melayani 1 pelanggan Perguruan Tinggi sebanyak 200 gram virus SINPV yang nantinya dimanfaatkan mahasiswa untuk pengujian pengendalian hama ulat grayak di Laboratorium. PNBP yang diperoleh dari layanan SINPV pada tahun 2023 sebesar Rp 240.000,-.

Sementara untuk Pupuk hayati mikoriza diproduksi di greenhouse BBPPTP Surabaya menggunakan media pembawa pasir zeolite. Setiap bulan dilakukan diusahakan terdapat stok produksi minimal 10 kg dengan masa kadaluarsa 1 tahun sejak dipanen. Stok tersedia di laboratorium sepanjang tahun 2023 sebanyak 55 kg.

Pelayanan pada tahun 2023 diberikan kepada petani di Kabupaten Probolinggo sebanyak 10 kg dan mahasiswa yang membutuhkan starter untuk penelitian. Pupuk hayati mikoriza pada tahun 2023 ini belum memberikan PNBP ke negara karena pada tahun ini semua produk diberikan secara gratis kepada pengguna layanan.

e. Layanan identifikasi OPT dan rekomendasi pengendalian OPT

Layanan identifikasi OPT dan rekomendasi pengendalian OPT dilaksanakan melalui kegiatan Sistem Layanan Dokter Tanaman (SINANDA) oleh POPT pada BBPPTP Surabaya.

Pelayanan Rutin yang dilakukan Dokter Tanaman SINANDA terdiri dari:

1) Pemberian Informasi OPT/ Konsultasi

Pada tahun 2023, beberapa layanan konsultasi diberikan pada pengguna jasa yang datang langsung ke BBPPTP Surabaya atau pada saat Dokter Tanaman hadir ke lokasi layanan/lapang. Telah dilaksanakan pelayanan teknis berupa konsultasi/Informasi OPT sebanyak 32 (tiga puluh dua) layanan kepada pengguna jasa yang terdiri dari:

Tabel 12. Pengguna Jasa Layanan Informasi POPT/Konsultasi Tahun 2023

No.	Pengguna Jasa Layanan	Jumlah
1.	Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura	4 orang
2.	Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	1 orang
3.	Mahasiswa dari UPN Surabaya	1 orang
4.	Mahasiswa dari Univ Muhamadiyah Malang	1 orang
5.	Mahasiswa dari ITS Surabaya	2 orang
6.	Mahasiswa dari UIN Malik Ibrahim Malang,	6 orang
7.	Petani kabupaten Bojonegoro	5 orang
8.	Petani dari Kabupaten Mojokerto	1 orang
9.	Petani dari Kab Jombang	1 orang
10.	Petani dari Kab Kediri	3 orang
11.	CV. Bromo Indah Lestari Pasuruan	1 orang
12.	Petani dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur	2 orang
13.	Petugas lapang dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	4 orang



Gambar 2. Pengguna Jasa Layanan Informasi POPT/Konsultasi Tahun 2023



Gambar 3. Bimbingan lapang petani Kabupaten Berau



Gambar 4. Layanan Dokter Tanaman pada petugas lapang Dinas Pertanian Gresik

2) Pemberian Layanan Rekomendasi dan Saran Pengendalian OPT

Layanan Rekomendasi dan Saran Pengendalian OPT diberikan pada saat Dokter Tanaman memberikan layanan/bimbingan teknis ke lapang pada *stakeholders* yang membutuhkan. Sebanyak 14 (empat belas) Pelayanan Teknis ke lapang telah dilakukan Dokter Tanaman antara lain ke Kabupaten Kediri, Bojonegoro, Mojokerto Pasuruan dan Lumajang. Pelayanan teknis SINANDA yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a) **Pelayanan Teknis ke Kabupaten Kediri**, dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023 dan 6 Juni 2023. Pelayanan teknis diberikan pada Poktan Tani Lestari Desa Sumber Agung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini Dokter Tanaman memberikan bimbingan teknis terkait rekomendasi dan saran Pengendalian OPT tanaman tebu.
- b) **Pelayanan Teknis ke Kabupaten Bojonegoro**, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Pelayanan teknis diberikan pada Poktan Sumber Rejeki Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Juli 2023 di Poktan Karya Tani Desa Sugihwaras Kecamatan Kepuhbaru Kab Bojonegoro dan tanggal 21 Agustus 2023 di Poktan Subur Makmur Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan ini Dokter Tanaman memberikan bimbingan teknis terkait rekomendasi dan saran pengendalian OPT tanaman tembakau.
- c) **Pelayanan Teknis ke Kabupaten Mojokerto**, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Pelayanan teknis diberikan pada Poktan Pandanarum Jetis Mojokerto. Pada kesempatan ini Dokter Tanaman memberikan bimbingan teknis terkait rekomendasi dan saran pengendalian OPT tanaman tembakau.
- d) **Pelayanan Teknis ke Kabupaten Kediri** dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023, 5 September 2023 dan 22 Desember 2023. Pelayanan teknis diberikan pada Poktan Tani Makmur Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini Dokter Tanaman memberikan bimbingan teknis terkait rekomendasi dan saran pengendalian OPT tanaman tebu.
- e) **Pelayanan Teknis ke Kabupaten Kediri** dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023. Pelayanan teknis diberikan pada

Poktan Tani Lestari Desa Sumberagung Plosoklaten Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini Dokter Tanaman memberikan bimbingan teknis terkait rekomendasi dan saran pengendalian uret pada tanaman tebu.

- f) **Pelayanan Teknis ke Kabupaten Pasuruan** dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023, 9 November 2023 dan 28 Desember 2023 di Poktan Sumber Makmur Desa Tambaksari Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini Dokter Tanaman memberikan bimbingan teknis terkait rekomendasi dan saran pengendalian OPT pada tanaman kopi.
- g) **Pelayanan Teknis ke Kabupaten Lumajang** dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 di Poktan Sekarmaju II Desa Pasrujambe Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini Dokter Tanaman memberikan bimbingan teknis terkait rekomendasi dan saran pengendalian OPT pada tanaman kopi.



Gambar 5. Pelayanan Teknis Poktan Tani Lestari Desa Sumberagung Plosoklaten Kab Kediri



Gambar 6. Layanan Dokter Tanaman Pada Poktan Subur Makmur Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro



Gambar 7. Pelayanan Teknis Poktan Tani Makmujur Pranggang Plosoklaten Kabupaten Kediri dan Pelayanan Teknis Pengendalian OPT Kopi di Pasrujambé Kabupaten Lumajang

f. Layanan penyediaan dan informasi OPT

Aplikasi SIM OPT perkebunan merupakan layanan BBPPTP Surabaya berbasis web yang menyediakan data dan informasi serangan OPT di wilayah kerja BBPPTP Surabaya, meliputi data terkini, data masa lampau dan data ramalan ke depan, yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan peta. Data dan informasi tersebut dapat diakses secara online melalui laman <https://simopt-bbpptp-surabaya.net>.

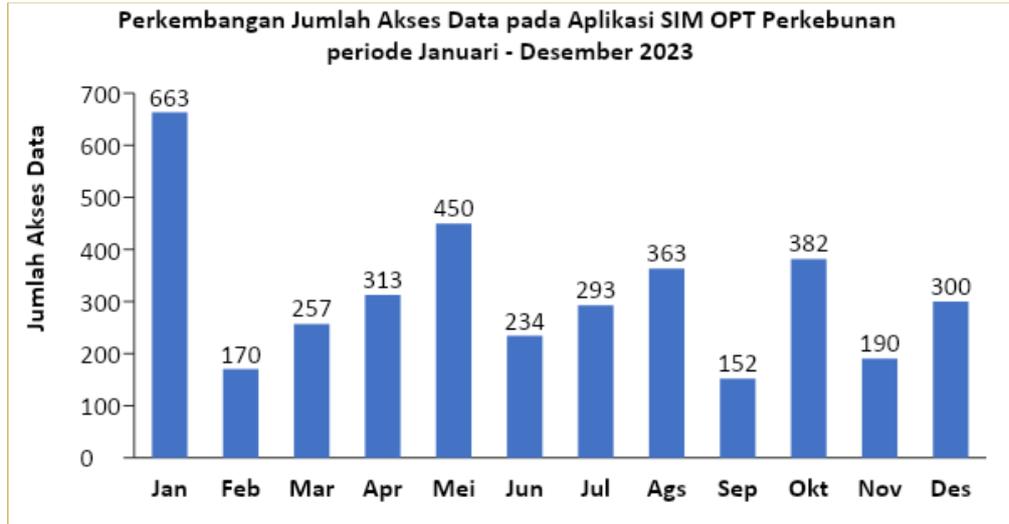
Adapun spesifikasi data yang disediakan pada SIM OPT perkebunan, yaitu:

- 1) Data diperoleh dari laporan hasil pengamatan serangan OPT di tingkat kabupaten dan provinsi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya;
- 2) Data tersedia mulai tahun 2016 – sekarang, berupa data triwulanan dan data bulanan;
- 3) Data triwulanan meliputi 8 (delapan) provinsi yang ada di wilayah kerja BBPPTP Surabaya (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT), sedangkan data bulanan meliputi 29 (dua puluh Sembilan) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sepanjang tahun 2023, total ada 29 (dua puluh Sembilan) kali permohonan data dan informasi serangan OPT melalui aplikasi SIM OPT perkebunan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 29 (dua puluh Sembilan) pengguna baru yang mendaftar pada aplikasi dan telah diaktivasi oleh tim admin SIM OPT perkebunan.

Pengguna jasa pada umumnya merupakan pegawai dari sejumlah instansi pemerintah dan sebagian dari kalangan akademisi (dosen/mahasiswa). Hanya sebagian kecil pengguna yang dari kalangan peneliti dan swasta.

Sementara itu, berdasarkan data statistik kunjungan (akses data), diketahui bahwa rata-rata banyaknya data yang diakses pada aplikasi SIM OPT perkebunan sekitar 314 (tiga ratus empat belas) akses data per bulan. Catatan akses data tertinggi terjadi pada bulan Januari 2023 yang mencapai angka 663 (enam ratus tiga puluh tiga) akses data. Sedangkan akses data paling rendah terjadi pada bulan September 2023, yakni hanya mencapai 152 (seratus lima puluh dua) akses data.



Grafik 1. Perkembangan Jumlah Akses Data pada Aplikasi SIM OPT Perkebunan periode Januari - Desember 2023

Aplikasi SIM OPT Perkebunan sejak tahun 2017 telah mengikuti ISO 9001:2015. Adapun hasil audit surveilan pada akhir November 2023 lalu, layanan aplikasi SIM OPT perkebunan mendapat hasil yang sangat memuaskan, tidak ada satupun temuan dari tim auditor. Hal ini tak lepas dari target sasaran mutu yang ditetapkan dapat tercapai sepanjang tahun 2023, yakni terkait *updating* data serangan OPT dan kecepatan dalam proses pelayanannya.

Pada tahun 2023 ini aplikasi SIM OPT Perkebunan juga telah dimasukkan ke dalam arsitektur SPBE Kementerian Pertanian, sehingga dapat dilakukan proses pengajuan *clearance*. Harapannya, setelah melalui proses *clearance* nantinya, kegiatan pengembangan/penyempurnaan aplikasi SIM OPT perkebunan pada masa mendatang dapat diajukan dan dilaksanakan.

2. Sasaran Kegiatan tersedianya benih tanaman perkebunan

Sasaran Kegiatan tersedianya benih tanaman perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya tercapai 100%. jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fasilitas sertifikasi benih tanaman perkebunan di wilayah kerja

Sertifikasi benih tanaman perkebunan Rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat Mutu Benih terhadap benih yg dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan sehingga memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Tujuan sertifikasi adalah (a) Menjaga kemurnian varietas; (b) Memelihara mutu benih; (c) Memberikan jaminan kepada pengguna benih; dan (d) Memberikan legalitas kepada produsen benih.



Gambar 8. Kegiatan Sertifikasi Kelapa Dalam siap salur (Polybag) dan Sertifikasi Cengkeh asal biji siap salur (Polybag)

Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Produsen Benih/ Pelaku usaha yang diajukan ke BBPPTP Surabaya selama tahun 2023. Produsen yang mengajukan sertifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia Jember Jawa Timur;
2. CV. Joyo Rosan, Kediri, Jawa Timur;
3. Asosiasi Petani Pribumi Nusantara, Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
4. CV. Budi Jaya Sejati, Jember, Jawa Timur;
5. CV. Indonesia Hijau, Jember, Jawa Timur
6. PT. Kebon Agung, PG. Trangkil, Pati, Jawa Tengah;
7. CV. Lang Buana, Blitar, Jawa Timur;
8. PT. Benih Bumi Batara, Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
9. Pusat Standarisasi Instrumen Pertanian, Bogor;

10. CV. Aulia Indoraya, Makassar;
11. CV. Khamal Sakti, Surabaya;
12. CV. Wahana Multi Cipta, Sulawesi Selatan;
13. Penangkar Benih Hijau Lestari, Enrekang;
14. Penangkar Bibit Buntu Pasale, Tana Toraja;
15. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan;
16. Balai Pegujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat (BPSI TAS) Malang;
17. CV. Puri Indah, Kediri;
18. CV. Joyo Rosan, Kediri.

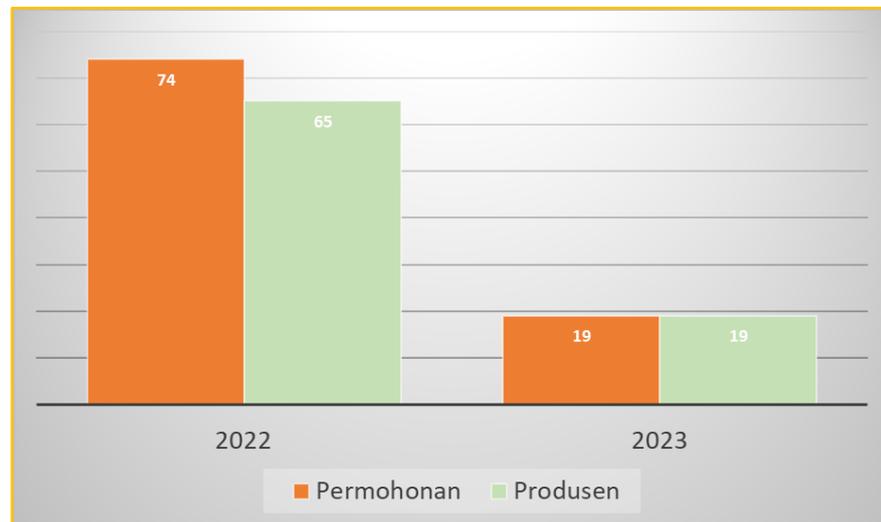
Komoditas yang disertifikasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Komoditas Sertifikasi Benih Tahun 2023

Jumlah permohonan sertifikasi selama tahun 2023 adalah sejumlah 65 permohonan dari 19 podusen/penangkar. Sertifikat yang telah terbit sejumlah **462 Sertifikat Mutu Benih**. Jika dibanding tahun 2022 jumlah permohonan berkurang dari semula 74 permohonan menjadi 65 permohonan. Penurunan ini terjadi karena terbitnya Peraturan Menteri

Pertanian yang mengatur bahwa sertifikasi di wilayah dapat dilakukan oleh UPTD setempat. Adapun perbandingan jumlah permohonan sertifikasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:



Grafik 2. Data Sertifikasi Tahun 2022 dan 2023

Pada Tahun 2023 target pemeriksaan lapang sejumlah 11.159.600 batang. Pada tahun 2023 sertifikasi benih tanaman perkebunan diperoleh hasil sejumlah **11.829.002 batang diperiksa**. Sehingga persentase pencapaian kegiatan sertifikasi pada Tahun 2023 adalah 106 %.

b. Pengawasan sumber benih

Kegiatan Pengawasan Kebun Sumber Benih merupakan rangkaian kegiatan penerbitan Surat Keterangan Kelayakan terhadap kebun benih sumber melalui pemeriksaan lapangan sehingga memenuhi semua persyaratan untuk digunakan atau diedarkan.

Kebun-kebun benih sumber yang mempunyai peran sangat penting untuk menjamin mutu benih yang akan diedarkan kepada pengguna/konsumen, sehingga pengawasan terhadap kebun-kebun benih sumber harus dilakukan secara periodik.

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui tingkat kemurnian varietas yang ditanam sesuai SK penetapan kebun sumber benih.
- 2) Mengetahui tingkat pemeliharaan kebun sumber benih terhadap tanaman induk, tanaman penaung dan lingkungan sekitar kebun.
- 3) Mengetahui tingkat penyerapan teknologi dalam produksi benih *on farm* dan *off farm*.
- 4) Mengetahui potensi produksi kebun sumber benih.
- 5) Menentukan tingkat kelayakan kebun sumber benih sebagai dasar untuk perbaikan kebun sumber benih.
- 6) Memberikan pembinaan terhadap kebun sumber benih pada kegiatan *on farm* sampai *off farm*.
- 7) Memberikan rekomendasi ke Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan untuk meninjau kembali SK Penetapan Kebun benih sumber untuk kebun sumber benih yang berdasarkan hasil pemeriksaan sudah tidak layak sebagai sumber benih.
- 8) Memberikan legalitas terhadap mutu benih melalui penerbitan sertifikat atau surat keterangan mutu benih sumber.

Selama Tahun 2023, Pengawasan kebun sumber benih dilaksanakan di 6 (enam) sumber benih, yaitu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dengan komoditas Kopi dan Kakao, PT. Hasfarm Sukokulon dengan komoditas Kakao, PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kendeng Lembu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan komoditas Kopi dan Kakao, Dinas Pertanian Kabupaten Pati dengan komoditas Kelapa Genjah Kopyor dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dengan komoditas Kelapa Genjah Entog dan Kelapa Dalam Unggul Lokal.

Dari hasil pengawasan sumber benih dapat diketahui potensi produksi benih yang dapat disediakan oleh masing-masing sumber benih sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
Potensi produksi benih kopi sejumlah 30.294.354 butir, benih kakao sejumlah 1.250.903 butir, entres kopi sejumlah 622.600 entres dan entres kakao sejumlah 1.310.031 entres. Dibandingkan tahun 2022, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia mengalami penurunan potensi produksi benih kopi dalam bentuk butiran sebesar 22,18% dikarenakan faktor lingkungan (cuaca ekstrim) dan juga fenomena biennial bearing dan entres kopi sebesar 66,46% dikarenakan penyulaman sehingga pohon tidak diperiksa. Potensi produksi benih kakao menurun sebanyak 29,84% dikarenakan ada kebun yang belum layak akibat adanya campuran varietas lain dan potensi produksi entres kakao juga mengalami penurunan sebanyak 14,52% dikarenakan faktor lingkungan (cuaca ekstrim).
2. PT. Hasfarm Sukokulon
Potensi produksi benih kakao sejumlah 1.128.262 butir. Dibandingkan tahun 2022, PT. Hasfarm Sukokulon mengalami peningkatan potensi produksi benih kakao sebanyak 65,02%.
3. PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kendeng Lembu
Tidak ada potensi produksi entres kakao dikarenakan kebun tidak layak sebagai sumber entres kakao.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
Potensi produksi benih kopi sejumlah 808.374 butir, entres kopi sejumlah 40.496 entres dan pada entres kakao tidak ada potensi produksi benih karena kebun masih belum memenuhi syarat. Dibandingkan tahun 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengalami penurunan potensi produksi benih kopi sebesar 90% dikarenakan ada kebun yang tidak layak dan penurunan potensi entres kopi sebanyak 67,41% dikarenakan

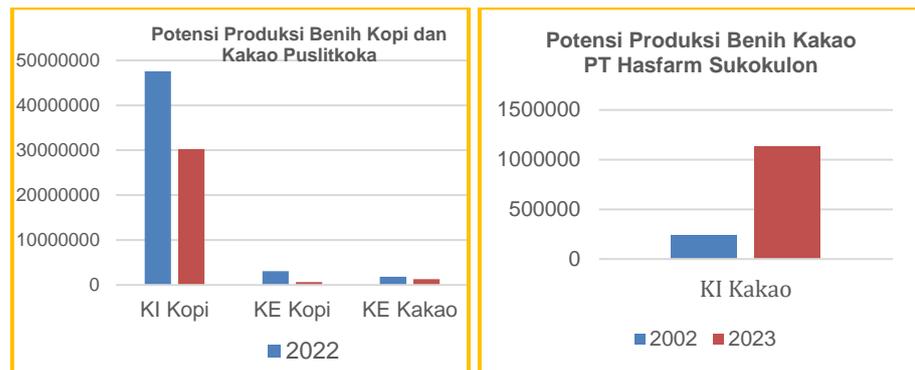
peremajaan tanaman sedangkan potensi produksi entres kakao tidak dilaksanakan taksasi karena kebun memerlukan perbaikan.

5. Dinas Pertanian Kabupaten Pati

Potensi produksi benih Kelapa Genjah Kopyor sejumlah 67.174 butir. Pengawasan kebun sumber benih ini adalah kegiatan yang baru dilakukan pada tahun 2023.

6. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Potensi produksi benih Kelapa Genjah Entog Kebumen sejumlah 83.969 butir dan benih Kelapa Dalam Unggul Lokal sejumlah 165.863 butir. Pengawasan kebun sumber benih ini adalah kegiatan yang baru dilakukan pada tahun 2023.



Grafik 3. Grafik Potensi Produksi Kopi dan Kakao Puslitkoka dan Grafik Potensi Produksi Benih Kakao PT. Hasfarm Sukokolun



Grafik 4. Grafik Potensi Benih Kopi dan Kakao Bali dan Grafik Potensi Produksi Benih Kelapa Provinsi Jawa Tengah



Gambar 10. Kegiatan Monev Sumber Benih Entres Mikro Kopi



Gambar 11. Kegiatan Monev Sumber Benih Entres Mikro Kopi dan Monev Benih Sumber Kopi (Arabika)



Gambar 12. Kegiatan Monev Sumber Benih Entres Mikro Kakao dan Monev Sumber Benih Kakao



Gambar 13. Kegiatan Monev Benih Sumber Kakao



Gambar 14. Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Monev BPT/PIT Kelapa dan Monev Benih BPT/PIT Kelapa Genjah Entog Kebumen

c. Pengawasan peredaran benih

Kegiatan perlindungan pada distribusi penyebaran benih dapat dilakukan dengan kegiatan pengawasan peredaran benih. Kegiatan pengawasan peredaran benih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian bahwa benih yang beredar di pasaran sampai di tingkat pekebun ataupun konsumen masih terjaga mutu benihnya, sebagaimana yang tercantum pada label ataupun dokumen benih lain yang menyertainya. Selain itu, pengawasan peredaran juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemalsuan benih dan diperdagangkannya benih-benih yang masa berlakunya sudah kadaluarsa.

Dengan adanya pengawasan peredaran benih maka diharapkan produsen benih dapat memproduksi benihnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perbenihan tanaman, khususnya tanaman perkebunan. Pada sisi lain, kegiatan pengawasan peredaran benih ini dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya atau menekan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan dan peredaran benih, dengan demikian diharapkan konsumen benih dapat memperoleh benih unggul bermutu yang berasal dari sumber benih resmi yang telah ditetapkan Pemerintah (legal).

Tujuan kegiatan pengawasan peredaran benih di wilayah kerja yaitu:

- 1) Meminimalisir peredaran benih ilegal/ tidak bersertifikat yang dapat merugikan konsumen benih;
- 2) Menjaga mutu benih yang beredar lintas Provinsi pada wilayah kerja BBPPTP Surabaya;
- 3) Mengetahui kesesuaian antara jumlah benih bina yang diproduksi dengan yang beredar lintas Provinsi, pada wilayah kerja BBPPTP Surabaya;
- 4) Mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran benih yang dilakukan UPTD/Dinas Perkebunan yang menangani bidang perbenihan pada wilayah kerja BBPPTP Surabaya.

Sedangkan sasaran dari kegiatan pengawasan peredaran benih di wilayah kerja adalah:

- 1) Produsen benih (sumber benih, pembenih, penangkar benih, pengedar benih) di wilayah kerja BBPPTP Surabaya yang produksinya beredar lintas Provinsi;
- 2) UPTD/Dinas Provinsi yang membidangi perbenihan yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Ruang lingkup kegiatan Pengawasan Peredaran Benih meliputi kegiatan pengawasan peredaran benih oleh produsen dan pengawasan peredaran benih lintas provinsi.

1) Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih Secara Berkala

a. Pengawasan Peredaran Benih di Produsen Benih

(1) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

Pada tahun 2023 Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia menyalurkan benih kopi dan kakao dalam bentuk Kopi Robusta Stek dalam Polibag, Kopi Robusta Stek Berakar di Persemaian, Kopi Robusta seedling, Kopi Arabika Seedling, Kopi Asal Biji di Persemaian, Entres Kopi, Kopi Liberika, Kakao Sambung, Kakao Seedling dan Kakao Plagiotrop.

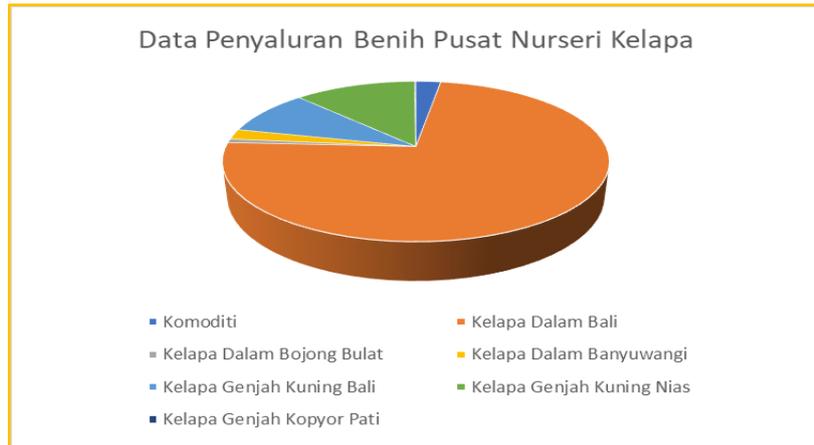


Grafik 5. Data Penyaluran Benih Puslitkoka

Benih Kopi Asal Biji di Persemaian disalurkan paling banyak yaitu sejumlah 689.546 batang. Total penyaluran benih kopi dan kakao dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia sejumlah 1.778.749 batang.

(2) Pusat Nurseri Kelapa Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2023 di Pusat Nurseri Kelapa Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan Benih Kelapa Dalam Bojong Bulat, Kelapa Dalam Bali, Kelapa Dalam Banyuwangi, Kelapa Genjah Kuning Bali, Kelapa Genjah Kuning Nias dan Kelapa Genjah Kopyor Pati sejumlah 79.609 batang.



Grafik 6. Data Penyaluran Benih Pusat Nurseri Kelapa
Data Penyaluran Benih Pusat Nurseri Kelapa

Jenis kelapa dalam bali adalah benih yang paling banyak disalurkan yaitu sejumlah 59.882 batang. Lokasi penyaluran benih dari Pusat Nurseri Kelapa adalah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

(3) Dinas Pertanian Kabupaten Pati

Data penyaluran benih yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Data Penyaluran Benih Dinas Pertanian Kabupaten Pati

No.	Komoditi	Varietas/ Klon	Bentuk Benih	Jumlah Dikirim	Wilayah Penyaluran
1.	Kelapa (Polibag)	Genjah Kuning Kopyor	Batang	8	Pati (Jateng)
2.	Kelapa (Polibag)	Genjah Hijau Kopyor	Batang	59	Pati (Jateng)
3.	Kelapa (Polibag)	Genjah Coklat Kopyor	Batang	24	Pati (Jateng)
Jumlah			91 Batang		

Benih Kelapa yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pati adalah benih hasil Kultur Jaringan. Pada tahun 2023 telah berhasil memproduksi benih kelapa hasil kultur jaringan sejumlah 91 batang dan digunakan oleh Kabupaten Pati sendiri.

(4) CV. Lang Buana

Data penyaluran benih yang diperoleh dari CV. Lang Buana di Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Data Penyaluran Benih CV. Lang Buana di Blitar

No.	Komoditi	Varietas/ Klon	Bentuk Benih	Jumlah Dikirim	Wilayah Penyaluran
1.	Vanili	Alor	Batang	4.663	Kalimantan Timur
2.	Kelapa	Kelapa Dalam Banyuwangi	Batang	5.537	
Jumlah			4.663 Batang		

Pada Tahun 2023 CV lang Buana memproduksi Benih Vanili sejumlah 4.663 dan Benih Kelapa sejumlah 5.537 batang.

(5) CV. Budi Jaya Sejati

Data penyaluran benih yang diperoleh dari CV. Budi Jaya Sejati di Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Data Penyaluran Benih CV. Budi Jaya Sejati di Jember

No.	Komoditi	Varietas/ Klon	Bentuk Benih	Jumlah Dikirim	Wilayah Penyaluran
1.	Kelapa (Polibeg)	Genjah Raja	Batang	11.276	Sumatera Selatan
2.	Kelapa (Polibeg)	Genjah Kuning Nias	Batang	11.288	Sumatera Selatan
3.	Kopi Arabika Seedling	Sigarar Utang	Batang	553.569	Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur
Jumlah			576.133 Batang		

CV Budijaya Sejati menyalurkan benih sejumlah 576.133 batang dan disalurkan di daerah Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

(6) CV. Indonesia Hijau

Data penyaluran benih yang diperoleh dari CV. Indonesia Hijau di Jember adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2023, CV. Indonesia Hijau menyalurkan 3 benih komoditi yaitu Kopi, Kelapa dan Jambu Mete sejumlah 1.424.074 batang. Jenis yang paling banyak disalurkan adalah Kopi Robusta seedling sejumlah 556.111 batang.



Tabel 16. Data Penyaluran Benih CV Indonesia Hijau

Adapun area penyaluran 3 komoditi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.

(7) CV. Aulia Indoraya

Data penyaluran benih yang diperoleh dari CV. Aulia Indoraya di Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Data Penyaluran Benih CV. Aulia Indoraya di Makassar

No.	Komoditi	Varietas/ Klon	Bentuk Benih	Jumlah Dikirim	Wilayah Penyaluran
1.	Cengkih	Zanzibar Gorontalo	Batang	10.655	Sulawesi Selatan
2.	Pala	Ternate 1	Batang	125.832	Sulawesi Selatan
3.	Kakao Sambung	Batang atas: Sulawesi 2 Batang bawah: ICCRI 08 H	Batang	170.717	Sulawesi Selatan
4.	Kopi Arabika Seedling	Sigarar Utang	Batang	102.707	Sulawesi Utara
5.	Kopi Arabika Seedling	S 795	Batang	261.242	Sulawesi Selatan
Jumlah			671.153 Batang		

Pada Tahun 2023, CV. Aulia Indoraya menyalurkan benih Cengkeh, Pala, Kakao dan Kopi sejumlah 671.153 batang. Adapun benih yang paling banyak disalurkan adalah benih kopi Arabika Seedling sejumlah 363.949 batang.

(8) CV. Wahana Multi Cipta

Data penyaluran benih yang diperoleh dari CV. Wahana Multi Cipta di Kolaka adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Data Penyaluran Benih CV. Wahana Multi Cipta di Kolaka

No.	Komoditi	Varietas/ Klon	Bentuk Benih	Jumlah Dikirim	Wilayah Penyaluran
1.	Kakao Sambung	Batang atas: MCC 02 Batang bawah: ICCRI 08 H	Batang	533.616	Sulawesi Selatan
2.	Kakao Sambung	Batang atas: MCC 02 Batang bawah: ICCRI 06 H	Batang	304.517	Sulawesi Selatan
Jumlah			838.133 Batang		

CV Wahana Mukti hanya menyalurkan benih Kakao Sambung sejumlah 838.133 batang yang disalurkan di Sulawesi Selatan.

(9) Asosiasi Petani Pribumi

Data penyaluran benih yang diperoleh dari Asosiasi Petani Pribumi di Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Data Penyaluran Benih Asosiasi Petani Pribumi di Luwu Timur

No.	Komoditi	Varietas/ Klon	Bentuk Benih	Jumlah Dikirim	Wilayah Penyaluran
1.	Kakao Entres	MCC 02	Entres	145.317	Luwu Timur
2.	Kakao Entres	Sulawesi 02	Entres	33.300	Luwu Timur
Jumlah			178.617 Batang		

Pada tahun 2023 Asosiasi Petani Pribumi menyalurkan benih entres kakao sejumlah 178.617 batang untuk Kabupaten Luwu Timur.

(10) Penangkar Benih Hijau Lestari

Data penyaluran benih yang diperoleh dari Penangkar Benih Hijau Lestari di Enrekang adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Data Penyaluran Benih Penangkar Benih Hijau Lestari di Enrekang

No.	Komoditi	Varietas/ Klon	Bentuk Benih	Jumlah Dikirim	Wilayah Penyaluran
1.	Kopi Arabika Seeding	Sigarar Utang	Batang	44.305	Enrekang (Sulawesi Selatan)
Jumlah			44.305 Batang		

Pada Tahun 2023, Penangkar Benih Hijau Lestari menyalurkan benih kopi arabika seedling sejumlah 44.305 batang untuk kabupaten Enrekang.

(11) PT. Benih Bumi Batara

Data penyaluran benih yang diperoleh dari PT. Benih Bumi Batara di Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Penyaluran Benih PT. Benih Bumi Batara di Luwu Timur

No.	Komoditi	Varietas/ Klon	Bentuk Benih	Jumlah Dikirim	Wilayah Penyaluran
1.	Kelapa Sawit	D x P Simalungun	Batang	40.254	Luwu Timur (Sulawesi Selatan)
Jumlah			40.254 Batang		

Benih yang disalurkan oleh PT Benih Bumi Batara adalah Benih Kelapa Sawit sejumlah 40.254 batang dan disalurkan ke Luwu Timur.

(12) Penangkar Bibit Buntu Pasele

Data penyaluran benih yang diperoleh dari Penangkar Bibit Buntu Pasele di Tana Toraja adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Data Penyaluran Benih Penangkar Bibit Buntu Pasele di Tana Toraja

No.	Komoditi	Varietas/ Klon	Bentuk Benih	Jumlah Dikirim	Wilayah Penyaluran
1.	Kopi Arabika Seedling	S 795	Batang	51.140	Sulawesi Selatan
Jumlah			51.140 Batang		

Penangkar Benih Buntu Pasele menyalurkan benih kopi Arabika Seedling sejumlah 51.140 batang untuk Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Pengawasan Peredaran Benih di Wilayah Kerja

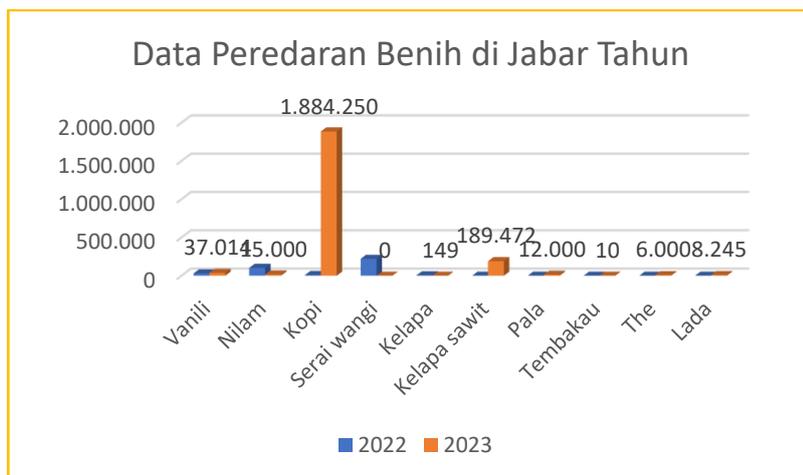
(1) Provinsi Jawa Barat

Kegiatan peredaran dilakukan terhadap setiap benih tanaman perkebunan yang masuk dan keluar dari Provinsi Jawa Barat. Dari hasil kegiatan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 23. Data Peredaran Benih yang Masuk di Wilayah Provinsi Jawa Barat

No.	Komoditas /Varietas	Bentuk Benih	Asal Wilayah Benih	Jumlah	Lokasi Penyaluran
1.	Kopi Arabika/S795	Batang	BRIN Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan, Bogor	125.000	CV. Reka Karya Mandiri, Bandung
Jumlah				125.000 Batang	

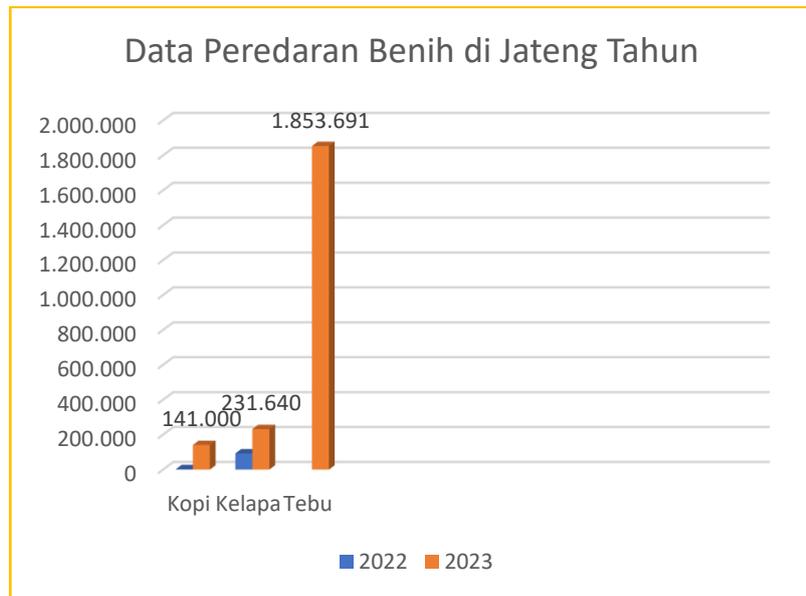
Pada tahun 2023 terdapat 10 komoditi yang diawasi di Jawa Barat yaitu komoditi Vanili, Nilam, Kopi, Kelapa, Kelapa Sawit, Pala, Tembakau, Teh dan Lada sejumlah 2.154.153 batang dan 10 gram tembakau, dibanding tahun 2022 hanya sejumlah 5 komoditi sejumlah 365.527 batang.



Grafik 7. Data Peredaran Benih di Jawa Barat Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat 10 komoditi yang diawasi di Jawa Barat yaitu komoditi Vanili, Nilam, Kopi, Kelapa, Kelapa Sawit, Pala, Tembakau, Teh dan Lada sejumlah 2.154.153 batang dan 10 gram tembakau, dibanding tahun 2022 hanya sejumlah 5 komoditi sejumlah 365.527 batang.

(2) Provinsi Jawa Tengah

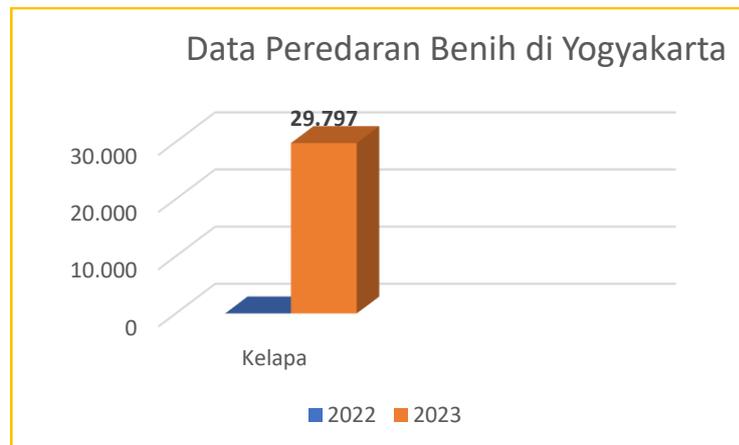


Grafik 8. Data Peredaran Benih di Jawa Barat

Pada tahun 2023 terdapat 3 komoditi yang diawasi di Jawa Tengah yaitu komoditi Kopi, Kelapa dan Tebu sejumlah 2.228.354 batang dibanding tahun 2022 hanya sejumlah 2 komoditas sejumlah 94.670 batang.

(3) Provinsi D.I. Yogyakarta

Hasil pengawasan peredaran benih di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

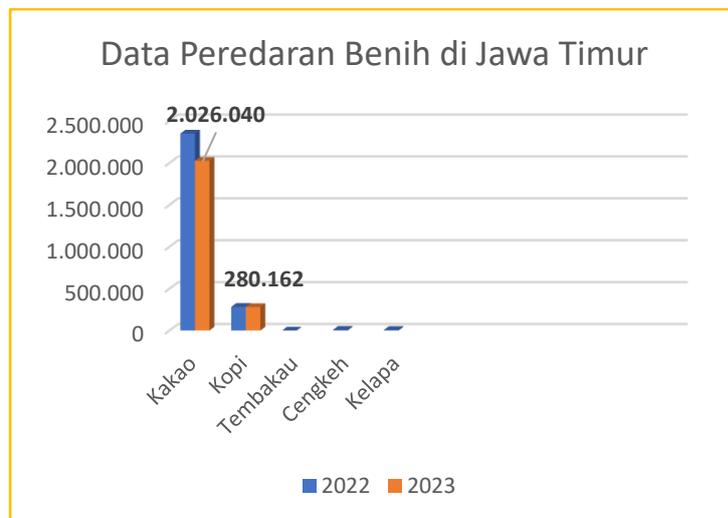


Grafik 9. Data Peredaran Benih di Yogyakarta

Pada Tahun 2023 terdapat peningkatan dengan adanya data pengawasan peredaran benih yang keluar dari yogyakarta yaitu benih Kelapa Bojong Bulat sejumlah 29.797 butir. Pada tahun 2022 tidak ada data yang masuk.

(4) Provinsi Jawa Timur

Hasil pengawasan peredaran benih di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:



Grafik 10. Data Peredaran Benih di Jawa Timur

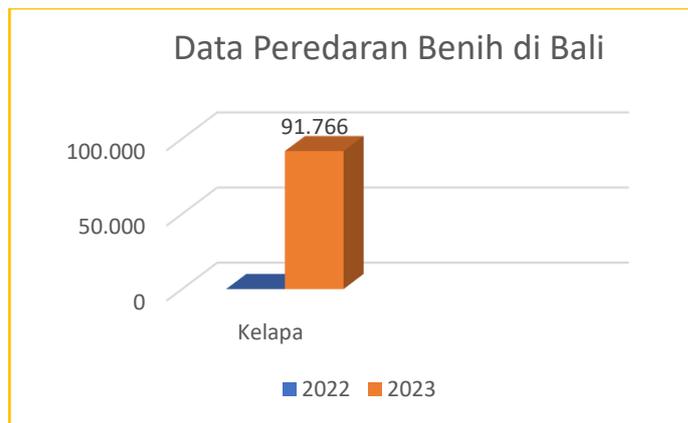
Pada Tahun 2023 data yang dilaporkan pada pengawasan peredaran yang dilakukan oleh UPTD Jawa Timur adalah kopi dan kakao sejumlah 2.308.225 batang sedangkan pada tahun 2022 komoditi yang beredar di Jawa Timur adalah Kakao, Kopi, Tembakau, Cengkeh dan Kelapa sejumlah 2.648.740 batang dan tembakau 4,5 kg.

(5) Provinsi Bali

Hasil pengawasan peredaran benih di Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Data Peredaran Benih yang Masuk di Wilayah Provinsi Bali

No.	Komoditas / Varietas	Bentuk Benih	Asal Wilayah Benih	Jumlah	Wilayah Penerima	Nomor Sertifikat Mutu Benih
1.	Kelapa/ Genjah Salak	Butir	Manado	6.306	Buleleng	Ada, Sesuai
2.	Kelapa/ Dalam Bido	Butir	Manado	2.400	Buleleng	Ada, Sesuai
Jumlah				8.706 Butir		

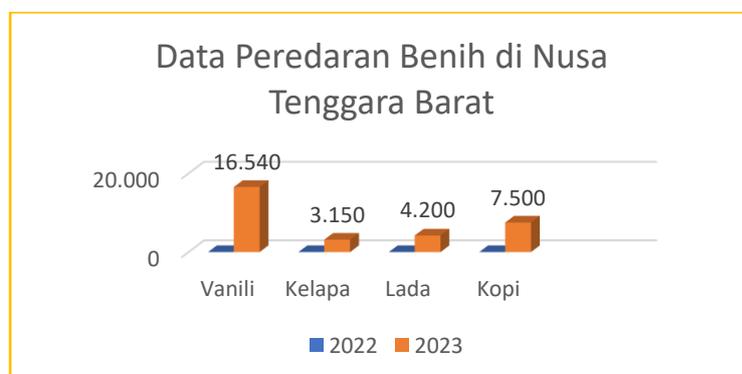


Grafik 11. Data Peredaran Benih di Bali

Pada Tahun 2023 benih yang beredar di Provinsi Bali adalah Benih Kelapa sejumlah 93.789 butir kelapa. Sedangkan pada tahun 2022 tidak ada data pengawasan peredaran yang masuk.

(6) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil pengawasan peredaran benih di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

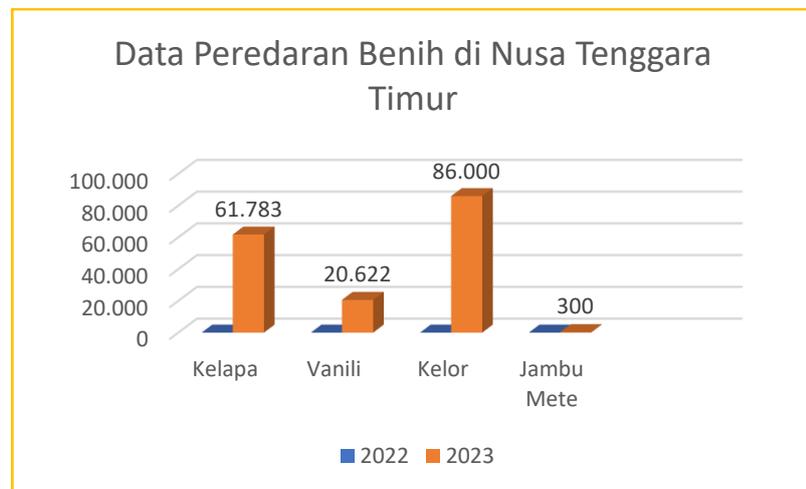


Grafik 12. Data Peredaran Benih di Nusa Tenggara Barat

Tahun 2023 benih yang beredar di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah benih Vanili, Kelapa, Lada dan Kopi sejumlah 33.413 batang sedangkan pada tahun 2022 tidak ada data yang masuk.

(7) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil pengawasan peredaran benih di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:



Grafik 13. Data Peredaran Benih di Nusa Tenggara Timur

Tahun 2023 benih yang beredar di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah benih Kelapa, Vanili, Kelor dan Jambu Mete sejumlah 170.428 batang dan 300 kg Jambu Mete. sedangkan pada tahun 2022 tidak ada data yang masuk.

(8) Provinsi Sulawesi Barat

Hasil pengawasan peredaran benih di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Data Peredaran Benih yang Masuk di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

No.	Komoditas / Varietas	Bentuk Benih	Asal Wilayah Benih	Jumlah	Wilayah Penerima	Nomor Sertifikat Mutu Benih
1.	Kelapa Sawit/ Simalungun	Butir	Medan	210	Enrekang	A572/1/I
2.	Kelapa Sawit/ Simalungun	Butir	Medan	315	Wajo	A578/1/I
3.	Kelapa Sawit/ Simalungun	Butir	Medan	525	Donggala	A590/1/I
4.	Kelapa Sawit/ Simalungun	Butir	Medan	210	Donggala	A591/1/I
5.	Kelapa Sawit/ Yangambi	Butir	Medan	1.050	Pinrang	A582/1/I
6.	Kelapa Sawit/ Yangambi	Butir	Medan	367	Luwu	A654/1/I
7.	Kelapa Sawit/ Temba/ Spring	Batang	Green Plated	300	Sidrap	A572/1/I

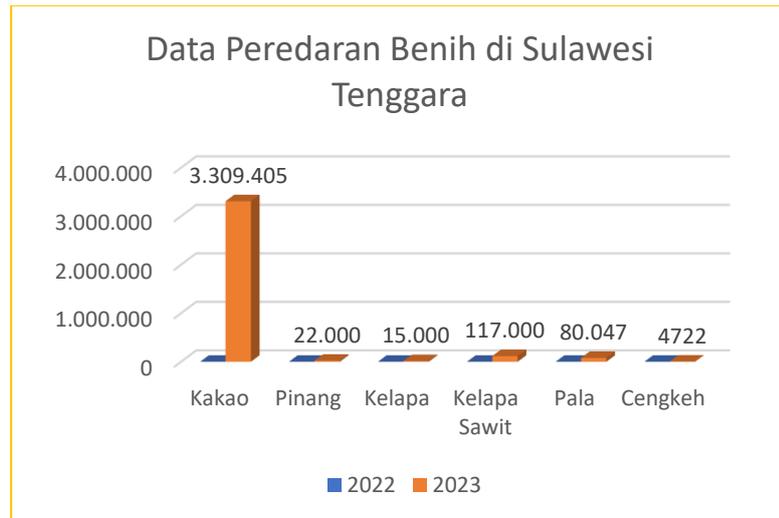


Grafik 14. Data Peredaran Benih di Sulawesi Barat

Tahun 2023 benih yang beredar di Provinsi Sulawesi Barat adalah benih Kelapa Sawit 2.977 batang. sedangkan pada tahun 2022 tidak ada data yang masuk.

(9) Provinsi Sulawesi Tenggara

Hasil pengawasan peredaran benih di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:



Grafik 15. Data Peredaran Benih di Sulawesi Tenggara

Tahun 2023 benih yang beredar di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah benih Kakao, Pinang, Kelapa, Kelapa Sawit, Pala dan Cengkeh sejumlah 3.548.174 batang. sedangkan pada tahun 2022 tidak ada data yang masuk.

(10) Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil pengawasan peredaran benih di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Data Peredaran Benih yang Masuk di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Komoditas /Varietas	Bentuk Benih	Asal Wilayah Benih	Jumlah	Wilayah Penerima	Nomor Sertifikat Mutu Benih
1.	Pala Unggul Lokal	Batang	Kab Morowali	66.000	Sulawesi Tengah	Ada, Sesuai
2.	Kakao Hibrida	Batang	Jember	53.454	Sulawesi Tengah	Ada, Sesuai
3.	Kakao	Batang	Sulawesi Selatan	17.500	Sulawesi Tengah	Ada, Sesuai
4.	Kopi	Batang	Kab Jember	105.000	Sulawesi Tengah	Ada, Sesuai
5.	Cengkeh Unggul Lokal	Batang	Kab Toli Toli	100.000	Sulawesi Tengah	Ada, Sesuai
6.	Kelapa dalam Unggul Lokal	Batang	Kab Toli Toli	36.500	Sulawesi Tengah	Ada, Sesuai
7.	Kelapa Genjah Raja	Batang	Kab Sigi	2500	Sulawesi Tengah	Ada, Sesuai

2) Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih Secara Insidentil

Terdapat pelaksanaan pengawasan peredaran benih secara insidentil atau kegiatan pengawasan peredaran yang dilakukan sewaktu-waktu (tidak terjadwal), sehubungan dengan terjadinya adanya suatu laporan tentang permasalahan peredaran benih lintas provinsi di wilayah kerja.

Surat konfirmasi dari UPTD Pengawasan dan pengujian sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu sehubungan dengan adanya pemasukan benih kopi robusta seedling sebanyak 3.413 batang (3.250 batang + ekstra 163 batang) oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia diperuntukkan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Lebong (an Bambang Suwantu). Benih tersebut diterima tanpa label dan hanya disertai sertifikat yang dikeluarkan oleh BBPPTP Surabaya. Pihak UPTD Provinsi Bengkulu melakukan konfirmasi tentang kebenaran sertifikat tersebut.

BBPPTP Surabaya telah memberikan konfirmasi bahwa dokumen Sertifikat Mutu Benih Nomor KB.010.03.44.1497.03.2023 tanggal 6 Maret 2023 benar dikeluarkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Pada Sertifikat Mutu Benih tersebut jumlah benih yang memenuhi syarat sejumlah 108.720 batang dan direncanakan akan disalurkan ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat.

BBPPTP Surabaya telah berkoordinasi dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk mengkonfirmasi benih yang dikirim tanpa label. Pihak Pusat Penelitian mengakui bahwa benih tersebut dikirim tanpa label tetapi label tersebut dikirim secara terpisah menyusul. Benih yang dikirim memang berasal dari sertifikat KB.010.03.44.1497.03.2023. Pihak Pusat Penelitian Kopi

dan Kakao Indonesia telah berkomitmen untuk selalu mengirim benih beserta dengan label dan sertifikat.

d. Pengujian mutu benih

Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh benih dan pengujian laboratorium dilaksanakan sepanjang tahun 2023, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Pengambilan contoh benih dilakukan diseluruh wilayah kerja BBPPTP Surabaya dan pengujian mutu benih dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan BBPPTP Surabaya.

Secara umum pengetahuan tentang berbagai aspek mutu benih sangat berperan dalam peningkatan produksi tanaman perkebunan di masa mendatang. Penggunaan benih yang tidak memenuhi syarat standar mutu yang telah diterapkan dapat menurunkan hasil produksi karena rendahnya mutu fisik, genetik dan fisiologis. Proses untuk mendapatkan benih unggul bermutu dan bersertifikat membutuhkan sinergitas antara ketersediaan produksi benih dengan kebutuhan lapangan yang dikemas dalam manajemen sistem perbenihan.

Tujuan Kegiatan Pengujian Mutu Benih Standar adalah untuk memperoleh contoh benih dalam jumlah yang sesuai untuk pengujian mutu benih dan mempunyai komposisi komponen yang dapat mewakili kelompok benihnya; produsen mendapatkan sertifikat mutu benih hasil pengujian laboratorium sebagai jaminan kualitas benih yang akan diedarkan.

Dari Januari hingga Desember 2023 permohonan pengambilan contoh benih/pengujian mutu benih yang masuk ke BBPPTP Surabaya sebanyak 32 permohonan yang berasal dari 5 produsen benih, adapun produsen benih tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT. Benih Emas Indonesia, Surabaya;
2. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat (BSIP TAS);
3. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember (PUSLITKOKA);
4. CV. Lang Buana, Blitar;
5. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain koordinasi tim PJ terkait rencana kegiatan selama setahun karena selama ini kegiatan ini berdasarkan permohonan dari produsen benih. Dengan terbatasnya anggaran dan permohonan pengujian mutu benih yang masuk mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 yang banyak sehingga beberapa kali dilakukan revisi anggaran. Kegiatan pengambilan contoh benih dan pengujian mutu benih dilakukan oleh seluruh personil yang memiliki sertifikat PPC dalam hal ini seluruh personil perbenihan.

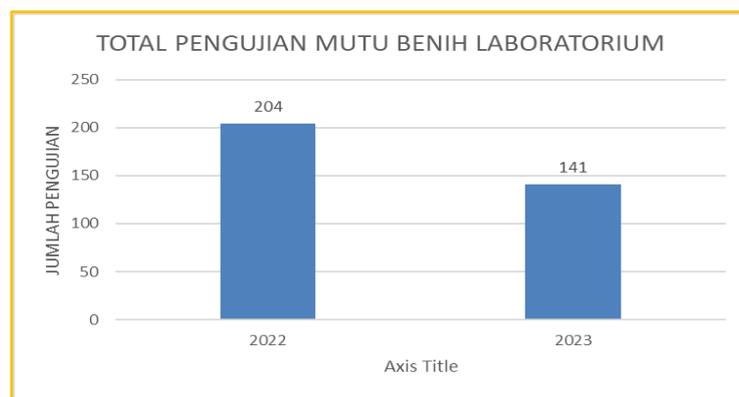
Komoditas yang diujikan selama Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:



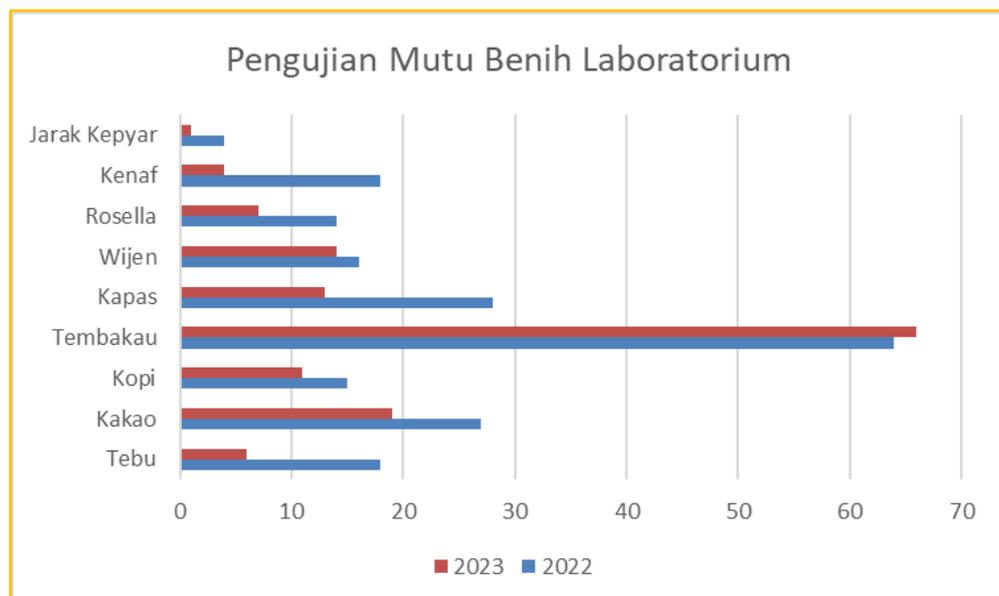
Gambar 15. Komoditas pada Kegiatan Uji Mutu Benih Tahun 2023

Hasil Pengujian Mutu Benih Standar Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

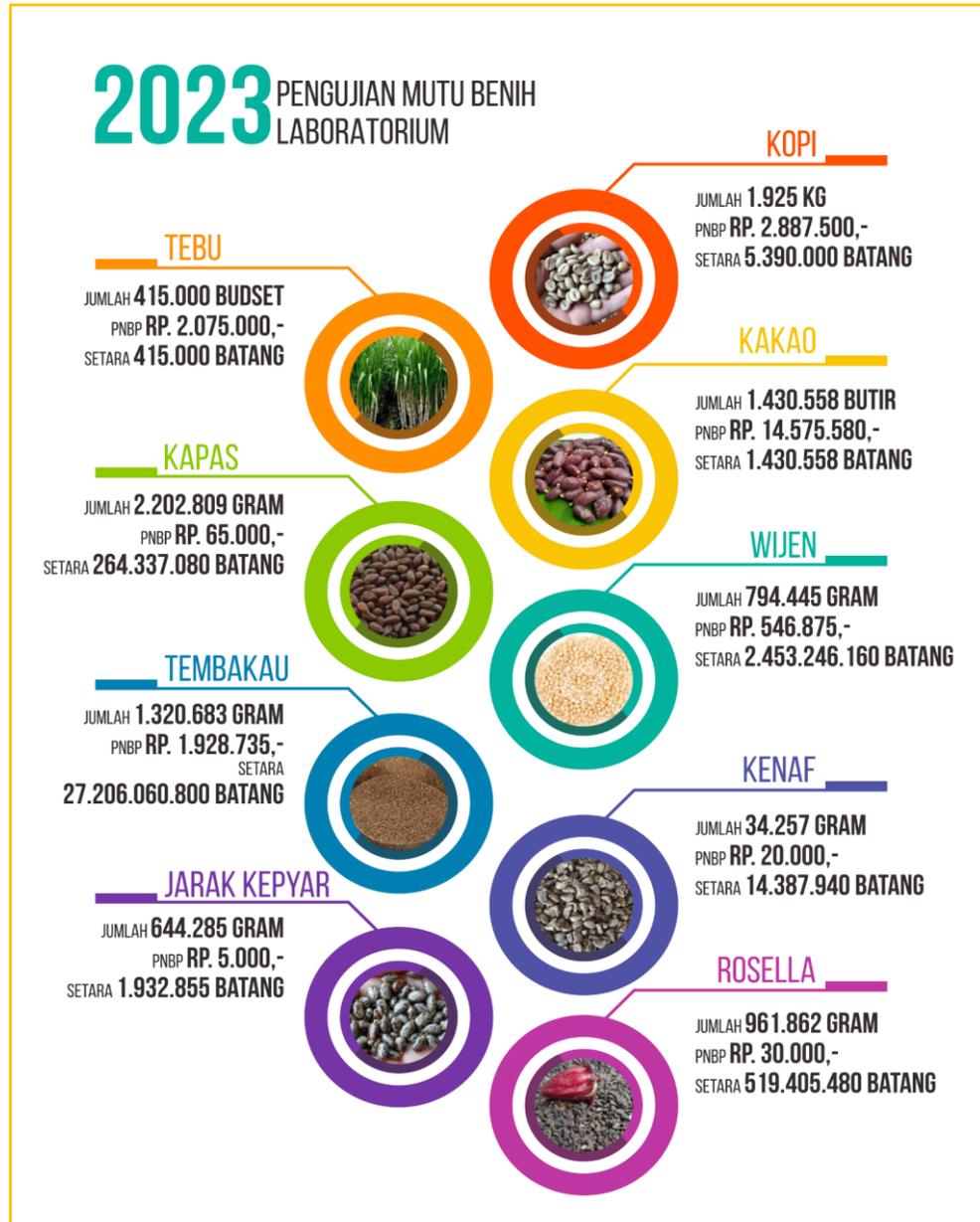
1. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya telah melaksanakan pengambilan contoh benih dan pengujian mutu benih sebanyak 141 pengujian dengan jumlah permohonan sebanyak 32 permohonan yang berasal dari 5 produsen benih.
2. Kegiatan pengambilan contoh benih dilakukan oleh seluruh personil perbenihan yang telah memiliki sertifikat PPC.
3. Target realisasi sesuai dengan POK 7.542.540 batang.



Grafik 16. Jumlah Total Pengujian Mutu Benih Laboratorium tahun 2023



Grafik 17. Grafik Perbandingan Pengujian Mutu Benih Laboratorium Tahun 2022 dengan Tahun 2023



Grafik 18. Statistik Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan di BBPPTP Surabaya Tahun 2023

Kegiatan pengambilan contoh benih dan pengujian mutu benih yang telah dilakukan adalah:

1. Puslitkoka Indonesia

Selama bulan Oktober-Desember tahun 2023 Puslitkoka telah mengajukan 20 kali permohonan pengujian mutu benih kakao dan kopi.



Gambar 16. Pengambilan contoh benih oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember

2. PT. Benih Emas Indonesia

Selama bulan Oktober - Desember 2023 PT. BEI mengajukan 2 kali permohonan pengujian mutu benih tembakau;

3. BPSI TAS

Selama bulan Oktober - Desember 2023 BPSI TAS telah mengajukan 5 kali permohonan pengujian mutu benih kenaf, jarak kepyar, kapas, tembakau, rosella, dan wijen.



Gambar 17. Pengambilan contoh benih oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di BPSI TAS, Malang

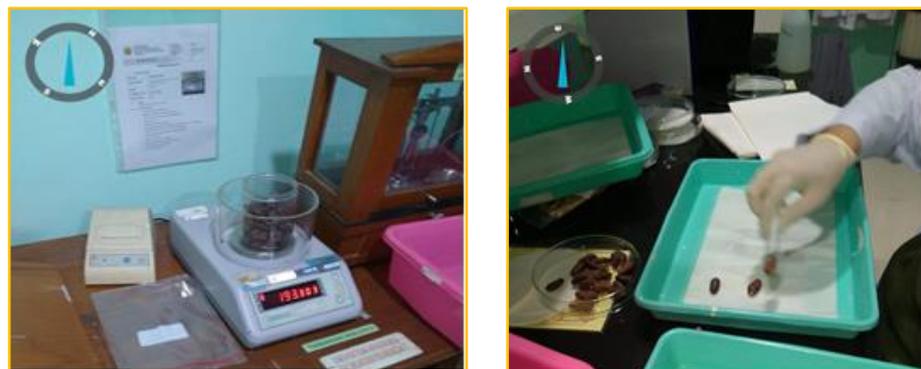
4. CV. Lang Buana

Selama bulan Januari - September 2023 CV. Lang Buana telah mengajukan 3 kali permohonan pengujian mutu benih tembakau.



Gambar 18. Pengambilan contoh benih oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di CV. Lang Buana, Blitar

Total kegiatan pengujian yang dilakukan selama bulan Januari – Desember 2023 berdasarkan permohonan dari produsen benih sebanyak 141 pengujian. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan metode pengujian dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu Benih termasuk kegiatan kalibrasi internal alat laboratorium. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk kegiatan koordinasi laboratorium, sehingga dilakukan dengan mencari literatur dari jurnal-jurnal.



Gambar 19. Dokumentasi kegiatan pengujian mutu benih kakao di Laboratorium Fisika Benih BBPPTP Surabaya

e. Pelaksanaan uji profisiensi laboratorium perbenihan

Salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam penerapan ISO/IEC 17025:2010 adalah adanya jaminan mutu hasil pengujian. Pengujian yang dilakukan oleh suatu laboratorium pengujian merupakan

bagian dari pengambilan keputusan yang sangat penting sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk membantu keabsahan data yang dikeluarkan laboratorium yang bersangkutan. Hal tersebut dapat ditempuh antara lain dengan berpartisipasi pada pelaksanaan uji profisiensi antar laboratorium.

Bahkan Laboratorium yang telah terakreditasi mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam uji profisiensi yang diselenggarakan oleh badan akreditasi terkait di suatu negara sebagai salah satu upaya badan akreditasi tersebut untuk memantau kemampuan teknis laboratorium terakreditasi secara berkala.

Berdasarkan hal tersebut maka Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya melaksanakan uji profisiensi antar laboratorium di lingkup wilayah kerja BBPPTP Surabaya Ruang lingkup uji profisiensi meliputi pengujian kadar air, pengujian kemurnian fisik dan pengujian daya berkecambah.

Tujuan dari kegiatan uji profisiensi antar laboratorium ini adalah:

1. Menilai unjuk kerja laboratorium pengujian mutu benih;
2. Memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium penguji;
3. Memenuhi persyaratan dalam rangka pengajuan SNI ISO/IEC 17043:2010 sebagai laboratorium provider;
4. Menyediakan jaminan mutu bagi laboratorium peserta dengan membandingkan unjuk kerja suatu laboratorium terhadap laboratorium lain yang sejenis, sehingga dapat mengambil langkah perbaikan yang diperlukan bila ada ketidaksesuaian.

Pada tahun 2023 ini telah dilakukan pengajuan akreditasi kembali untuk ISO 17043:2010. Asesmen awal dilakukan oleh pihak Komite Akreditasi Nasional dengan asesor Ibu Untari, Ibu Neny Widyana dan Bapak Kikin, asesmen dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023. Dari hasil asesmen didapatkan hasil sebanyak 19 ketidaksesuaian yang

harus diperbaiki dengan batas waktu perbaikan sampai dengan tanggal 5 Juli 2023.



Gambar 20. Status Akreditasi ISO 17043:2010 BBPPTP Surabaya

Laboratorium pengujian mutu benih BBPPTP Surabaya telah mendapatkan sertifikat akreditasi ISO 17043 : 2010 dari Komite Akreditasi Nasional nomor PUP-037-IDN, karena telah menunjukkan kompetensinya sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi untuk pengujian mutu benih tanaman perkebunan Sedangkan untuk pelaksanaan uji profisiensi sudah dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 dengan komoditas tembakau, kapas dan kopi.



Gambar 21. Komoditas Uji Profisiensi Tahun 2023

Pelaksanaan homogenitas, stabilitas dan uji profisiensi telah dilaksanakan pada bulan desember 2023, dan untuk saat ini dalam proses penerbitan laporan uji profisiensi tahun 2023. Kegiatan uji profisiensi sudah dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 dengan komoditi tembakau, kapas dan kopi. Peserta uji profisiensi Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 22. Peta Sebaran Peserta Uji Profisiensi Tahun 2023

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD BPPMBTP D.I. Yogyakarta;
4. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan - Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
5. Laboratorium UPTD. BPPSTPHBUN Provinsi Bali;
6. Laboratorium Benih BPSB-BUN NTB;
7. Laboratorium Benih Perkebunan Nusa Tenggara Timur;
8. Laboratorium Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Sulawesi Utara;
9. UPT BSMBP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;
10. UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan Sulawesi Tengah;
11. Laboratorium Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
12. Laboratorium Uji Mutu Benih UPTD BPSBPH Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. BPPSBP Provinsi Gorontalo;
14. Laboratorium BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
15. Laboratorium BBPPTP Ambon;
16. Laboratorium BBPPTP Medan.

Untuk saat ini manajemen Penyelenggara Uji Profisiensi BBPPTP Surabaya sedang mempersiapkan migrasi ISO/SNI 17043:2010 ke ISO/SNI 17043:2023. Sehingga harus memperbarui semua dokumen mulai Panduan Mutu, Dokumen Prosedur dan dokumen-dokumen yang terkait.

f. Penyiapan sumber benih dan perbanyak benih tanaman perkebunan

Penyediaan benih bermutu oleh pemerintah salah satunya diwujudkan melalui pembangunan nurseri perkebunan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarananya serta pembangunan kebun sumber benih di sejumlah kawasan pengembangan komoditas tanaman perkebunan.

Salah satu tujuan dari pembangunan dan pengembangan nursery perkebunan adalah mengakselerasi penyediaan benih bermutu tanaman perkebunan khususnya untuk perkebunan rakyat, serta optimalisasi ekspor di bidang perkebunan maka pemerintah melaksanakan dengan membangun logistik benih di kawasan pengembangan perkebunan, sehingga mudah didapatkan oleh pekebun dan menghemat biaya distribusi.

Nurseri tanaman perkebunan yang telah dibangun dan dikembangkan secara khusus difokuskan untuk penyediaan logistik benih dalam jumlah besar dengan kualitas yang baik sehingga memerlukan dukungan sarana prasarana pembenihan yang memadai dan modern. Fasilitas Pembenihan yang modern selain itu aspek yang tidak kalah pentingnya adalah efisiensi teknis, waktu, dan biaya yang sesuai dengan pencapaian target kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang terjamin baik, untuk pengadaan benih sesuai target tanam seluruh area wilayah tanam yang direncanakan.

Pada tahun 2023 produksi benih tanaman perkebunan dilakukan di 8 (delapan) nurseri yang dikelola oleh BBPPTP Surabaya, yaitu nurseri kelapa Kota Bima, pusat nurseri kelapa Kabupaten Batang, nurseri

tebu Kabupaten Tuban, nurseri tebu Kabupaten Malang, nurseri jambu mete Kabupaten Bombana, nurseri kopi Gekbrong Kabupaten Cianjur, kerja sama produksi benih dengan UPTD Jawa Barat dan produksi benih kelapa kerja sama dengan BPSIP Nusa Tenggara Barat.

1) Produksi Benih Kelapa di Nurseri Kota Bima

Benih kelapa yang diproduksi di nurseri Kota Bima merupakan benih kelapa genjah. Produksi kelapa genjah pada tahun 2023 adalah kelapa Genjah Kuning Bali dengan kapasitas produksi sejumlah 2.727 butir. Jumlah benih kelapa genjah yang memenuhi syarat untuk didistribusikan ke 9 kelompok tani di Kota Bima setelah dilakukan kegiatan sertifikasi sebanyak 1.045 batang.

2) Produksi Benih Tebu di Nurseri Kabupaten Malang

Produksi benih tebu di nurseri Kabupaten Malang adalah sebanyak 38.000 mata tunas benih tebu varietas NX 03 jenjang KBI atau setara dengan 0,63 ha dan 158.000 mata tunas benih tebu varietas Bululawang jenjang KBD atau setara dengan 2,63 ha. Varietas NX 03, jenjang KBI, telah didroping pada bulan Juli setelah sertifikasi benih ke Poktan Usaha Karya Sugihwaras Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Jawa Timur untuk pengembangan jenjang KTG sebanyak 15,78 ha dan KBD sebanyak 3,78 ha.

Tabel 27. Hasil Produksi Benih Tebu di Nurseri Kabupaten Malang

Varietas	Bulan Tanam	Jenjang	Luas Tanam	Rencana Sertifikasi	Rencana Tebang
Bululawang	VII B 2023	KBI	1,361 hektar terdiri dari 8 Blok (A, B, C, D, E, F, K, L, Q)	Januari- Maret 2024	Maret 2024
Bululawang	XI A 2023	KBN	0,04 hektar terdiri 2 Blok P4 dan S	Maret-Mei 2024	Mei 2024
Bululawang dan AMS	XI A 2023	KBN	0,181 hektar Blok G	Mei-Juli 2024	Juli 2024

Benih tebu hasil produksi pada tahun 2023 direncanakan akan disertifikasi pada bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 202

3) Produksi Benih Jambu Mete di Nurseri Kabupaten Bombana

Benih Jambu Mete yang diproduksi di nurseri Kabupaten Bombana merupakan Varietas Populasi Muna dan telah dilaksanakan penyambungan benih jambu mete sebanyak 34.828 batang.

Benih Kelapa Genjah yang di produksi di nurseri Kabupaten Bombana merupakan Varietas Genjah Raja dan jumlah tanaman yang tumbuh mencapai 2.135 batang. Benih jambu mete grafting dan kelapa genjah raja rencana akan disertifikasi pada bulan Februari – Maret 2024. Distribusi benih jambu mete hasil produksi nurseri Kabupaten Bombana sebagaimana Lampiran 4.

4) Produksi Benih Kelapa Kerja Sama dengan BPSIP Nusa Tenggara Barat

Produksi benih kelapa hasil kerja sama dengan BPSIP Nusa Tenggara Barat adalah kelapa Genjah Kuning Bali dengan kapasitas produksi mencapai 2.727 butir. Jumlah benih kelapa genjah yang memenuhi syarat setelah di lakukan kegiatan sertifikasi sebanyak 1.045 batang. Proses distribusi dilakukan di Kabupaten Sumbawa untuk 1 kelompok tani sebanyak 454 batang; Kabupaten Lombok Timur untuk 9 kelompok tani sebanyak 3.708 batang; Kabupaten Lombok Barat untuk 3 kelompok tani sebanyak 1.892 batang dan Kabupaten Lombok Utara untuk 1 kelompok tani sebanyak 1.594 batang.

5) Produksi Benih Kelapa di Pusat Nurseri Kelapa Kabupaten Batang

Benih kelapa yang diproduksi di Pusat Nurseri Kelapa Kabupaten Batang Jawa Tengah adalah jenis kelapa dalam varietas Bojong Bulat, Banyuwangi, bali, bido dan jenis kelapa genjah varietas GKB, GKN, Raja, Salak, Entog Kebumen dan Kopyor.

Data produksi benih kelapa di Pusat Nurseri Kelapa Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Data Produksi Benih Kelapa di Pusat Nurseri Kelapa Kabupaten Batang

No.	Jenis	Varietas	Masa Tanam	Jumlah semai	Jumlah bertunas	Pindah pembesaran	Jumlah tersertifikasi	Salur	Daya Berkecambah (%)
1.	Kelapa Dalam	Bojong Bulat	(Mei - Agust 2023)	21.250	6.849	4.198	3.827	611	71,42
		Banyuwangi	(Mei - Agust 2023)	15.228	5.760	4.866	1.692	1.692	
		Bali	Juli - Agust 2023	15.299	3.566	7.140	-	-	
		Bido	Des 23	1.728	315	-	-	-	
Jumlah Produksi Kelapa Dalam				53.505	16.490	16.204	5.519	2.303	
2.	Kelapa Genjah	GKB	Juli - Okt 2023	26.314	12.124	-	-	-	33,70
		GKN	Agust - Des 2023	22.400	8.598	1.334	-	-	
		Raja	Sept - Des 2023	11.951	4.917	-	-	-	
		Salak	Sept - Des 2023	34.319	14.410	-	-	-	
		Entog Kebumen	Okt - Des 2023	21.854	397	-	-	-	
		Kopyor	Des 2023	7.139	-	-	-	-	
Jumlah Produksi Kelapa Genjah				123.977	40.446	1.334	-	-	

Pada tahun 2023 benih kelapa yang disemaikan di Pusat Nurseri Kelapa Kabupaten Batang sebanyak 177.482 butir kelapa.

Benih yang telah disalurkan pada tahun 2023 mencapai 89.772 batang yang terdiri dari 68.663 batang kelapa dalam dan 21.109, yang merupakan proses persemaian dari tahun 2022 dimana target produksi pada saat itu adalah 120.000 batang (75 %).

Batang kelapa genjah. Proses penyaluran dilakukan di beberapa kabupaten yang meliputi Kab Pemalang, Wonogiri, Blora, kota Semarang, Purwakarta, Sragen, Ponorogo, Rembang, Kudus, Malang, Grobogan, Kendal, Pekalongan, Kab Batang, Semarang, Magelang, Purbalingga, Salatiga, Purworejo, Nganjuk.

6) Produksi Benih Tebu di Nurseri Kabupaten Tuban

Pada tahun 2023 telah dilakukan sertifikasi benih tebu hasil produksi dari nurseri Kabupaten Tuban sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 29. Sertifikasi Benih Tebu G1

No.	Kebun /Blok	Varietas	Nomor Sertifikat	Taksasi Benih Sesuai Luasan		
				Luas (HA)	Mata	Bagal
1.	Blok A	BL	22/34/121.6.2/24/6.5/2/2023	1,99	119.176	59.588
2.	Blok B	BL	22/35/121.6.2/24/6.5/2/2023	0,23	13.958	6.979

Hasil sertifikasi benih tebu didistribusikan ke nurseri Polbangtan Malang untuk selanjutnya dilakukan penangkaran.

Target produksi benih tebu di nurseri Kabupaten Tuban tahun 2023 adalah 21.000 polibag (G0) untuk ditangkarkan menjadi 30 ha KBD. Luas lahan penangkaran hanya 0,14 ha (kurang lebih 2.500 rumpun) polibag (G0). Realisasi produksi hingga 31 Desember 2023 adalah 28.340 polibag (G0) dengan rincian sebagai berikut:

a) Produksi benih tebu varietas PS862

Jumlah produksi tebu varietas PS 862 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Produksi Benih Tebu Varietas PS 862

No	Varietas	Jumlah Polibag	Tanggal Tanam
1.	PS862	336	30 Januari 2023
2.	PS862	391	2 Februari 2023
3.	PS862	367	23 Februari 2023
4.	PS862	70	24 Februari 2023
Total PS 862		1.164	

Hasil produksi benih tebu varietas PS 862 ditanam untuk kebun penangkaran G1 pada bulan Juli sebanyak 257 rumpun.

b) Produksi benih tebu varietas AMS Agribun

Jumlah produksi tebu varietas AMS Agribun adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Produksi Benih Tebu Varietas AMS Agribun

No.	Varietas	Jumlah Polibag	Tanggal Tanam
1.	AMS Agribun	386	23 Februari 2023
2.	AMS Agribun	74	24 Februari 2023
3.	AMS Agribun	498	Bulan Juni 2023
4.	AMS Agribun	337	3 Juli 2023
5.	AMS Agribun	85	4 Juli 2023
Total AMS Agribun		1.380	

Hasil produksi benih tebu varietas ditanam untuk kebun penangkaran G1 pada bulan Juli sebanyak 381 rumpun dan dikirim ke nurseri Polbangtan Malang sejumlah 410 polibag.

c) Produksi benih tebu varietas CMG Agribun

Jumlah produksi tebu varietas CMG Agribun adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Produksi benih tebu varietas CMG Agribun

No.	Varietas	Jumlah Polibag	Tanggal Tanam
1.	CMG Agribun	135	1 Maret 2023
2.	CMG Agribun	264	3 Maret 2023
3.	CMG Agribun	334	7 Maret 2023
4.	CMG Agribun	395	8 Maret 2023
5.	CMG Agribun	85	9 Maret 2023
6.	CMG Agribun	323	20 Maret 2023
7.	CMG Agribun	417	21 Maret 2023
8.	CMG Agribun	266	30 Maret 2023
9.	CMG Agribun	241	31 Maret 2023
10.	CMG Agribun	288	03 April 2023
11.	CMG Agribun	111	04 April 2023
12.	CMG Agribun	233	10 April 2023
13.	CMG Agribun	237	12 April 2023
14.	CMG Agribun	256	13 April 2023
15.	CMG Agribun	298	17 April 2023
16.	CMG Agribun	349	19 Mei 2023
17.	CMG Agribun	127	22 Mei 2023
Total CMG Agribun		4.359	

Hasil produksi benih tebu varietas CMG Agribun ditanam di lahan penangkaran G1 pada bulan Juli 2023 sebanyak 2.280 rumpun, digunakan untuk display di Polbangtan Malang 250 rumpun dan digunakan untuk penyulaman di lahan penangkaran. Pertanaman G1 di lahan pembesaran sudah berumur 5 bulan dan akan diajukan sertifikasi pada bulan Januari - Februari 2024.

7) Produksi Benih Kopi di Nurseri Gekbrong Jawa Barat

Hasil produksi benih kopi di nurseri Gekrong Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Produksi dan Penyaluran Benih Kopi Varietas S795 Kerjasama Produksi dengan BPTP Provinsi Jawa Barat

No	Lokasi Kebun	Kapasitas Produksi Benih (batang)	Target Produksi Benih (batang)	Produksi					Distribusi benih Kopi Arabika		
				Penyemaian	Pembesaran	Proses Sertifikasi	Siap Salur	Sudah disalurkan	Lokasi distribusi	Jumlah benih	Stok
1	Cikarang Kab. Garut	300.000	250.000	300.000	211.000	211.000	210.900	210.900	Poktan Kab. Garut	155.500	
									Poktan Kab. Nganjuk	38.400	
									Poktan Kab. Madiun	17.000	
										210.900	0
2	Sukanagara Kab. Cianjur	200.000	150.000	200.000	150.000	149.769	127.768	127.768	Poktan Ponorogo	30.000	
									Poktan Kab. Temanggung	52.000	
									Poktan Kota Batu	20.000	
									Kab. Cianjur	25.268	
									Kab. Cianjur Kehutanan	500	
	127.768	0									
JUMLAH				500.000	361.000	360.769	338.668	338.668			

Tabel 33. Proses Produksi Benih Kopi di Nurseri Gekbrong

Varietas	Semai			Pindah Tanam		Keterangan
	Tanggal	Lokasi	Jumlah	Lokasi	Jumlah	
Sigarar Utang	17-20 Juli	GH 2	50.000	SH 5	47.594	-
Komasti	16-21 Agustus	GH 1	100.000	SH 5 DAN SH 6	95.323	-
Gayo 1	9-11 Agustus	GH 2	100.000	SH 6 DAN SH 7	35.257	Terjadi gangguan pertumbuhan
Gayo 2	11-15 Agustus	GH 2	100.000	SH 6	11.577	Terjadi gangguan pertumbuhan
Propelegitim (Tahap 1)	22-23 Agustus	GH 2	50.000	-	-	Minggu depan
Propelegitim (Tahap2)	07 November	GH 1	10.000	-	-	Menunggu fase kepelan
TOTAL			410.000		189.751	

Gangguan pertumbuhan benih kopi pada varietas Gayo 1 dan Gayo 2 disebabkan karena terjadi kerusakan alat pengkabutan (springkle) sehingga terdapat air yang menetes pada beberapa bagian persemaian. Hal ini berakibat (benih) tidak berada lagi di dalam media semai, sehingga menghambat proses perkecambahan benih. Kerusakan alat tersebut juga berakibat pada menurunnya kelembapan udara pada lokasi greenhouse sehingga mengganggu proses perkecambahan dan pertumbuhan benih.

3. Sasaran kegiatan terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisiensi

Sasaran kegiatan terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisiensi dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tercapai pada **3,55** Skala Likert (1-4) atau 118% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelanggan Unit Kerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survei Kepuasan Pelanggan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada Pelanggan adalah:

- a) Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasilguna;
- b) Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a) Diketahui Survei Kepuasan Pelanggan secara menyeluruh terhadap hasilpelaksanaan pelayanan publik pada Unit Pelayanan;
- b) Diketahui kelemahan maupun kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- d) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- e) Bagi Pelanggan dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat 9 (sembilan) unsur yang "*relevan*", "*valid*" dan "*reliabel*", sebagai unsur minimal yang harus ada

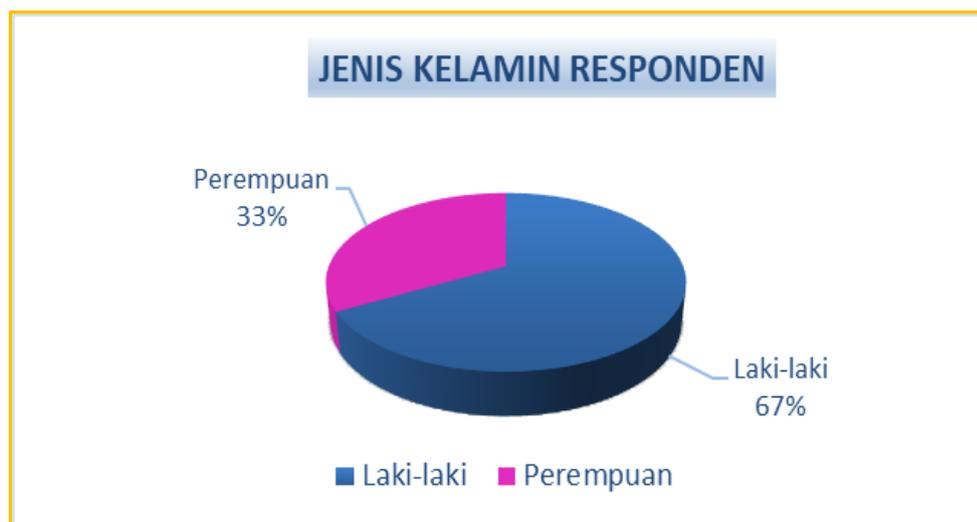
untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusansuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b) Prosedur Pelayanan, adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c) Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d) Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan Pelanggan.
- e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produklayanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f) Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- g) Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h) Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.
- i) Penanganan Pengaduan, yaitu tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan pada unit pelayanan lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada pelayanan yang ada di BBPPTP Surabaya yaitu:

- a) Sertifikasi Mutu Benih
- b) Sistem Bank Isolat (Sibulat)
- c) Layanan Produk Formulasi (Ladufor)
- d) Sistem Layanan Dokter Tanaman (Sinanda)
- e) Sistem Informasi OPT (SIM OPT)

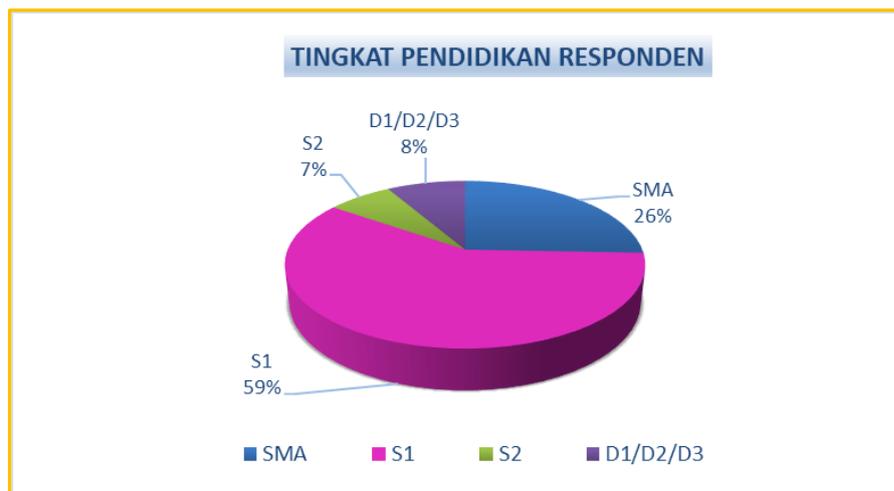
Data akhir kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Pelanggan dari setiap unit pelayanan dengan data kuesioner berjumlah 206 responden.



Grafik 19. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari total 206 responden, 67 % diantaranya adalah laki-laki (138 orang) dan 33 % sisanya adalah perempuan (68 orang).

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan pada responden dengan rentang pendidikan SMA, Diploma, S1 dan S2.



Grafik 20. Tingkat Pendidikan Responden Pelayanan

Umumnya, pendidikan terakhir responden adalah 59 % berpendidikan S1 (120 orang), 26 % berpendidikan SMA (52 orang), 8 % berpendidikan D1/D2/D3 (17 orang), 7 % berpendidikan S2 (14 orang).

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,111. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34. Nilai Unsur Persepsi Pelayanan Tahun 2023

NO	UNSUR PELAYANAN	JUMLAH NILAI PERSEPSI
1.	Kesesuaian Persyaratan	732,00
2.	Kemudahan Prosedur	737,00
3.	Kecepatan Waktu	731,00
4.	Kewajaran Tarif	706,00
5.	Kesesuaian Produk	726,00
6.	Kompetensi	746,00
7.	Perilaku Petugas	756,00
8.	Sarana dan Prasarana	712,00
9.	Penanganan Pengaduan	810,00

Maka untuk mengetahui nilai survei unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut: $\{(732 \times 0,111) + (737 \times 0,111) + (731 \times 0,111) + \dots + (810 \times 0,111)\} = 488,62$

Dengan demikian, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Nilai Index = 3,55
- b) Nilai SKM Dikonversi = 18304,00
- c) Nilai IKM = 88,85
- d) Kinerja Unit Pelayanan
 - (1) Mutu Pelayanan (x) = A
 - (2) Kinerja Unit Pelayanan (y) = Sangat Baik

Berdasarkan nilai unsur pelayanan pada Indeks Kepuasan Pelanggan kategori penilaian pendapat Pelanggan/responden yaitu kategori baik dan diberi nilai persepsi 4.

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Pengembangan kawasan tanaman Tahunan dan Penyegar merupakan meningkatkan program Direktorat Jenderal Perkebunan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan dengan sasaran masyarakat penerima bantuan pemerintah.

Dasar Pelaksanaan kegiatan adalah sebaga berikut:

- a) Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 253/Kpts/RC/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2020-2004
- b) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 58/Kpts/KB.410/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Tahun Anggaran 2023.
- c) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BBPPTP Surabaya Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-018.05.2.567338/2023

Target capaian luasan program kegiatan ini adalah kawasan Kopi 1.510 hektar, kawasan kakao 2.200 hektar, kawasan kelapa 3.250 Hektar dan kawasan jambu mete seluas 850 hektar.

Tabel 35. Realisasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Tahunan dan Penyegar

Kode	Program/ Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Anggaran	Persentase	
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	16.106.070.000	15.249.424.057	94.68%	97,35%
1777.RAI.002	Kawasan Kakao	7.154.060.000	7.075.620.127	98.90%	100%
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	18.680.230.000	17.943.268.918	96.05%	100%
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete	2.232.320.000	1.909.335.723	85.53%	100%

a) Kawasa Kopi

Realisasi fisik target capaian luasan kawasan kopi pada tahun 2023 tercapai 97,35% yaitu 1.470 hektar dari total target 5.510 hektar. Sebanyak 40 hektar dari total target 60 hektar kawasan kopi tidak tercapai yaitu pada kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Ponorogo. Penyebabnya adalah sampai batas waktu yang telah ditargetkan UPTD memberikan data CPCL hanya untuk 20 hektar calon lahan, sehingga pengadaan benih kopi hanya untuk 20 hektar Kawasan kopi.

1) Perluasan Tanaman Kopi

Tanaman kopi (*Coffea* sp.) merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Peran strategis komoditas kopi dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai penghasil devisa, sumber pendapatan petani, penghasil bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pengembangan wilayah.

Penurunan tingkat produktivitas yang disebabkan sebagian besar tanaman tua, kurang perawatan dan serangan hama dan penyakit, rendahnya mutu hasil penanganan pasca panen yang belum

sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan serta meningkatnya harga agroinput seperti pupuk dan pestisida.

Memperhatikan kondisi serta permasalahan yang ada saat ini, maka kebijakan dan strategi dalam pengembangan kopi diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman penyegar berkelanjutan melalui perbaikan mutu tanaman, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), pengendalian OPT dan penyediaan benih unggul bersertifikat serta sarana produksi.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani/masyarakat antara lain Benih Kopi, Pupuk Organik dan Pupuk NPK

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bima, Dompu, Sigi, Pinrang, Mojokerto, Pasuruan, Kediri, Ponorogo, Probolinggo dan Lumajang.

2) Peremajaan Tanaman Kopi

Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani/masyarakat antara lain Benih Kopi, Pupuk Organik dan Pupuk NPK.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, Manggarai Timur dan Situbondo.

3) Intensifikasi Tanaman Kopi

Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani/masyarakat antara lain: Knapsack Sprayer, Pupuk Organik, Pupuk NPK, Pupuk Hayati Padat, Kliserit dan Pembenh Organik Cair.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, Manggarai Timur, Toraja Utara dan Ponorogo.

b) Kawasan Kakao

Realisasi fisik target capaian luasan Kawasan kakao pada tahun 2023 tercapai 100% yaitu 2.200 hektar.

1) Peremajaan Tanaman Kakao,

Bantuan yang diberikan antara lain Benih, Pupuk NPK dan Pupuk Organik.

Lokasi Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Konawe.

2) Intensifikasi Tanaman Kakao

Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani/masyarakat antara lain: Pupuk NPK, Pembenh Tanah Organik Cair, dan Knapsac Sprayer.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Poso, Parigi Moutong, Sigi, Sikka, Konawe Selatan dan Bombana.

c) Kawasan Kelapa

Realisasi fisik target capaian luasan kawasan kelapa pada tahun 2023 tercapai 100% yaitu 3.250 hektar.

1) Perluasan Tanaman Kelapa

Bantuan yang diberikan antara lain Benih dan Pembenh Tanah Organik Cair.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, Maros, Barru, Banyuwangi, Pacitan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Jeneponto, Sidenreng Rappang, Pangkajene Kepulauan, Kediri.

2) Peremajaan Tanaman Kelapa

Bantuan yang diberikan antara lain Benih dan Pembenh Tanah Organik Cair.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, Majene, Paliwalimandar, Poso, Donggala, Banggai,

Bantaeng, Kupang, Ende, Pinrang, Bombana, Gorontalo, Kab. Pohuwato, Bone Bolango, Kolaka Utara.

d) Kawasan Jambu Mete

Realisasi fisik target capaian luasan kawasan jambu mete pada tahun 2023 tercapai 100% yaitu 850 hektar.

1) Perluasan Tanaman Jambu Mete

Bantuan yang diberikan antara lain Benih dan Pupuk Organik. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Ende, Nagekeo dan Alor.

2) Peremajaan Jambu Mete

Bantuan yang diberikan antara lain Benih dan Pupuk Organik. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Ende, Flores Timur dan Malaka.

2. Kawasan Organik Partisipatif Komoditas Perkebunan (KOPI PASTI Perkebunan)

Kementerian Pertanian telah menetapkan 15 (lima belas) fokus kegiatan utama pembangunan pertanian, salah satu prioritasnya adalah pengembangan pertanian organik.

Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat.

Pengembangan pertanian organik dilaksanakan dalam rangka menyediakan bahan pangan yang sehat dan ramah lingkungan. Sebagai

bentuk tindak lanjut dari kegiatan pengembangan pertanian organik tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.

Desa pertanian organik dalam petunjuk teknis desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan tahun 2023 adalah desa yang di dalamnya dikembangkan sehampanan atau beberapa hampanan komoditas pertanian yang menerapkan sistem pertanian organik sesuai standar yang berlaku.

Komoditas strategis perkebunan berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 terdiri dari 18 komoditas, untuk pengembangan kawasan difokuskan pada komoditas kopi, kelapa dan jambu mete sesuai dengan arahan direktif presiden. Selain upaya peningkatan produktivitas tanaman perkebunan, produk perkebunan Indonesia juga diharapkan mampu untuk mencapai proses hilirisasi, sehingga tidak lagi menjual bahan mentah, dan menyajikan produk olahan perkebunan yang dapat meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional.

Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional, terutama untukantisipasi dampak el-nino. Hal ini sesuai dengan arahan presiden untuk lebih fokus pada isu hilirisasi. Diperlukan dorongan yang berkelanjutan untuk melanjutkan proses hilirisasi dalam setiap komoditas pertanian, terutama pada komoditas perkebunan seperti kopi, kelapa dan jambu mete sesuai arahan presiden.

Komoditas-komoditas unggulan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, teh, rempah-rempah dan lainnya tetap difokuskan untuk pencapaian target nilai ekspor hingga 1.200 triliun tahun 2024, dari kondisi saat ini devisa negeri dari ekspor perkebunan baru mencapai 400-500 triliun per tahun. Sedangkan pemenuhan pangsa pasar organik yang dimiliki Indonesia 0,4 persen dari pangsa dunia. Indonesia mempunyai

peluang untuk meningkatkan kontribusi dalam pemenuhan pangsa pasar ekspor organik.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan tentang pengawasan peredaran benih perkebunan dan pembangunan nurseri perkebunan diharapkan dapat mendukung pembangunan kawasan organik yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan ekspor.

Kegiatan pembinaan desa organik telah dilaksanakan oleh BBPPTP Surabaya mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 kelompok tani desa organik di 13 kabupaten dengan total luas lahan 553,85 Ha. Kelompok tani yang telah mendapatkan Sertifikat Organik SNI dan Organik Ekspor untuk komoditas kopi, kakao dan gula kelapa sejumlah 18 kelompok, sedangkan dua kelompok tani masih dalam proses usulan pengajuan sertifikasi.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pengembangan komoditas kopi, kelapa dan jambu mete, arahan Menteri Pertanian tentang hilirisasi komoditas pertanian serta sesuai dengan visi misi BBPPTP Surabaya untuk mewujudkan perkebunan Indonesia yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Maka dipandang perlu untuk disusun suatu strategi pengembangan kawasan organik partisipatif komoditas perkebunan di Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dari kegiatan ini difokuskan kepada upaya untuk membangun organisasi adaptif, yang akan dicapai pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Tujuan Jangka Pendek

- 1) Penetapan pengembangan kawasan organik partisipatif se-Jawa Timur;

- 2) Penetapan pendamping pengembangan kawasan organik partisipatif (penyuluh dari Dinas yang menangani perkebunan baik Provinsi maupun Kabupaten);
- 3) Pemberian input sarana produksi berupa benih, saprodi, dan alat pasca panen guna mendukung pengembangan kawasan organik;
- 4) Peningkatan kemampuan teknis anggota poktan tani desa organik melalui pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis;
- 5) Kesepakatan antar stakeholder (pemerintah pusat/daerah, pelaku organik (petani/perusahaan organik, asosiasi), eksportir) untuk mendukung pengembangan kawasan organik partisipatif komoditas perkebunan, sehingga terjadi penguatan jaringan pemasaran produk organik, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- 6) Draf Keputusan Dirjenbun tentang tata kelola pengembangan kawasan organik partisipatif komoditas perkebunan.

b. Tujuan Jangka Menengah

Penambahan luas kawasan (eskalasi) pengembangan organik;

- 1) Penandatanganan Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tata Kelola Pengembangan Kawasan Organik Partisipatif Komoditas Perkebunan;
- 2) Penyusunan draf Peraturan Menteri Pertanian tentang Pertanian Organik Berbasis Kawasan Perkebunan.

c. Tujuan Jangka Panjang

- 1) Re-sertifikasi organik pada poktan-poktan desa organik yang menjadi binaan BBPPTP Surabaya;
- 2) Penambahan luas kawasan (eskalasi) pengembangan organik.

Sasaran penerima manfaat dari pengembangan kawasan organik partisipatif komoditas perkebunan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pihak Eksternal

Pihak eksternal yang menerima manfaat dari proyek perubahan adalah:

- 1) Petani, manfaat yang diterima yaitu mendapatkan bimbingan teknis yang intensif terkait pengembangan pertanian organik, mendapatkan informasi tentang akses pasar yang lebih luas, mendapatkan bantuan sarana produksi.
- 2) Eksportir, manfaat yang diterima yaitu tersedia produk organik dengan kualitas yang terjamin sesuai dengan kebutuhan pasar domestik maupun luar negeri.
- 3) Pemerintah Daerah, manfaat yang diterima yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Pihak Internal

Pihak internal yang menerima manfaat dari proyek perubahan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan, dimana terdapat regulasi yang mengatur tata kelola pengembangan kawasan organik partisipatif komoditas perkebunan.



Gambar 23. Penyerahan Bantuan Saprodi dan Penandatanganan Gambar Naskah Deklarasi Dukungan KOPI PASTI Perkebunan



Gambar 24. Bimtek Tanaman Kopi di Kabupaten Kediri

Capaian hasil KOPI PASTI Perkebunan jangka pendek dan jangka menengah yang berhasil dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Kawasan Organik Partisipatif Berbasis Perkebunan Provinsi Jawa Timur (Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 147/Kpts/11/2023)
- b. Penetapan pendamping pengembangan kawasan organik partisipatif
- c. Pemberian input sarana produksi berupa benih, saprodi, dan alat pasca panen guna mendukung pengembangan kawasan organik
- d. Bimtek peningkatan kemampuan teknis anggota poktan desa organik
- e. Penandatanganan naskah deklarasi antara Direktur jenderal Perkebunan dengan UPTD se Jawa Timur sebagai bentuk dukungan pengembangan kawasan organik partisipatif komoditas Perkebunan
- f. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Organik Partisipatif Komoditas Perkebunan (Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 141/Kpts/10/2023).

3. Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

Salah satu agenda dalam Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan yang salah satu sarannya yaitu “1000 desa pertanian organik”. Pengembangan 1000 Desa Pertanian Organik sejalan dengan program “*go organic*” yang dicanangkan Kementerian Pertanian.

Pengembangan 1000 desa pertanian organik membuka peluang yang baik bagi komitmen jajaran Kementerian Pertanian untuk memperbaiki lahan kritis dan menumbuhkan petani mandiri, mengingat bahwa seluruh bahan input dalam pertanian organik dipenuhi melalui kearifan lokal.

Menerapkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah lingkungan dengan pola pemenuhan input usaha tani secara mandiri berbasis kepada potensi agroekosistem dan keanekaragaman hayati serta dihasilkannya

komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Realisasi fisik kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan adalah 100%.

Pelaksanaan kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan adalah sebagai berikut:

a) Desa Pertanian Organik di Kelompok Tani Ampel Sari 1 Kabupaten Pasuruan

Lokasi di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan seluas 25 Ha, beranggotakan 30 (tiga puluh) anggota dengan komoditas kopi robusta.



Gambar 25. Sosialisasi Desa Pertanian Organik di Kelompok Tani Ampelsari Makmur 1

Kegiatan sosialisasi ke petani dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan komitmen dari seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.

Dalam budidaya kopi di Pasuruan, petani menghadapi kendala yaitu kurangnya SDM pada proses pasca panen kopi.

b) Sertifikasi Kelompok Tani Java Ijen Kabupaten Bondowoso

Sertifikasi organik untuk produk pertanian memiliki arti penting untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen. Seperti yang diketahui, harga produk pangan organik relative lebih tinggi jika dibandingkan

dengan produk-produk pangan yang dibudidayakan menggunakan teknik pertanian pola kimia. Sertifikat organik untuk produk pertanian perlu diurus agar memperoleh pengakuan bahwa dari pertanian yang telah diusahakan benar-benar telah terbebas dari berbagai residu kimia.

Adapun lembaga yang berwenang untuk merilis sertifikat organik adalah Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Manfaat yang diperoleh dengan memiliki sertifikasi produk pertanian organik, pengakuan tentang hasil pertanian kita adalah 100% organik, tentunya akan lebih mudah diterima pasar, baik itu pasar domestik atau mancanegara. Dengan adanya sertifikasi organik dari LSO terkait, maka standar produk pangan kita mendapat pengakuan SNI atau bahkan ISO.

Sertifikasi di kelompok Tani Java Ijen Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dilaksanakan tanggal 15-17 Maret 2023. Pelaksanaan sertifikasi ini bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) PT. Icert Agridaya International Bogor. Ditugaskan sebagai auditor Akbar Fauzi. Metode sertifikasi dilakukan dengan wawancara, reviu dokumen, inspeksi kebun, gudang dan tempat produksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk mendapatkan bukti yang objektif.



Gambar 9. Sertifikat organik Poktan Java Ijen

Setelah hasil temuan disampaikan oleh LSO dilaksanakan tindakan perbaikan oleh ICS Poktan Java Ijen dan pendamping desa organik selama 3 bulan. Sertifikat organik SNI terbit tanggal 10 Agustus 2023 sedangkan EU/COR terbit tanggal 04 Agustus 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan terbit aturan baru yang ditetapkan tahun 2023 dari EU/COR, sehingga beberapa lahan petani harus dikeluarkan, karena dianggap mampu untuk mensertifikasi secara mandiri

c) Bimbingan Teknis Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik

Sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan diskusi dengan kelompok tani, pada tanggal 30-31 Mei 2023 dilaksanakan bimbingan teknis di Gapoktan Dholo Indah Jugo.



Gambar 26. Pelatihan Pembuatan Pakan Silase dan Pengendalian OPT Tanaman Kopi

Peserta dalam bimtek tersebut adalah Gapoktan Dholo Indah Jugo, Pendamping dan PPL, Tim Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Tim BBPPTP Surabaya, Perwakilan Polres Kediri dan Perwakilan Kejaksaan dengan tujuan kolaborasi untuk membina kelompok tani.

Ada 2 sesi dalam bimbingan teknis tersebut. Sesi pertama yaitu pemberian materi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dengan tema Pembuatan Pakan Buatan Silase. Pemberian materi tersebut bertujuan untuk mensiasati persediaan

pakan musim kemarau dan menampung kelebihan hijauan ternak pada musim penghujan agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sesi kedua yaitu pemberian materi dari BBPPTP Surabaya dengan tema Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi. Pemberian materi tersebut bertujuan agar petani mampu mengelola OPT yang ada dikebun, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi.

Bimtek dilaksanakan dengan pemberian teori dan praktek. Harapannya petani bisa melakukan sendiri untuk diaplikasikan pada kebun dan ternak. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kurangnya semangat petani untuk merawat kebun karena tanaman kopi merupakan tanaman sampingan yang dibudidayakan dan bukan sumber penghasilan utama petani.

d) Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kopi dan Penyerahan Bantuan Alat Pasca Panen

Dalam rangka meningkatkan kualitas produksi kopi di kelompok Tani Ampel Sari Makmur I Pasuruan, BBPPTP Surabaya melaksanakan pelatihan pasca panen kopi pada tanggal 29 Agustus 2023.

Bimbingan Teknis dibagi 2 tahap yaitu penyampaian materi dan praktek roasting kopi. Diharapkan petani mampu menghasilkan cita rasa yang lebih baik, sehingga nilai jualnya lebih tinggi.



Gambar 27. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kopi dan Penyerahan Bantuan Alat Pasca Panen di kelompok Tani Ampel Sari Makmur I

Bantuan input sarana produksi untuk tahun 2023 berupa alat pasca panen kopi terdiri dari 1 unit pulper, 1 unit huller, 1 unit roaster dan 1 unit grinder, 4 unit alat pemotong rumput dan 2 unit sprayer sudah dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani.

Realisasi fisik kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan adalah 100%.

4. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun

Kegiatan pembangunan demplot mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk membangun demplot mitigasi dan adaptasi kekeringan dalam menghadapi dampak negatif dari kekeringan dan mengurangi emisi gas rumah kaca pada subsektor perkebunan di daerah rawan kekeringan.

Sasaran kegiatan adalah terbangunnya demplot mitigasi dan adaptasi kekeringan pada lahan perkebunan yang rawan kekeringan.

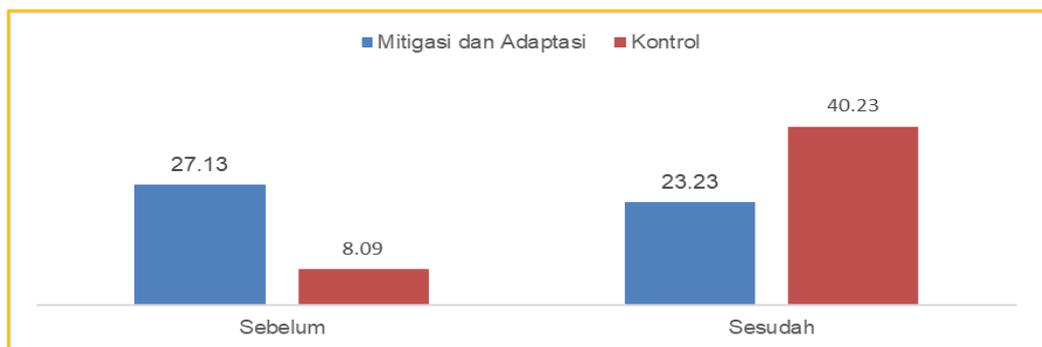
Paket bantuan yang diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan pembangunan demplot mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berupa mesin pemotong rumput, mesin lubang biopori, alat pencacah kompos, alat pengayak kompos, kereta sorong, pembangunan embung/penampung air (250m³) dengan pagar pengaman, bangunan rumah kompos, bangunan kandang ternak, dekomposer, ternak kambing (22 betina 3 jantan), terpal dan obat ternak.

Kegiatan dilaksanakan di Kelompok Tani Among Kismo VIII Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dengan luas areal 20 Ha dengan ketinggian 600-1000 mdpl, sangat baik untuk perkembangan kopi robusta.

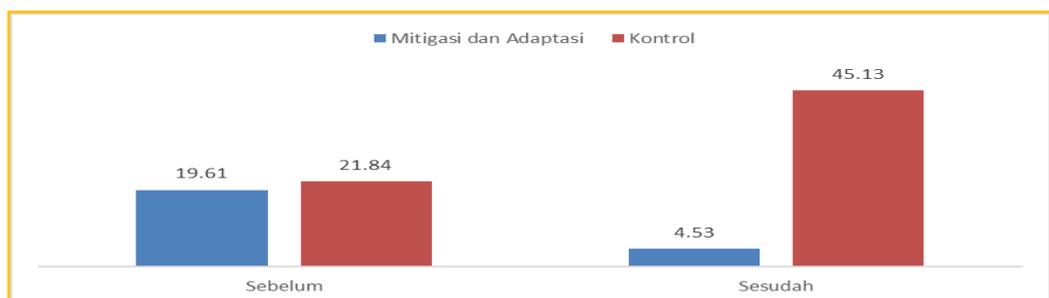
Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan adalah 1) Petani telah mengaplikasikan paket kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di kebun masing-masing; 2) Menurunnya dampak yang lebih besar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim (kekeringan) pada tanaman kopi di

lokasi kegiatan; 3) Menjaga produktivitas tanaman kopi di lokasi kegiatan; 4) Pemahaman/pengetahuan petani di lokasi kegiatan tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim semakin baik; 5) Pemahaman/pengetahuan petani di lokasi kegiatan tentang pengelolaan OPT tanaman kopi semakin baik.

Berdasarkan hasil Uji T persentase serangan PBKo dan persentase serangan karat daun kopi dapat diketahui bahwa pada tanaman kopi dengan perlakuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim memiliki perbedaan yang nyata apabila dibandingkan dengan perlakuan kontrol $t_{hitung} > t_{tabel}$. Persentase serangan PBKo dan persentase serangan karat daun kopi pada tanaman kontrol lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perlakuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Grafik 1 dan 2).



Grafik 21. Rata-rata persentase serangan PBKo pada sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim



Grafik 22. Rata-rata persentase serangan karat daun kopi (Hemileia sp.) pada sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim



Gambar 28. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kopi dan Penyerahan Bantuan Alat Pasca Panen di kelompok Tani Ampel Sari Makmur I



Gambar 29. Bantuan kandang dan ternak kambing



Gambar 30. Bantuan rumah kompos dan dekomposer



Gambar 31. Bantuan pencacah dan pengayak kompos



Gambar 32. Bantuan mesin lubang biopori dan pembuatan lubang biopori



Gambar 33. Bantuan kereta sorong, pembuatan rorak dan pemangkas



Gambar 34. Bantuan Mesin Pemotong Rumput dan terpal



Gambar 35. Bantuan obat-obatan ternak

Realisasi fisik kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah 100%, realisasi anggaran Pembangunan Demplot Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebesar 99.39% dan realisasi anggaran Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan sebesar 98.28%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat sedikit perbedaan terkait pembangunan embung. Pembangunan embung pada tahun 2023 dilengkapi dengan pagar pengaman dengan tujuan untuk menjaga keamanan bagi petani atau masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas disekitar embung, karena kedalaman embung ± 2 m. Dari segi tata letak, embung yang dibangun pada tahun 2022 berada dibawah kawasan kebun kopi sehingga membutuhkan pompa untuk operasional pengairan sedangkan embung yang dibangun pada tahun 2023 berada diatas kawasan kebun kopi.

C. Capaian Kinerja Tema Prioritas Nasional (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Pertanian)

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pengembangan sektor pertanian, tidak hanya berorientasi

pada peningkatan produksi atau ketersediaan komoditas untuk konsumsi pangan. Namun lebih daripada itu, sektor pertanian juga memiliki peran besar dalam menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan program dari Pemerintah yang dituangkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Setiap Kementerian/Lembaga diberikan tugas telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, tak terkecuali Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian menjalankan program penghapusan kemiskinan ekstrem melalui sektor pertanian.

Program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada sektor pertanian adalah dengan cara:

1. memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin ekstrem;
2. menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani; dan
3. melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Rincian Output kegiatan pendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Pertanian yang dilaksanakan di BBPPTP Surabaya adalah rincian output 5890.RBK.001 Nurseri dan 1779.RAI.002 Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.

a. Nurseri

Pendekatan program kerja pada rincian output nurseri untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah dengan pemberian upah tenaga kerja (HOK) pada kegiatan operasional nurseri dan kegiatan produksi benih tanaman perkebunan.



Gambar 36. Pemberdayaan HOK pada Kegiatan Pemupukan Tebu di Nurseri Polbangtan Malang

Realisasi total HOK pada kegiatan nurseri adalah Rp 1.181.530.000 atau 88,01% dari total pagu anggaran Rp 1.342.470.000,-, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 36. Realisasi HOK Tahun 2023 Kegiatan Nurseri

No.	Nursery	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Operasional nurseri Kota Bima	6.080.000	6.080.000	100%
2.	Operasional nurseri Kabupaten Batang Jawa Tengah	467.320.000	408.940.000	87,51%
3.	Operasional nurseri Polbangtan Malang	271.700.000	245.115.000	90,22%
4.	Operasional nurseri Bombana SulSel	147.690.000	127.350.000	86,23%
5.	Operasional nurseri Gekbrong Cianjur	369.750.000	331.160.000	89,56%
6.	Produksi Benih Kelapa di BPTP NTB	12.240.000	7.760.000	63,40%
7.	Lanjutan Produksi Benih di Jawa Timur	8.190.000	2.340.000	28,57%
8.	Produksi Benih Kopi Arabika di Jawa Barat	59.500.000	52.785.000	88,71%
	Jumlah	1.342.470.000	1.181.530.000	88,01%

Rincian realisasi HOK kegiatan nurseri pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan operasional nurseri Kota Bima yang melibatkan tenaga kerja (HOK) antara lain penyiangan, pemupukan, seleksi bibit, pengisian

polibag, penerimaan bibit, dan penyopakan dan perlakuan benih. HOK pada kegiatan ini terealisasi 100% dari pagu anggaran yang ada yaitu Rp 6.080.000,-. Rata-rata HOK per orang di nurseri Kota Bima adalah Rp 80.000,-.

- 2) Kegiatan operasional nurseri Kabupaten Batang yang melibatkan tenaga kerja (HOK) antara lain pemeliharaan kebun induk, pemupukan, pengendalian OPT, pembersihan lahan, pemindahan benih dan pengaturan, pengisian polibag, penerimaan benih, penyemaian, pengairan, penyiangan, penyopakan dan perlakuan benih kelapa, penyiapan lahan untuk breeder seed untuk kebun induk dan penanaman breeder seed untuk kebun induk. HOK pada kegiatan ini terealisasi 87,51% atau Rp 408.940.000,- dari total pagu anggaran Rp 467.320.000,-. Rata-rata HOK per orang di nurseri Kota Bima adalah Rp 70.000,-.
- 3) Kegiatan operasional nurseri Polbangtan Malang yang melibatkan tenaga kerja (HOK) antara lain pemeliharaan kebun induk, pemupukan, pengendalian OPT, pembersihan lahan, pemindahan benih dan pengaturan, pengisian polibag, penerimaan benih, penyemaian, pengairan, penyiangan, penyopakan dan perlakuan benih kelapa, penyiapan lahan untuk breeder seed untuk kebun induk dan penanaman breeder seed untuk kebun induk. HOK pada kegiatan ini terealisasi 90,22% atau 245.115.000,- dari total pagu anggaran Rp 271.700.000,-. Rata-rata HOK per orang di nurseri Kota Bima adalah Rp 65.000,-.
- 4) Kegiatan operasional nurseri Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara yang melibatkan tenaga kerja (HOK) antara lain pemeliharaan kebun induk, pemupukan, pengendalian OPT, pembersihan lahan, pemindahan benih dan pengaturan, pengisian polibag, penerimaan benih, penyemaian, pengairan, penyiangan, penyopakan dan perlakuan benih kelapa, penyiapan lahan untuk breeder seed untuk kebun induk dan penanaman breeder seed untuk kebun induk. HOK pada kegiatan ini terealisasi 86,23% atau

127.350.000,- dari total pagu anggaran Rp 147.690.000,-. Rata-rata HOK per orang di nurseri Kota Bima adalah Rp 90.000,-.

- 5) Kegiatan operasional nurseri Gekbrong Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang melibatkan tenaga kerja (HOK) antara lain pemeliharaan kebun induk, pemupukan, pengendalian OPT, pembersihan lahan, pemindahan benih dan pengaturan, pengisian polibag, penerimaan benih, penyemaian, pengairan, penyiangan, penyopakan dan perlakuan benih kelapa, penyiapan lahan untuk breeder seed untuk kebun induk dan penanaman breeder seed untuk kebun induk. HOK pada kegiatan ini terealisasi 89,56% atau 331.160.000,- dari total pagu anggaran Rp 369.750.000,-. Rata-rata HOK per orang di nurseri Kota Bima adalah Rp 85.000,-.
- 6) Kegiatan produksi benih kelapa di BPTP NTB yang melibatkan tenaga kerja (HOK) antara lain pemeliharaan kebun induk, pemupukan, pengendalian OPT, pembersihan lahan, pemindahan benih dan pengaturan, pengisian polibag, penerimaan benih, penyemaian, pengairan, penyiangan, penyopakan dan perlakuan benih kelapa, penyiapan lahan untuk breeder seed untuk kebun induk dan penanaman breeder seed untuk kebun induk. HOK pada kegiatan ini terealisasi 63,40% atau 7.760.000,- dari total pagu anggaran Rp 12.240.000,-. Rata-rata HOK per orang di nurseri Kota Bima adalah Rp 80.000,-.
- 7) Kegiatan lanjutan Produksi Benih di Jawa Timur yang melibatkan tenaga kerja (HOK) antara lain pemeliharaan kebun induk, pemupukan, pengendalian OPT, pembersihan lahan, pemindahan benih dan pengaturan, pengisian polibag, penerimaan benih, penyemaian, pengairan, penyiangan, penyopakan dan perlakuan benih kelapa, penyiapan lahan untuk breeder seed untuk kebun induk dan penanaman breeder seed untuk kebun induk. HOK pada kegiatan ini terealisasi 28,57% atau 2.340.000,- dari total pagu anggaran Rp 8.190.000,-. Rata-rata HOK per orang di nurseri Kota Bima adalah Rp 65.000,-.

8) Kegiatan produksi benih kopi arabika di Jawa Barat yang melibatkan tenaga kerja (HOK) antara lain pemeliharaan kebun induk, pemupukan, pengendalian OPT, pembersihan lahan, pemindahan benih dan pengaturan, pengisian polibag, penerimaan benih, penyemaian, pengairan, penyiangan, penyopakan dan perlakuan benih kelapa, penyiapan lahan untuk breeder seed untuk kebun induk dan penanaman breeder seed untuk kebun induk. HOK pada kegiatan ini terealisasi 88,71% atau 52.785.000,- dari total pagu anggaran Rp 59.500.000,-. Rata-rata HOK per orang di nurseri Kota Bima adalah Rp 85.000,-/hari.

Selain itu, HOK yang disalurkan kepada tenaga kerja diluar kegiatan nurseri yaitu pada kegiatan perlindungan tanaman Perkebunan adalah sebesar Rp 23.500.000,-. Dengan demikian, total secara keseluruhan pagu anggaran HOK yang bersifat bantuan pemerintah adalah 1.365.970.000,- dengan total realisasinya sebesar Rp 1.205.030.000,- atau 88,22%. Rincian kegiatan nurseri untuk mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terlampir (Lampiran 3).

b. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan

Penanganan OPT dengan cara pengendalian OPT tanaman perkebunan dapat meningkatkan hasil produksi tanaman menjadi lebih baik, karena pengendalian OPT menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi tanaman perkebunan.

Aplikasi pengendalian OPT tanaman perkebunan menggunakan pestisida nabati pada masing-masing objek tanaman dan di masing-masing wilayah menunjukkan penurunan intensitas serangan OPT. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian OPT tanaman perkebunan dapat meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman Perkebunan.

Peningkatan produktifitas dan hasil produksi hasil perkebunan berdampak pada peningkatan pendapatan petani kebun. Kenaikan pendapatan petani kebun merupakan target dari program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah.

Kegiatan pengendalian OPT tanaman perkebunan pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BBPPTP Surabaya adalah sebagai berikut:

1) Pengendalian OPT Tanaman Tebu di Kabupaten Kediri

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan gerakan pengendalian uret tebu pada tanaman tebu melalui pengendalian mekanis dan pemasangan lampu perangkap dan jaring sehingga rakitan teknologi ini dapat diaplikasikan oleh petani untuk mengendalikan OPT dan mengurangi kerusakan pada pertanaman tebu.

Kegiatan meliputi Pra Sosialisasi, Sosialisasi dan Aksi Gerakan Pengendalian Mekanis, Pengendalian Mekanis, Pemasangan Jaring dan Lampu Perangkap, Pengamatan dan Evaluasi.

Hasil Kegiatan Pengendalian mekanis uret memperoleh larva uret sebanyak 8.980 ekor dengan hasil perhitungan keperidian 15–80 per imago betina, maka dapat memutus siklus **hidup** dan mengendalikan/menekan populasi uret sebanyak 107.760-574.720 ekor pada keturunan/tahun berikutnya.

Pengendalian uret dengan pemasangan jaring memperoleh imago uret sebanyak 128.106 ekor dengan hitungan keperidian 15–80 per imago betina maka dapat memutus siklus hidup dan mengendalikan/menekan populasi uret sebanyak 1.537.272 - 8.198.784 ekor pada keturunan/tahun berikutnya.



Gambar 37. Pengendalian OPT Tanaman Tebu di Kabupaten Kediri

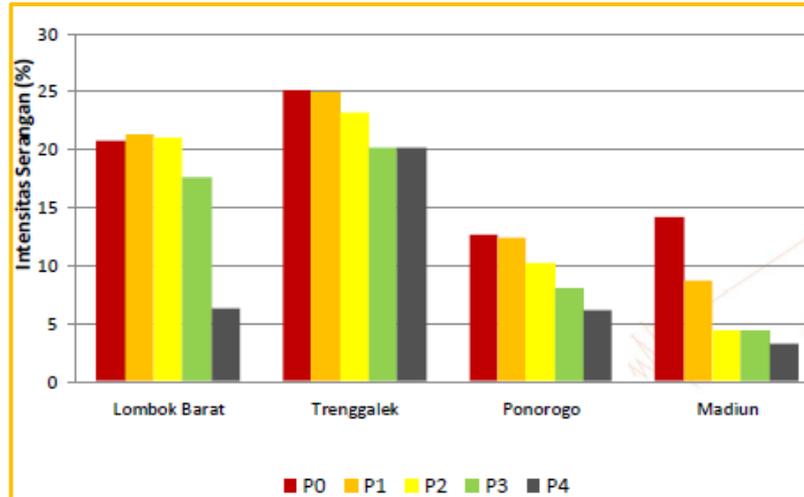
2) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati Pada Tanaman Kakao (210 ha)

Pengendalian OPT tanaman perkebunan dengan pestisida nabati pada tanaman kakao bertujuan untuk membantu/mendorong pekebun dalam melakukan pengendalian OPT perkebunan secara terpadu pada pusat-pusat serangan agar intensitas serangan OPT perkebunan menurun pada lokasi pengendalian.

Indikator keberhasilan kegiatan adalah adalah:

- a. Menurunnya intensitas serangan OPT perkebunan pada lokasi pengendalian.
- b. Pekebun mampu menerapkan PHT di kebunnya.

Lokasi kegiatan pengendalian OPT tanaman perkebunan dengan pestisida nabati pada tanaman kakao adalah kabupaten Lombok Barat (60 Ha), Trenggalek (50 Ha), Ponorogo (50 Ha) dan Madiun (50 Ha). Bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat berupa 4.200 liter pestisida nabati.



Grafik 23. Perkembangan intensitas serangan penggerek buah kakao sebelum dan sesudah pengendalian menggunakan pestisida nabati di setiap lokasi kegiatan

Aplikasi pestisida nabati pada tanaman kakao di masing-masing lokasi menunjukkan terjadinya penurunan intensitas serangan hama Penggerek Buah Kakao. Penurunan intensitas serangan terjadi di seluruh lokasi yang menerima perlakuan pestisida nabati.



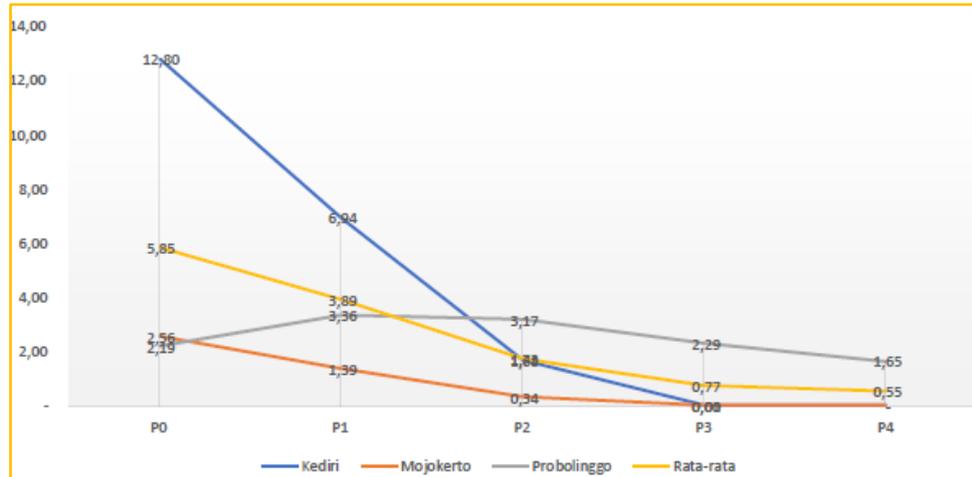
Gambar 38. Aplikasi pestisida nabati pada tanaman kakao



Gambar 39. Penyerahan Bantuan Pestisida Nabati

3) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati Pada Tanaman Tebu (150 ha)

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kediri (50 Ha), Mojokerto (50 Ha), dan Probolinggo (50 Ha). Bantuan yang diberikan berupa 3.000 liter Pestisida Nabati.



Grafik 24. Grafik 3. Fluktuasi serangan hama penggerek pucuk

Aplikasi pestisida nabati pada tanaman tebu di masing-masing lokasi menunjukkan terjadinya penurunan intensitas serangan hama Penggerek Pucuk Tebu sebagaimana dijelaskan pada grafik Fluktuasi serangan hama penggerek pucuk. Penurunan intensitas serangan terjadi diseluruh lokasi yang menerima perlakuan pestisida nabati.



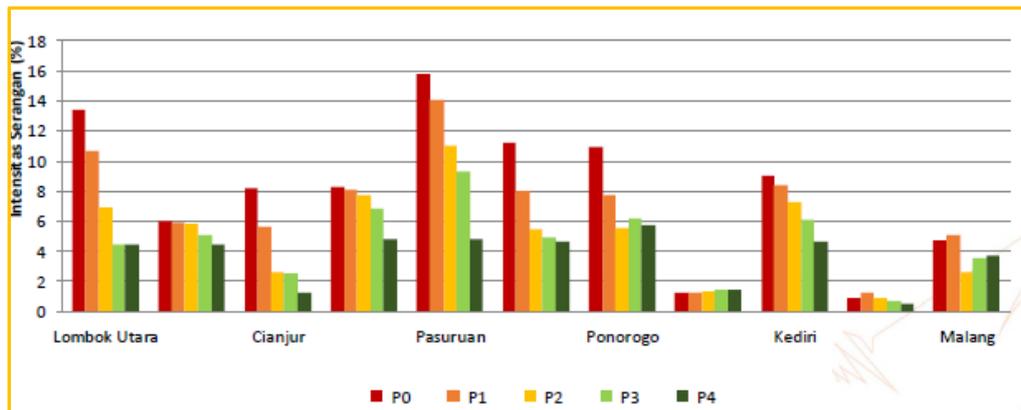
Gambar 40. Penyerahan Bantuan Pestisida Nabati untuk Tanaman Tebu



Gambar 41. Pengamatan intensitas serangan OPT Tebu

4) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati Pada Tanaman Kopi (650 ha)

Lokasi pengendalian dengan sasaran OPT Penggerek Buah Kopi (PBKo) dilakukan Lombok Utara (60 Ha), Bandung (60 Ha), Cianjur (60 Ha), Probolinggo (60 Ha), Pasuruan 50 Ha), Lumajang (50 Ha), Ponorogo (50 Ha), Nganjuk (50 Ha), Kediri (50 Ha), Bondowoso (50 Ha) dan Malang (50 Ha). Lokasi pengendalian dengan OPT sasaran Karat Daun dilakukan di Probolinggo (60 Ha). Total bantuan pestisida nabati yang diberikan kepada masyarakat adalah 12.280 liter.

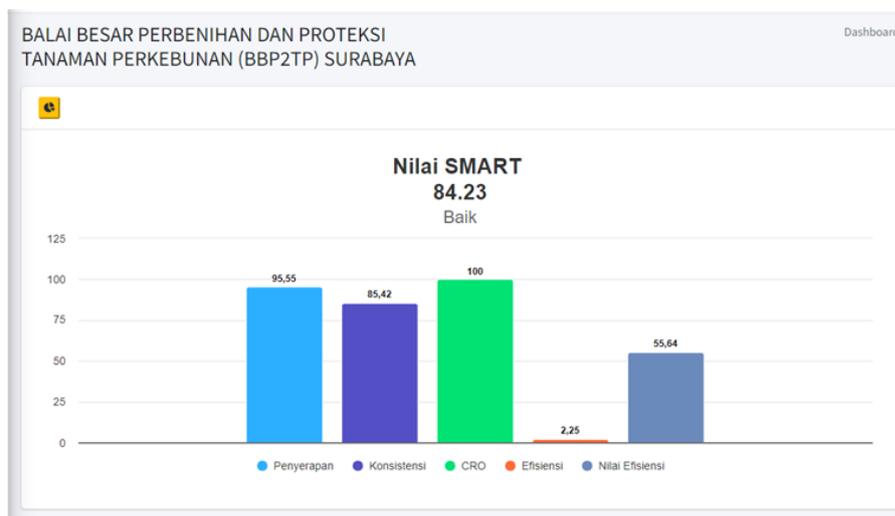


Grafik 25. Perkembangan intensitas serangan PBKo sebelum dan sesudah pengendalian menggunakan pestisida nabati di setiap lokasi kegiatan

Aplikasi pestisida nabati pada tanaman kopi di masing-masing lokasi menunjukkan terjadinya penurunan intensitas serangan hama Penggerek Buah Kopi dan Karat Daun Kopi. Data tersebut dijelaskan pada grafik Perkembangan intensitas serangan PBKo sebelum dan

sesudah pengendalian menggunakan pestisida nabati di setiap lokasi kegiatan. Penurunan intensitas serangan terjadi di seluruh lokasi yang menerima perlakuan pestisida nabati.

D. Nilai Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2023, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas



Grafik 26. Nilai Kinerja BBPPTP Surabaya pada Aplikasi SMART 2023

Nilai kinerja (NK) BBPPTP Surabaya Tahun 2023 sebesar 84,23 dan masuk dalam kategori BAIK. Capaian nilai kinerja menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran di BBPPTP Surabaya adalah akuntabel dan berkualitas.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Instansi Pemerintah diwajibkan mengevaluasi dan menganalisis kinerja berdasarkan aspek sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran);
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Untuk mengukur setiap indikator kinerja sasaran program (IKSP) dalam perjanjian kinerja (PK) berpedoman pada manual IKU yang ditetapkan pada saat penyusunan IKSP lingkup Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk mengukur efisiensi (E) pada satuan kerja digunakan formula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- ERO : efisiensi RO tingkat satuan kerja
 AARO_i : alokasi anggaran RO i
 RARO_i : realiasi anggaran RO i
 CRO_i : capaian RO i

Sedangkan untuk mengukur Nilai Efisiensi (NE) digunakan formula sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai efisiensi
 E : Efisiensi

Dari formula tersebut berarti suatu kegiatan dikatakan efisien jika memiliki nilai efisiensi lebih besar sama dengan 50% dan jika lebih besar dari 100% dikatakan efisien tetapi perlu penjelasan lebih lanjut karena dianggap anomali.

1. Sasaran terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan.

Target dan realisasi indikator jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan tahun 2023 beserta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Target dan Capaian Sasaran Terkendalinya OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan

Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	1-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan	Layanan	6	6	100%	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi proteksi tanaman perkebunan sebesar 100% dari target yang ditetapkan atau masuk kategori Berhasil.

Capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan dilihat berdasarkan jumlah layanan target indikator kinerja, yaitu:

- a) Pengujian Mutu Agens Pengendali Hayati (APH)
- b) Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat
- c) Layanan Penyediaan Isolat Agens Pengendali Hayati (APH)

- d) Layanan Penyediaan Formulasi APH dan Pupuk Hayati
- e) Layanan Identifikasi OPT dan Rekomendasi Pengelolaan OPT
- f) Layanan Penyediaan Data dan Informasi OPT

Dengan capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi proteksi tanaman perkebunan yang diberikan kepada pengguna jasa bisa dimanfaatkan dengan baik. Diharapkan dengan bantuan sarana yang diberikan bisa meningkatkan pengendalian penyebaran OPT khususnya pada tanaman perkebunan.

a) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya

Realisasi capaian kinerja Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 38. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Rekomendasi Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan

IKSK	Target	Satuan	Realisasi				2023 dibanding tahun sebelumnya		
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan	6	Layanan	-	6	6	6	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan tahun 2023 adalah 6 layanan dengan persentase capaian 100%.

Jumlah dan persentase capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 adalah sama atau tidak melebihi target yang ditetapkan.

BBPPTP Surabaya dapat mempertahankan kinerjanya dengan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat terutama pengguna jasa sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 belum dapat diukur karena belum ada indikator kinerja sasaran kegiatan jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan. Capaian kinerja dapat terus dipertahankan karena dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta SDM yang kompeten pada BBPPTP Surabaya.

b) Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja pada tahun 2023 IKSK jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan dibandingkan dengan target jangka menengah perencanaan strategis jangka menengah organisasi telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 6 (enam) layanan dengan persentase sebesar 100%. Realisasi tersebut sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 80% dari target jangka menengah 2020-2024.

c) Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan tahun 2023 masuk dalam kategori berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sarana perkebunan yang diberikan kepada kelompok sasaran dimanfaatkan secara optimal dan tetap.

Keberhasilan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur
- 2) Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait

dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.

- 3) Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK) yang telah dibuat.
- 4) Pembinaan yang terus dilakukan ke ULPPTP di wilayah kerja BBPPTP Surabaya baik melalui kunjungan ataupun melalui media elektronik seperti telpon, email, atau melalui aplikasi meeting online.
- 5) SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan antara lain:

- 1) Terdapat kerusakan alat dan bahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan uji Laboratorium.
- 2) Pengaruh kondisi cuaca yang mempengaruhi keberadaan OPT, sehingga dapat merubah ROPAK.
- 3) Tidak semua stakeholder memberikan respon yang baik terhadap output kegiatan.
- 4) Data serangan OPT dari UPTD sering terlambat masuk yang disebabkan keterbatasan SDM Pengumpul Data di ULPPTP, sehingga hal ini menghambat proses rekapitulasi data OPT.

Solusi/upaya tindak lanjut terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan adalah sebagai berikut:

- 1) Menambah anggaran perawatan terhadap alat-alat dan bahan Laboratorium.
- 2) Melaksanakan sosialisasi secara rutin terhadap stakeholder agar dapat mengetahui manfaat output kegiatan dari BBPPTP Surabaya.
- 3) Memaksimalkan SDM yang telah ada dan membuat inovasi untuk mempercepat proses bisnis rekapitulasi data OPT dari UPTD melalui pengumpul data di ULPPTP.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 39. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan

No.	Kegiatan	Target			Realisasi					E	NE
		Keuangan (Rp)	Fisik		Keuangan (Rp)	%	Fisik				
			Vol	Sat			Vol	Sat	%		
1.	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	977.575.000	4	Rekomendasi	967.089.641	98,93	4	Rekomendasi	100	1,073	52,681
2.	Perangkat Perlindungan Perkebunan	44.700.000	1	Unit	44.615.000	99,81	1	Unit	100	0,190	50,475
3.	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	950.780.000	2	Unit	948.320.875	99,74	2	Unit	100	0,259	50,647
4.	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	320.400.000	3	produk	319.590.000	99,75	3	produk	100	0,253	50,632
5.	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	435.975.000	20	Ha	431.766.352	99,03	20	Ha	100	0,965	52,413
6.	Area Penangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	6.774.419.000	1.060	Ha	6.717.543.255	99,16	1.060	Ha	100	0,840	52,099

Kegiatan dikatakan efisien apabila memiliki Nilai Efisiensi (NE) > 50 s/d 100, dimana nilai paling efisien di angka NE=50. Kegiatan juga dikatakan efisien bila memiliki Efisiensi (E) antara -20 sd 20 dimana paling efisien di angka E=0.

Dari tabel di atas diketahui nilai efisiensi sasaran kegiatan Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan rata-rata sebesar 51,49% dan efisiensi 0,596 (efisien), dengan rincian pencapaian sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dari pagu anggaran Rp 977.575.000,- terealisasi Rp 967.089.641,- atau 98,93% dengan capaian fisik 4 rekomendasi (100%), dengan nilai efisiensi 52,682 (efisien).
- 2) Perangkat Perlindungan Perkebunan dari pagu anggaran Rp 44.700.000,- terealisasi Rp 44.615.000,- atau 99,81% dengan capaian fisik 1 (satu) unit (100%), dengan nilai efisiensi 50,475 (efisien).
- 3) Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dari pagu anggaran Rp 950.780.000,- terealisasi 948.320.875 atau 99,74% dengan capaian fisik 2 (dua) paket (100%), dengan nilai efisiensi 50,647% (efisien).
- 4) Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dari pagu anggaran Rp 1320.400.000,- terealisasi Rp 319.590.000,- atau 99,75% dengan capaian fisik 3 produk (100%), dengan realisasi nilai efisiensi 50,632% (efisien).
- 5) Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dari pagu anggaran Rp 435.975.000,- terealisasi Rp 431.766.352,- atau 99,03% dengan capaian fisik 20 ha (100%), dengan nilai efisiensi 52,413% (efisiensi).
- 6) Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dari pagu anggaran Rp 6.774.419.000,-

terrealisasai Rp 6.717.543.255,- atau 99,16% dengan capaian fisik 1.060 ha (100%), dengan nilai efisiensi 52,099% (efisien).

2. Sasaran tersedianya benih tanaman perkebunan

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman perkebunan. Target dan realisasi indikator jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman perkebunan tahun 2023 beserta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40. Target dan Capaian Sasaran Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan

Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Tersedianya benih tanaman perkebunan	2-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi perbenihan tanaman Perkebunan	Layanan	6	6	100%	Berhasil

Capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi proteksi tanaman perkebunan dilihat berdasarkan target indikator kinerja, yaitu:

- a) Fasilitasi sertifikasi benih tanaman perkebunan di wilayah kerja
- b) Pengujian mutu benih laboratorium
- c) Pengawasan sumber benih
- d) Pelaksana uji profisiensi laboratorium perbenihan
- e) Pengawasan peredaran benih
- f) Penyiapan sumber benih dan perbanyak benih tanaman perkebunan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi perbenihan tanaman perkebunan sebesar 100% dari target yang ditetapkan atau masuk kategori Berhasil.

Dengan capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi perbenihan tanaman perkebunan yang diberikan kepada pengguna jasa bisa dimanfaatkan dengan baik. Diharapkan dengan bantuan sarana yang diberikan bisa meningkatkan mutu benih tanaman perkebunan.

a) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya

Realisasi jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman perkebunan tahun 2023 adalah 6 layanan dengan persentase capaian 100%.

Jumlah dan persentase capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman perkebunan pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sama atau tidak melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa BBPPTP Surabaya dapat mempertahankan kinerjanya dengan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat terutama pengguna jasa sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2020 belum dapat diukur karena belum ada indikator kinerja sasaran kegiatan jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan.

Tabel 41. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Rekomendasi Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan

IKSK	Target	Satuan	Realisasi				2023 dibanding tahun sebelumnya		
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman perkebunan	6	Layanan	-	6	6	6	-	6	6

b) Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja pada tahun 2023 IKSK jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman perkebunan dibandingkan dengan target jangka menengah perencanaan strategis jangka menengah organisasi telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 6 (enam) layanan dengan persentase sebesar 100%. Realisasi tersebut sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 80% dari target jangka menengah 2020-2024.

c) Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya tahun 2023 masuk dalam kategori berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sarana perkebunan yang diberikan kepada kelompok sasaran dimanfaatkan secara optimal.

Keberhasilan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur
- 2) Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.
- 3) Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK) yang telah dibuat.
- 4) SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan antara lain:

- 1) Kegiatan diluar tugas dan fungsi fungsional maupun organisasi terlalu banyak (kegiatan kawasan tanaman tahunan dan penyegar).
- 2) Refocusing DIPA di beberapa kegiatan rutin menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana.
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan produksi benih tidak sesuai dengan jadwal sehingga menghambat proses kegiatan, misalnya penyerapan HOK yang mengakibatkan kegiatan harus lompat ke tahun berikutnya. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal yang antara lain revisi DIPA yang terjadi pada semester II di beberapa kegiatan sehingga berakibat pada terlambatnya proses pengadaan barang dan proses produksi benih serta salur benih.

Solusi/upaya tindak lanjut terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan jumlah penugasan dengan tugas dan fungsi pegawai dan organisasi.
- 2) Penambahan DIPA untuk kegiatan rutin yang menjadi tugas pokok dari BBPPTP Surabaya, sehingga bisa menjadi lebih maksimal.
- 3) Monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan proses produksi benih terutama dalam tahap penyiapan bahan produksi benih.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 42. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan

No.	Kegiatan	Target			Realisasi						E	NE
		Keuangan	Fisik		Keuangan	%	Fisik					
			Vol	Sat			Vol	Sat	%			
1	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	1.123.468.000	11.159.600	Batang	1.081.490.068	96,26	11.829.002	Batang	105,60	9,735	74,337	
2	Pengujian Mutu Benih	928.000.000	7.439.740	Batang	77.3874.211	83,39	13.466.605	Batang	181	97,617	294,044	
3	Nurseri	15.952.242.000	7	Unit	14.640.088.737	91,77	7	Unit	100,00	8,226	70,564	

Dari tabel di atas diketahui nilai efisiensi sasaran kegiatan Sasaran Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan rata-rata sebesar 146,314 dan efisiensi 38,525 (efisien), dengan rincian pencapaian sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan dari pagu anggaran RP 1.123.468.000,- terealisasi Rp 1.081.490.068,- atau 96,26% dengan capaian fisik 11.829.002 batang (105,60%), dengan efisiensi 74,337 (efisien).
- 2) Pengujian Mutu Benih dari pagu anggaran RP 928.000.000,- terealisasi Rp 773.874.211,- atau 83,39% dengan capaian fisik 13.466.605 batang (181%), dengan efisiensi 97,617 (efisien). Target pengujian mutu benih yang ditetapkan adalah 7.439.740 batang, merupakan satuan untuk benih siap tanam, sedangkan realisasi fisiknya adalah pengujian mutu benih berupa butiran yang dilakukan di laboratorium. Karena adanya perbedaan satuan ini, maka hasil uji mutu benih dari laboratorium dikonversikan ke dalam satuan batang menurut kebutuhan tanam benih per hektar, maka diperoleh realisasi fisik sebesar 13.466.605 batang.
- 3) Nurseri dari pagu anggaran Rp 15.952.242.000,- terealisasi Rp 14.640.088.737 - atau 91,77% dengan capaian fisik 7 unit (100%), dengan efisiensi 70,564 (efisien). Realisasi fisik berupa 1 unit Pembangunan nurseri Kediri dan 6 unit untuk kegiatan operasional nurseri yaitu nurseri Kabupaten Batang, Gekbrong Jawa Barat, Polbangtan Malang, Tuban, Bombana, dan Kota Bima.

3. Sasaran terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien

Sasaran terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi

Tanaman Perkebunan Surabaya. Target dan realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya tahun 2023 beserta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43. Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Yang Efektif dan Efisien

Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	3-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	Skala Likert (1-4)	3	3,55	118%	Berhasil

Capaian kinerja Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien dilihat berdasarkan target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yaitu 3 Skala Likert (1-4) tercapai sebanyak 118% atau nilai index 3,55 dengan nilai IKM adalah 88,85. Nilai IKM BBPPTP Surabaya pada tahun 2023 mengindikasikan Mutu Pelayanan oleh ASN BBPPTP Surabaya **Sangat Baik** atau kategori **A**.

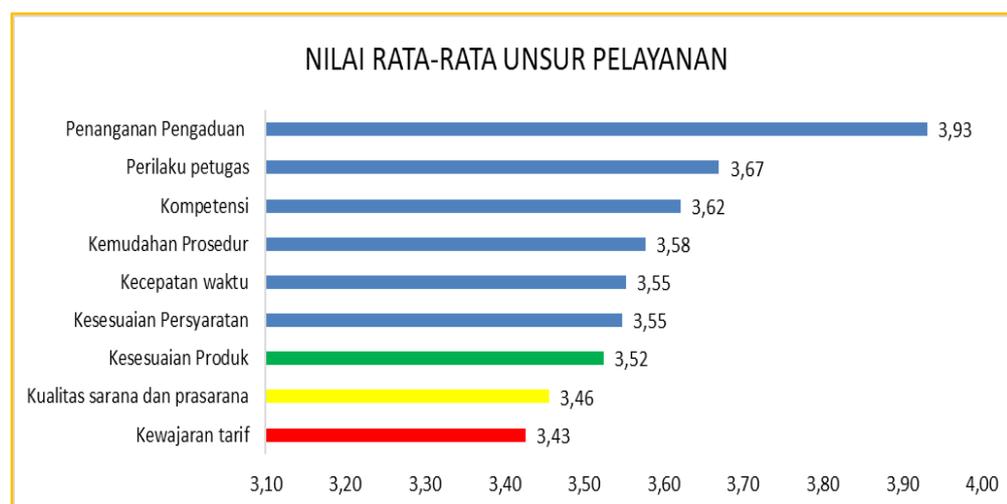
Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Berdasarkan nilai unsur pelayanan pada Indeks Kepuasan Pelanggan kategori penilaian pendapat Pelanggan/responden yaitu kategori baik dan diberi nilai persepsi 4.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Nilai unsur pelayanan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 44. Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2023

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR
1.	Kesesuaian Persyaratan	3,55
2.	Kemudahan Prosedur	3,58
3.	Kecepatan Waktu	3,55
4.	Kewajaran Tarif	3,43
5.	Kesesuaian Produk	3,52
6.	Kompetensi	3,62
7.	Perilaku Petugas	3,67
8.	Sarana dan Prasarana	3,46
9.	Penanganan Pengaduan	3,93

Sedangkan nilai unsur rata-rata pelayanan dengan nilai tertinggi hingga terendah dapat digambarkan sebagaimana grafik di bawah ini:



Grafik 27. Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2023

Nilai unsur pelayanan kewajaran tarif memiliki nilai unsur terendah, kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai unsur terendah kedua dan kesesuaian produk memiliki nilai unsur terendah ketiga.

Untuk meningkatkan nilai unsur terendah sebagaimana grafik di atas maka disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- Nilai unsur kewajaran tarif tidak dapat ditingkatkan, karena Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian setiap

layanan laboratorium dikenakan tarif. Namun demikian, perlu dilaksanakan sosialisasi terhadap pengguna jasa dan responden IKM tentang pelayanan laboratorium Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya berbayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

- b) Nilai unsur kualitas sarana dan prasarana dapat ditingkatkan dengan penyampaian informasi kepada responden bahwasanya sarana dan prasarana layanan BBPPTP Surabaya telah sesuai standar yang ditetapkan.
- c) Nilai kesesuaian produk dapat ditingkatkan dengan cara menyampaikan informasi kepada responden bahwasanya layanan BBPPTP Surabaya telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Hal yang perlu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan BBPPTP Surabaya tahun 2023 adalah perlunya pemberian pemahaman kepada pengguna jasa dan responden oleh petugas, terkait maksud setiap pertanyaan dalam kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan.

a) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya pada tahun 2023 tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Jumlah dan persentase capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 menurun 0,01 dan jika dibandingkan dengan tahun 2021

naik 0.02. Penurunan dan kenaikan nilai tersebut masih dalam batas wajar dan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas pelayanan BBPPTP Surabaya.

Tabel 45. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya

IKSK	Target	Satuan	Realisasi				2023 dibanding tahun sebelumnya		
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	3	Skala Likert (1-4)	3,41	3,53	3,56	3,55	-	-	
Nilai IKM			85,30 Kategori B (Baik)	88,33 Kategori A (Sangat Baik)	89,01 Kategori A (Sangat Baik)	88,85 Kategori A (Sangat Baik)	3,99 %	0,58 %	- 0.18%

Realisasi kinerja pada tahun 2022 IKSK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dibandingkan dengan IKM pada tahun 2020 meningkat 3,99% sedangkan jika dibandingkan dengan IKM pada tahun 2021 meningkat 0,58% dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan -0,18%. Namun penurunan tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan kualitas pelayanan BBPPTP Surabaya kepada masyarakat.

BBPPTP Surabaya memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama pengguna jasa.

Secara umum kualitas layanan BBPPTP Surabaya kepada masyarakat adalah sangat baik dengan kategori A.

b) Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja pada tahun 2023 IKSK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dibandingkan dengan target jangka menengah perencanaan strategis jangka menengah organisasi telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 3,55 Skala Likert (1-4) dengan persentase sebesar 118%. Realisasi tersebut sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 93,67% dari target jangka menengah 2020-2024.

c) Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan BBPPTP Surabaya yang diberikan pada tahun 2023 masuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa BBPPTP Surabaya memiliki komitmen tinggi terhadap pemenuhan layanan publik.

Keberhasilan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur.
- 2) Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.
- 3) Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai ROPAK yang telah dibuat.
- 4) Pembinaan yang terus dilakukan ke ULPPTP di wilayah kerja

BBPPTP Surabaya baik melalui kunjungan ataupun melalui media elektronik seperti telpon, email, atau melalui aplikasi meeting online.

- 5) SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan antara lain:

- 1) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.
- 2) Keterlambatan pembuatan laporan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Kendala ini dapat diselesaikan dengan evaluasi kegiatan setiap bulan oleh masing-masing penanggung jawab kelompok kerja.
- 3) Keterbatasan SDM yang menangani kegiatan mengakibatkan beberapa pegawai merangkap pekerjaan.
- 4) Refocusing DIPA di beberapa kegiatan rutin menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana.

Solusi/upaya tindak lanjut terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan BBPPTP Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pelaksanaan kegiatan, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana agar ROPAK dapat dilaksanakan secara konsisten.
- 2) Melaksanakan konseling untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing penanggung jawab kegiatan.
- 3) Menjaga dan meningkatkan kompetensi SDM pada BBPPTP Surabaya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai

kebutuhan, job enrichment, melakukan rotasi kerja, membangun teamwork yang solid, membuat area kerja yang nyaman dan bahagia serta memberikan reward dan punishment secara seimbang.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 46. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

No.	Kegiatan	Target			Realisasi					E	NE
		Keuangan	Fisik		Keuangan	%	Fisik				
			Vol	Sat			Vol	Sat	%		
1.	Layanan BMN	273.300.000	1	Layanan	267.480.418	97,87%	1	Layanan	100,00	2,129	55,323
2.	Layanan Umum	1.513.512.000	1	Layanan	1.479.993.639	97,79%	1	Layanan	100,00	2,215	55,537
3.	Layanan Perkantoran	11.402.413.000	1	Layanan	11.275.464.175	98,89%	1	Layanan	100,00	1,113	52,783
4.	Layanan Manajemen SDM	408.200.000	149	Orang	372.532.190	91,26%	136	Orang	91,28	0,013	50,032
5.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	584.140.000	1	Dokumen	583.199.783	99,84%	1	Dokumen	100,00	0,161	50,402
6.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	221.400.000	1	Dokumen	220.167.895	99,44%	1	Dokumen	100,00	0,557	51,391
7.	Layanan Manajemen Keuangan	180.000.000	1	Layanan	179.388.057	99,66%	1	Layanan	100,00	0,340	50,850

Dari tabel di atas diketahui nilai efisiensi sasaran kegiatan Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien rata-rata sebesar 52,331% dan efisiensi 0,933 (efisien), dengan rincian pencapaian sebagai berikut:

- 1) Layanan BMN dari pagu anggaran Rp 273.300.000,- terealisasi Rp 267.480.418,- atau 97,87% dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 2,129 dan efisiensi 55,323 (efisien).
- 2) Layanan umum dari pagu anggaran Rp 1.513.512.000,- terealisasi Rp 1.479.993.639,- atau 97,79% dengan capaian fisik 100%, dengan efisiensi nilai efisiensi 55,537 dan efisiensi 2,215 (efisien).
- 3) Layanan perkantoran dari pagu anggaran Rp 11.402.413.000,- terealisasi Rp 11.275.464.175- atau 98,89% dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 52,783 dan efisiensi 1,113 (efisien).
- 4) Layanan Manajemen SDM dari pagu anggaran Rp 408.200.000,- terealisasi Rp 372.532.190- atau 91,26% dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 50,032 dan efisiensi 0,013 (efisien).
- 5) Layanan Perencanaan dan Penganggaran dari pagu anggaran Rp 584.140.000,- terealisasi Rp 583.199.783- atau 99,84 % dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 50,402 dan efisiensi 0,161 (efisien).
- 6) Layanan Pemantauan dan Evaluasi dari pagu anggaran RP 221.400.000,- terealisasi Rp 220167895,- atau 99,44 % dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 51,391 dan efisiensi 0,557 (efisien).
- 7) Layanan Layanan Manajemen Keuangan dari pagu anggaran Rp 180.000.000,- terealisasi Rp 179.388.057- atau 99,66 % dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 50,850 dan efisiensi 0,340 (efisien).

E. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama BBPPTP Surabaya dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 47. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)		% Fisik
			Rp	%	
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan Dan Penyegar	44.172.680.000	42.177.648.825	95,48	99,34
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	9.503.849.000	9.428.925.123	99,21	100,00
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	18.003.710.000	16.495.453.016	91,62	91,05
1780	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	14.582.965.000	14.378.226.157	98,60	98,75

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian serapan BBPPTP Surabaya dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan penyerapan anggaran sebesar 95,48% dan capaian fisik sebesar 99,34%.
- Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan penyerapan anggaran sebesar 99,21% dan capaian fisik sebesar 100%.
- Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan serapan anggaran sebesar 96,26% dan capaian fisik sebesar 91,05%.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BBPPTP Surabaya dengan penyerapan anggaran sebesar 98,60% dan capaian fisik sebesar 98,75%.

2. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Realisasi keuangan dan fisik kegiatan berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 48. Serapan Dan Capaian Fisik Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	8.508.370.536,00	8.508.370.536,00	99.40
52	Belanja Barang	75.809.583.000,00	72.184.475.310,00	95.22
53	Belanja Modal	1.893.462.000,00	1.733.712.070,00	91.56
Total		86.263.204.000,00	82.426.557.916,00	96.55

(Sumber: Aplikasi OM SPAN, 2023)

Capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai terealisasi sebesar 99,40%.
- b) Belanja Barang terealisasi sebesar 95,22%.
- c) Belanja Modal terealisasi sebesar 91,56%.

3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BBPPTP Surabaya

Realisasi Anggaran berdasarkan output kegiatan mencerminkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) prioritas utama BBPPTP Surabaya. Realisasi berdasarkan output Kegiatan secara terinci dijelaskan pada Lampiran 1.

Secara umum capaian output kegiatan BBPPTP Surabaya adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu:

- 1) Kawasan Kopi dengan serapan sebesar 94,68% dan capaian fisik 97,35%.
- 2) Kawasan Kakao dengan serapan sebesar 98,90% dan capaian fisik 100%.
- 3) Kawasan Kelapa dengan serapan sebesar 98,05% dan capaian fisik 100%.
- 4) Kawasan Jambu Mete dengan serapan sebesar 85,53% dan capaian fisik 100%.

b) Penguatan Perlindungan Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan antara lain yaitu:

- 1) Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dengan serapan sebesar 98,93% dan capaian fisik 100%.
- 2) Perangkat Perlindungan Perkebunan dengan serapan sebesar 99,60% dan capaian fisik 100%.
- 3) Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dengan serapan sebesar 99,81% dan capaian fisik 100%.
- 4) Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dengan serapan sebesar 99,75% dan capaian fisik 100%.
- 5) Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dengan serapan sebesar 99,03% dan capaian fisik 100%.
- 6) Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 99,16% dan capaian fisik 100%.

c) Penguatan Perbenihan Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Penguatan Perbenihan Perkebunan yaitu:

- 1) Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan dengan serapan sebesar 96,26% dan capaian fisik sebesar 105,60%.
- 2) Pengujian Mutu Benih dengan serapan sebesar 83,39% dan capaian fisik sebesar 67,54%.
- 3) Nursery dengan serapan sebesar 91,77% dan capaian fisik sebesar 100%.

d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BBPPTP Surabaya yaitu:

- 1) Layanan BMN dengan serapan sebesar 97,87% dan capaian fisik 100%.
- 2) Layanan Umum dengan serapan sebesar 97,79% dan capaian fisik 100%.
- 3) Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 98,89% dan capaian fisik 100%.
- 4) Layanan Manajemen SDM dengan serapan sebesar 91,26% dan capaian fisik 91,28%.
- 5) Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan serapan sebesar 99,84% dan capaian fisik 100%.
- 6) Layanan Pemantauan dan Evaluasi Internal dengan serapan sebesar 99,44% dan capaian fisik 100%.

- 7) Layanan Manajemen Keuangan dengan serapan sebesar 99,662% dan capaian fisik 100%.

e) Permasalahan Umum Realisasi Anggaran Tahun 2022

Permasalahan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya reorganisasi di lingkungan dinas berdampak terhadap terlambatnya proses pengajuan pelelangan barang dan jasa terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga proses pelelangan mengalami keterlambatan, dan pendistribusian benih oleh pihak ketiga kepada petani juga terlambat;
- 2) Masih banyak daerah yang lambat dalam hal proses verifikasi dan pengesahan SK CP-CL;
- 3) Pelaksanaan kontrak sebagian besar belum dilaksanakan sesuai komitmen yang telah disepakati;
- 4) Adanya dinamika dalam revisi anggaran (DIPA maupun POK) sampai dengan Triwulan ke-4 Tahun 2023;
- 5) Terjadinya perubahan baik lokasi maupun kelompok tani yang tidak dilaporkan;
- 6) Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir;
- 7) Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di ULP;
- 8) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun;

- 9) Sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem satu pintu dan Keterbatasan SDM menyebabkan pelelangan kegiatan mengantri dan mengakibatkan pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;
- 10) Pengawasan pelaksanaan kegiatan di daerah sulit dilaksanakan karena kendala kondisi geografi dan juga koordinasi dengan UPTD yang terkadang tidak sesuai target.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2023.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2023 mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsinya yaitu Penguatan Perlindungan Perkebunan, Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. BBPPTP Surabaya mempunyai 1 (satu) tugas tambahan yang melekat pada kegiatan tahun 2023 yaitu Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar. Program tersebut dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional pertanian pada sektor perkebunan.

Realisasi penyerapan anggaran BBPPTP Surabaya sebagaimana yang tercatat pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp 82.480.253.121,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 86.263.204.000,- atau mencapai 95,61% dengan capaian fisik sebesar 103,70%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPPTP Surabaya pada tahun anggaran 2023 terlaksana dengan BAIK dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 68,329.

Pada tahun 2023 Perjanjian Kinerja Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan dapat tercapai melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 106,11% (Sangat Berhasil). Capaian ini didukung dengan perolehan Nilai Kinerja Pelayanan Publik BBPPTP Surabaya pada tahun 2023 yang termasuk dalam kategori A atau "Sangat Baik" dengan nilai IKM 88,85.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Anggaran BBPPTP Surabaya Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)	Realisasi	
			Anggaran	Persentase
567338	BBPPTP SURABAYA	86.263.204.000	82.480.253.121	95.61 %
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	44.172.680.000	42.177.648.825	95.48 %
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	44.172.680.000	42.177.648.825	95.48 %
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	16.106.070.000	15.249.424.057	94,68 %
1777.RAI.001.051	Perluasan Tanaman Kopi	9.290.340.000	9.173.495.000	98,74 %
1777.RAI.001.052	Peremajaan Tanaman Kopi	3.200.080.000	2.973.620.000	92,92 %
1777.RAI.001.054	Intensifikasi Tanaman Kopi	2.545.600.000	2.066.131.000	81,16 %
1777.RAI.001.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	1.070.050.000	1.036.178.057	96,83 %
1777.RAI.002	Kawasan Kakao	7.154.060.000	7.075.620.127	98,90%
1777.RAI.002.052	Peremajaan Tanaman kako	1.240.000.000	1.217.965.000,00	98,22%
1777.RAI.002.054	Intensifikasi Tanaman Kakao	5.574.060.000	5.545.080.000	99,48%
1777.RAI.002.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	3.400.000.000	312.575.127	91,93%
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	18.680.230.000	17.943.268.918	96,05%
1777.RAI.005.051	Perluasan Tanaman Kelapa	10.452.900.000	10.103.287.500	96,66%
1777.RAI.005.052	Peremajaan Tanaman Kelapa	6.613.100.000	6.353.075.000	96,07%
1777.RAI.005.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	1.614.230.000	1.486.906.418	92,11%
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete	2.232.320.000	1.909.335.723	85,53%
1777.RAI.007.051	Perluasan Tanaman Jambu Mete	739.400.000	666.857.600	90,19%
1777.RAI.007.052	Peremajaan Tanaman Jambu Mete	831.825.000	826.875.000	99,40%
1777.RAI.007.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	661.095.000	415.603.123	62,87%
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	9.503.849.000	9.428.925.123	99,21%
1779.ABR.001.051	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	977.575.000	967.089.641	98,93%

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)	Realisasi	
			Anggaran	Persentase
1779.CAG.001.054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	44.700.000	44.615.000	99,81%
1779.CAG.002.051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	950.780.000	948.320.875	99,74%
1779.PDC.001.051	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	290.900.000	290.150.000	99,74%
1779.PDC.001.052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	29.500.000	29.440.000	99,80%
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	7.210.394.000	7.149.309.607	99,15%
1779.RAI.001.051	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	378.475.000	374.953.000	99,07%
1779.RAI.001.052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	57.500.000	56.813.352	98,81%
1779.RAI.002.051	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	5.176.100.000	5.167.300.000	99,83%
1779.RAI.002.052	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah	984.225.000	981.900.000	99,76%
1779.RAI.002.053	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	614.094.000	568.343.255	92,55%
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	18.003.710.000	16.495.453.016	91,62%
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	2.051.468.000	1.855.364.279	90,44%
5890.BJA.001.051	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	1.123.468.000	1.081.490.068	96,26%
5890.BJA.002.051	Pengujian Mutu Benih	928.000.000	773.874.211	83,39%
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.951.342.000	14.640.088.737	91,77%
5890.RBK.001	Nurseri	15.952.242.000	14.640.088.737	91,77%
5890.RBK.001.051	Pembangunan Nurseri	1.713.000.000	1.614.557.361	94,20%
5890.RBK.001.052	Operasional Nurseri	13.758.542.000	12.635.849.697	91,84%

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)	Realisasi	
			Anggaran	Persentase
5890.RBK.001.053	Produksi Benih	479.800.000	389.681.679	81,22%
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	14.582.965.000	14.378.226.157	98,60%
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	14.582.965.000	14.378.226.157	98,60%
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.189.225.000	13.022.938.232	98,74%
1780.EBA.956	Layanan BMN	273.300.000	267.480.418	97,87%
1780.EBA.956.052	Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat	273.300.000	267.480.418	97,87%
1780.EBA.962	Layanan Umum	1.513.512.000	1.479.993.639	97,79%
1780.EBA.962.052	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat	1.513.512.000	1.479.993.639	97,79%
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.402.413.000	11.275.464.175	98,89%
1780.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	8.560.159.000	8.508.556.305	99,40%
1780.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.842.254.000	2.766.907.870	97,35%
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM	408.200.000	372.532.190	91,26%
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	408.200.000	372.532.190	91,26%
1780.EBC.954.052	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat	408.200.000	372.532.190	91,26%
1780.EBC.954.052.A	Administrasi Kepegawaian	85.600.000	85.550.622	99,94%
1780.EBC.954.052.B	Peningkatan Kapabilitas Pegawai	322.600.000	286.981.568	88,96%
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Interna	985.540.000	982.755.735	99,72%
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	584.140.000	583.199.783	99,84%

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)	Realisasi	
			Anggaran	Persentase
1780.EBD.952.053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran UPT Pusat	584.140.000	583.199.783	99,84%
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	221.400.000	220.167.895	99,44%
1780.EBD.953.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat	221.400.000	220.167.895	99,44%
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	180.000.000	179.388.057	99,66%
1780.EBD.955.053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat	180.000.000	179.388.057	99,66%

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPPTP SURABAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fausiah T. Ladja
Jabatan : Kepala BBPPTP Surabaya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Nur Alam Syah
Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2023

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama

Fausiah T. Ladja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPPTP SURABAYA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	1-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6.00 Layanan
2	Tersedianya benih tanaman perkebunan	2-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	6.00 Layanan
3	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	3-1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan BBPPTP Surabaya yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)

ANGGARAN

Kegiatan BBPPTP Surabaya

Rp. 86.263.204.000

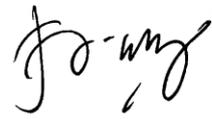
Jakarta, November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Andi Nur Alam Syah



Fausiah T. Ladja

Lampiran 3. Rincian Kegiatan Nurseri Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Pertanian Tahun 2023

No.	Pengelola dan Lokasi Nursery	Komoditas	Kapasitas Produksi Benih	Kegiatan		Anggaran 2023 (Rp)						Output/Produksi Benih					
						Operasional			Bahan Produkai Benih			Proses Produksi	Tersalur	Keterangan/Jumlah KT dll			
				No.	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
1.	Kab Tuban Jawa Timur	Tebu	21.000	1.	Belanja keperluan perkantoran (honorarium pramubakti dan satpam)	71.700.000	271.700.000	100,00	-	-	-	20.216	137 botol	Planlet, varietas CMG Agribun, dikirim tanggal 27 April 2023, ke Nurseri Malang			
				2.	Belanja bahan (administrasi dan pelaporan)	2.900.000	2.900.000	100,00	-	-	-				255 cup	Aklimatisasi 1, varietas CMG, kirim tgl 27 April 2023, ke Nurseri Malang	
				3.	Belanja Honor Output Kegiatan (HOK)	-	-	-	65.000.000	64.480.000	99,20				-	822 polibag	Jenjang G0(aklim 2), Varietas Bululawang, kirim tgl 26 september 2023, ke Nurseri Malang
				4.	Belanja barang non operasional lainnya (biaya sertifikasi, pelabelan, angkut benih, aquarium, kereta dorong, dll)	68.027.000	65.235.115	95,90	-	-	-				-	1300 polibag	Jenjang G0 (aklim 2), Varietas Bululawang, kirim tgl 15 November 2023, ke Nurseri Malang
				5.	Belanja barang persediaan barang dalam proses (agar powder, gula, dll)	-	-	-	165.721.000	160.216.980	96,68				-	854 polibag	Jenjang G0 (aklim 2), Varietas Bululawang, kirim tgl 26 November 2023, ke Nurseri Malang
				6.	Belanja langganan listrik	42.000.000	41.912.421	99,79	-	-	-				-	410 polibag	Jenjang G0 (aklim 2), Varietas AMS, kirim tgl 26 November 2023, ke Nurseri Malang
				7.	Belanja langganan air	12.000.000	6.977.930	58,15	-	-	-				-	1340 polibag	Jenjang G0 (aklim 2), Varietas Bululawang, kirim tgl

													28 Desember 2023, ke Nurseri Malang	
				8.	Belanja langganan daya dan jasa lainnya (internet)	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-	-	-	133.134 mata tunas	Jenjang G1/KBN, varietas Bululawang, dikirim tanggal 27-28 maret 2023, ke nurseri malang
				9.	Belanja jasa lainnya (kalibrasi alat laboratorium)	25.000.000	22.000.000	88,00	-	-	-	-	-	-
				10.	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	117.000.000	89.474.000	76,47	-	-	-	-	-	-
				11.	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	35.770.000	31.994.715	89,45	-	-	-	-	-	-
				12.	Belanja perjalanan dinas biasa	113.000.000	111.042.665	98,27	-	-	-	-	-	-
				13.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (lemari, mesin pompa dll)	79.000.000	52.375.000	66,30	-	-	-	-	-	-
2.	Kab Batang - Jawa Tengah	Kelapa	120.000	1.	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	467.320.000	408.940.000	87,51	-	-	-	53.505 Kelapa Dalam (Proses Penyemaian)	59.882 batang	jenis Kelapa Dalam, dimana bahan produksi dari tahun 2022
				2.	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses	-	-	-	3.578.410.000	3.544.790.325	99,06	123.977 Kelapa Genjah (proses penyemaian)	2.303 batang	Jenis Kelapa Dalam, dimana bahan produksi dari tahun 2023
												17.494 batang	Jenis Kelapa Genjah, dimana bahan produksi dari tahun 2022	
3.	Kab. Bombana	Jambu Mete	100.000	1.	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang	147.690.000	127.350.000	86,23	-	-	-	- Jambu mete = 34.828 batang (selesai proses	rencana disalurkan n Bulan	Benih jambu mete grafting dan kelapa genjah raja rencana

	- Sulawesi Tenggara				memiliki karakteristik bantuan pemerintah							penyambungan) - Kelapa Genjah = 2.135 batang (di area pembesaran)	Maret 2024	akan disertifikasi pada Minggu ke 4 Februari 2024
				2.	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses			527.018.000	488.354.400	92,66				
4.	Kab. Malang - Jawa Timur	Tebu	1.570.000	1.	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	271.700.000	245.115.000	90,22				81.660 mata tunas varietas Bululawang jenjang KBI dalam proses sertifikasi (rencana terbang Maret 2024)	38.000 Mata Tunas	Varietas NX 03, jenjang KBI, dikirim tanggal 30 Juli 2023 ke Poktan Usaha Karya Sugihwaras Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Jawa Timur
				2.	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses	-	-	-	139.590.000	128.015.000	91,71	14.400 mata tunas varietas Bululawang jenjang KBN dalam proses sertifikasi (rencana terbang Mei 2024)	158.000 Mata Tunas	Varietas Bululawang, jenjang KBD, dikirim tanggal 30 Juli 2023 ke Poktan Usaha Karya Sugihwaras Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Jawa Timur
5	Desa Gekbrong - Jawa Barat	Kopi	1.200.000	1.	Belanja barang persediaan dalam proses	2.181.293.000	1.871.326.100	85,79	410.000	-	-	-	-	-
				2.	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	369.750.000	331.160.000	89,56	-	-	-	-	-	-
6.	Jawa Barat - Produksi Benih Kopi Arabika	Kopi	500.000	1.	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	59.500.000	52.785.000	88,71	400.000	338.668	84,67	Persemaian dilaksanakn di tahun 2022 sejumlah 500.000 butir, yang memenuhi syarat untuk diajukan sertifikasi 360.769 kemudian yang lolos sertifikasi sebanyak 338.668 batang	338.668	Kabupaten Garut: 7 Kelompok Tani (155.500 batang); kabupaten Nganjuk : 1 kelompok tani (38.400 batang; Kabupaten Madiun 1 kelompok tani (17.000 batang) ; Kabupaten Ponorogo : 2 kelompok tani (30.000 batang) ;

														Kabupaten Temanggung : 2 kelompok tani (52.000 batang) ; Kota Batu : 1 Poktan (20.000) dan Kabupaten Cianjur : 2 Kelompok tani (25.768 batang)
7.	Kota Bima - NTB	Kelapa	10.000	1.	Belanja barang persediaan dalam proses	62.663.000	58.124.750	92,76	2.750	1.045	38,00	Jumlah benih yang gagal tumbuh 1.175 butir di persemaian; jumlah benih pindah tanam 1.552 polibag dan yang lolos sertifikasi sebanyak 1.045 batang	1.045	Kota Bima: 9 kelompok tani dengan jumlah 1.045
				2.	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	6.080.000	6.080.000	100	-	-	-	-	-	-
8.	NTB - Produksi Benih Kelapa	Kelapa	10.000	1.	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	12.240.000	7.760.000	63,40	10.000	7.650	76,50	-	-	Kabupaten Sumbawa: 1 kelompok tani (454 batang); Kabupaten Lombok Timur 9 kelompok tani (3.708 batang); Kabupaten Lombok Barat 3 kelompok tani (1.892 batang) dan Kabupaten Lombok Utara 1 kelompok tani (1.594 batang)

Lampiran 4. Distribusi Benih Jambu Mete Produksi Nurseri Bombana

Tabel 49. CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Bombana

No.	Poktan	Ketua Poktan	Kecamatan	Desa	Luasan	Jumlah Batang
1.	Sipakainge	Muh agus Adam	Poleang Barat	Babamolingku	30	3,600
2.	Makmur Sejati	Ramli	Poleang Barat	Babamolingku	30	3,600
3.	Mattiro Deceng	Nurdin	Poleang Barat	Babamolingku	30	3,600
4.	Sangkili Makmur	Andi Daming	Poleang Barat	Gambere	20	2,000
5.	Samaturu Jaya	Bakri	Poleang Barat	Matabundu	26	2,600
6.	Suka Maju	Jumardin	Poleang Barat	Gambere	14	1,400
7.	Maju Bersama	Aswarno	Poleang Timur	Mambo	20	2,400
8.	Harapan Jaya	Basir	Poleang Timur	Mambo	24	2,880
9.	Suka Maju	Syamsuddin	Poleang Timur	Mambo	16	1,920
10.	Sesereka	Kasruddin	Poleang Timur	Mambo	21	2,500
11.	Tampula	Masroni	Kabaena Tengah	Lamonggi	15	1,500
12.	Manu Motaha	Arlan	Kabaena Tengah	Lamonggi	15	1,500
13.	Ra-ra	Mandai R	Kabaena Tengah	Lamonggi	14	1,400
14.	Mata ee	Ebit	Kabaena Tengah	Lengora Pantai	21	2,100
15.	Usaha Baru	Samsu	Kabaena Timur	Toli-toli	15	1,500
16.	Nggirio	Ihlal	Kabaena Selatan	Puununu	15	1,500
17.	Samaturu	Jumas K	Matausu	Morengke	20	2,000
18.	Subur Selalu	Sudarmin	Matausu	Lamuru	20	2,000
JUMLAH					366	40,000

Tabel 50. CPCL Benih Jambu Mete Grafting di Kabupaten Bombana

No.	Poktan	Ketua Poktan	Kecamatan	Desa	Jumlah Batang	Jumlah Luasan
1.	Bersama	Muis	Rarowatu	Pangkuri	1,900	19
2.	Mente Bombana	Wahyudin	Rarowatu Utara	Hukaea	1,400	14
3.	Mattirobulu	Rustam	Rumbia Tengah	Poea	1,100	11
4.	Subur Selalu	Sudarmin	Matausu	Lamuru	300	3
5.	Samaturu	Jumas K	Matausu	Moreng ke	500	5
JUMLAH					5,200	52

Tabel 51. CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Buton Selatan

No.	Poktan	Ketua Poktan	Kecamatan	Desa	Luasan	Jumlah Batang
1.	Banten Mustika	La Buti	Lapandewa	Lapandewa Jaya	4.50	450
2.	Cempaka	La Duhani	Lapandewa	Lapandewa Jaya	5.50	550
3.	Kaombo I	Wa Lingi	Lapandewa	Lapandewa Jaya	6.00	600
4.	Mitra Bersama	La Ngkobi	Lapandewa	Lapandewa Jaya	6.00	600
5.	Panen Subur	La Ono	Lapandewa	Lapandewa Jaya	5.00	500
6.	Parawata	La Duku	Lapandewa	Lapandewa Jaya	5.50	550

No.	Poktan	Ketua Poktan	Kecamatan	Desa	Luasan	Jumlah Batang
7.	Subur Jaya	Sumail	Lapandewa	Lapandewa Jaya	5.00	500
8.	Watati Makmur	La Deti	Lapandewa	Lapandewa Jaya	7.50	750
9.	Wapanda	La Pongo	Lapandewa	Lapandewa Jaya	5.00	500
10.	Wawala	La Ralia	Lapandewa	Lapandewa Jaya	5.50	550
11.	Dewa Tani	La Hiadi	Lapandewa	Lapandewa Kaindea	6.40	640
12.	Sadewa	La Malingu	Lapandewa	Lapandewa Kaindea	5.60	560
13.	Jaya	La Holi	Lapandewa	Lapandewa Kaindea	7.00	700
14.	Lagongga	La Waa	Lapandewa	Lapandewa Kaindea	6.00	600
15.	Lahata	La Bante G.	Lapandewa	Lapandewa Kaindea	6.00	600
16.	Wakalala	La Pia	Lapandewa	Lapandewa Kaindea	6.40	640
17.	Wakura	La Ucu	Lapandewa	Lapandewa Kaindea	6.80	680
18.	Kaombo	La Gamu	Lapandewa	Lapandewa Kaindea	6.00	600
19.	Lambau	La Aigo	Lapandewa	Lapandewa	5.60	560
20.	Katandai	La Haliamu	Lapandewa	Lapandewa	7.00	700
21.	Bangkudu	La Roke	Lapandewa	Lapandewa	6.50	650
22.	Bante	La Nudin	Lapandewa	Lapandewa	5.00	500
23.	Lakalipi	La Ayana	Lapandewa	Lapandewa	6.00	600
24.	Panen Subur	La Garo	Lapandewa	Lapandewa	5.00	500
25.	Mekar Jaya	La Aripsi	Lapandewa	Lapandewa	6.00	600
26.	Wucu	Amini	Lapandewa	Lapandewa	5.00	500
27.	Wacidamusa	La Masri	Lapandewa	Lapandewa	5.00	500
28.	Kaombo	La Iri	Lapandewa	Lapandewa	6.40	640
29.	Kabanguaso	La Jabaru	Lapandewa	Burangasi	9.20	920
30.	Rumbia	La Djodja	Lapandewa	Burangasi	8.40	840
31.	Serbaguna	La Saini	Lapandewa	Burangasi	6.40	640
32.	Pumaasi	Baharudin	Lapandewa	Burangasi	6.00	600
33.	Maisie	La Mansur	Lapandewa	Burangasi	5.60	560
34.	KWT Topobangu	Wa Yati	Lapandewa	Burangasi	5.60	560
35.	Bahari	Wa Suncu	Sampolawa	Bahari	4.00	400

No.	Poktan	Ketua Poktan	Kecamatan	Desa	Luasan	Jumlah Batang
36.	Wadudu	Husriati	Sampolawa	Bahari	4.00	400
37.	Makmur	Rostina	Sampolawa	Bahari	4.00	400
38.	Kolapino Indah	Wa Ubi	Sampolawa	Bahari	4.00	400
39.	Tani Berhasil	Wa Ode Sariati	Sampolawa	Bahari III	4.00	400
40.	Tolando Jaya	Dahlia	Sampolawa	Bahari III	4.00	400
41.	Tunas Mekar	Wa Munati	Sampolawa	Bahari III	4.00	400
JUMLAH					232.4	23,240

Tabel 52. CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Poktan	Ketua Poktan	Kecamatan	Desa	Luasan	Jumlah Batang
1.	Melati	Yohanes Dasi Leto	Kakuluk Mesak	Kabuna	2	200
2.	Wehor	Yoseph Mau Dao	Kakuluk Mesak	Kabuna	2	200
3.	Fatukorat 2	Tarsisius Talo Tai	Kakuluk Mesak	Kabuna	2	200
4.	Fatu Besi Lalori	Tarsisius Leo Soro	Kakuluk Mesak	Kabuna	2	200
5.	Ema	Martinus Bere Leto	Kakuluk Mesak	Leosama	1	100
6.	Leowes	Benyamin Taek	Tasifeto Timur	Dafala	4	400
7.	Debuklaran	Mathias Atok	Tasifeto Timur	Dafala	1	100
8.	Hera Maju 2	Januario da Silba	Tasifeto Timur	Manleten	2	200
9.	Bin Alin	Anastasia Rafu	Tasifeto Timur	Sarabau	1	100
10.	Weau	Marla Goreti Rafu	Tasifeto Timur	Sarabau	2	200
11.	Mawar	Maxsensiana Sose	Tasifeto Timur	Sarabau	1	100
12.	Manukiak	Yoseph Manek	Tasifeto Timur	Fatubaa	2	200
13.	Lasaka	Gregorius Bere	Tasifeto Timur	Halimodok	2	200
14.	Alsabik	Fransiskus Da Costa	Tasifeto Timur	Halimodok	1	100
15.	Hoolaku	Bernadus Seran Tobu	Tasifeto Timur	Halimodok	2	200
16.	Sinar Dudato	Antonius Baris	Tasifeto Barat	Naitimu	3	300
17.	Bakenu	Hermalinda Kolo	Tasifeto Barat	Naitimu	4	400
18.	Munaru Bangkit	Justiano Pareira P	Tasifeto Barat	Bakustulama	2	200
19.	Leo Manehat	Yohanes Bau	Raihat	Asumanu	2	200
20.	Cinta Damai	Aloysius Luan	Raihat	Asumanu	2	200
21.	Baki	Vinsensius Mau	Raihat	Aitoun	1	100
22.	Sumber Hidup	Xantoanus Lete Siri	Raihat	Aitoun	2	200
23.	Petani Muda Tapal Batas	Dionisius Moruk	Raihat	Tohe	2	200
JUMLAH					45	4.500

Tabel 53. CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Poktan	Ketua Poktan	Kecamatan	Desa	Luasan	Jumlah Batang
1.	Netnoni	Fidelis Manek	Rinhat	Alala	5	500
2.	Obes Jaya	Martinus Timu na	Rinhat	Wekeke	5	500
3.	Garuda	Kasmir Ulu Bau	Malaka Timur	Raiulun	5	500
4.	Merpati	Martinus Bau	Malaka Timur	Raiulun	7	700
5.	Milenial	Fernandes A. De Fatima	Malaka Tengah	Kletek	10	1,000
6.	Bereliku Jaya	Edmundus Fahik	Kobalima Timur	Alas Selatan	10	1,000
7.	Fohobot	Yohanes Manek	Kobalima	Sisi	10	1,000
8.	Hidup Makmur	Januarius Fahik	Kobalima	Litamali	8	800
9.	Nekmese	Patrisius Taniu	Wewiku	Lamea	5	500
JUMLAH					65	6,500

Tabel 54. CPCL Benih Jambu Mete seedling di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Poktan	Ketua Poktan	Kecamatan	Desa	Luasan	Jumlah Batang
1.	Himbu Luri	Edu Nggala Mbaya	Ngadu Ngala	Kabanda	10	1.000
2.	Mila Eti Amah	Peli Kadu Amah	Ngadu Ngala	Kabanda	10	1.000
3.	Opang Madangu	Umbu Kalikit Mina	Ngadu Ngala	Kabanda	10	1.000
4.	Gotong Royong	Anton Mb. Kaleka Lima	Ngadu Ngala	Kabanda	10	1.000
5.	Lata Luti	Samuel Hamatara	Karera	Nggongi	10	1.000
6.	Luri Manjak	Hadu Hina III	Karera	Praimadita	10	1.000
7.	Tunas Baru	Stefen U.K Mehanjawa	Karera	Praimadita	10	1.000
JUMLAH					70	7.000

Lampiran 5. Surat Tugas Penyusunan Laporan Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA**

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482
TELEPON/FAKSIMILI (0321) 496430, 495842, 495151
WEBSITE : <https://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

**SURAT TUGAS
NOMOR : 181/RC.330/E.7/01/2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2023;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu menerbitkan surat tugas.
- Dasar : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor SP DIPA-018.05.2.567338/2024 revisi DIPA ke-1 tanggal 5 Januari 2024.

Memberi Tugas

- Kepada : (Daftar Terlampir)
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) BBPPTP Surabaya Tahun 2023.
2. Agar melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
3. Yang bersangkutan segera menyusun LAKIN BBPPTP Surabaya Tahun 2023 paling lambat 15 Januari 2024.

Jombang, 10 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Fausiah T. Ladja, S.P., M.Si.
NIP 197906202002122001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Surat Tugas Kepala Balai Besar
Nomor : 181/RC.330/E.7/01/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

No.	Nama	Gol.	NIP	Waktu Pelaksanaan
1.	Rizky Ahadi F., S.E., M.Agr	IV/a	198402262003121001	12 Januari 2024
2.	Erna Zahro'in, S.P.	IV/a	197604222006042001	12 Januari 2024
3.	R. Tomas Windarno, S.P., M.P.	IV/a	197212232003121001	12 Januari 2024
4.	Faiz Muhtadi Abdul .M, S.Kom.	III/d	198011262009011007	12 Januari 2024
5.	Puguh Handoyo Seno, S.P.	III/c	198507232006041001	12 Januari 2024
6.	Effendi Wibowo, S.P.	III/d	198106082006041002	12 Januari 2024
7.	Dina Ernawati, S.P., M.P.	III/d	198112072006042001	12 Januari 2024
8.	Kiswidiatmo,S.E., M.M.	III/d	197604222003121001	12 Januari 2024
9.	Rian Pambudi, S.P.	III/b	199212062018011001	12 Januari 2024
10.	Lady Diana, S.Si., M.Sc.	III/b	198704222015032003	12 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Fausiah T. Ladja, S.P., M.Si.
NIP 197906202002122001